

**GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN BANGGAI LAUT,
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ACUAN PERANCANGAN

Diajukan Sebagai Penulisan Tugas Akhir
Untuk Memenuhi Syarat Ujian Sarjana
Teknik Arsitektur



OLEH :

MUH. FIRMANSYAH SALIM

45 012 043 009

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN ACUAN PERANCANGAN

PERANCANGAN : TUGAS AKHIR SARJANA TEKNIK ARSITEKTUR
JUDUL : GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN BANGGAL LAUT,
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENYUSUN : MUH. FIRMANSYAH SALIM
NO. STAMBUK : 45 12 043 009
PERIODE : SEMESTER GENAP 2018/2019

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Satriani Latief, ST., MT
NIDN. 0917107405

Pembimbing II



Lisa Amalia, ST., MT
NIDN. 0929018901

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Teknik



Ir. Ridwan, ST., M.Si
NIDN. 0910127101

Ketua Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik



Syam Fitriani Asnur, ST., Msc
NIDN. 0931087602

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan acuan perancangan yang merupakan salah satu syarat kelulusan studi pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar yang berjudul:

***“GEDUNG DPRD KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI SULAWESI
TENGAH”***

Penulis menyadari bahwa segala daya upaya yang telah dicurahkan untuk menyelesaikan penulisan ini. Tidak dapat dipungkiri penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan penulisan ini, yang dapat berguna bagi kita semua pada masa akan datang. Berkat usaha dan kerja keras dari awal perkuliahan hingga penyusunan penulisan ini tentunya tidak sedikit hambatan dan cobaan yang dihadapi, untuk itu dalam kesempatan ini penulis memohon maaf, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Satriani Latief, ST., MT** selaku dosen pembimbing I, dan **Lisa Amalia Syamsuddin, ST., MT** selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. **Ibu Syamfitriani Asnur, ST., MT**, selaku Ketua Jurusan, dan seluruh jajaran Dosen Jurusan Arsitektur, Universitas Bosowa, Makassar.
3. **Bapak Muh .Awaluddin Hamdy, ST., MT** dan **Bapak Syahril Idris, ST., MSP** selaku Tim Penguji yang telah meluangkan waktu menguji penulis.
4. Bapak dan ibu dosen serta para staf Akademik Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Makassar.
5. Seluruh teman-teman angkatan TAHANAN 012, Terima kasih atas motifasi selama ini.
6. Seluruh teman-teman yang ada di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar yang tidak dapat disebut satu-persatu dalam memberikan saran maupun masukan selama penyelesaian studi.
7. Segenap instansi yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Bravo Merah-Hitam semuanya tanpa diskriminasi. Ingat perjuangan kita belum berakhir kawan-kawan.

Melalui kesempatan ini pula dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat kagumi dan bangga serta memberikan banyak motifasi.

penulis selama ini baik materil maupun moral serta seluruh keluarga besar yang ada di kampung halaman, terima kasih atas dukungan dan doa tulusnya.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan semoga

Allah selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, **Amin.**

Billahitaufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2019

MUH FIRMANSYAH SALIM

Penulis



ABSTRAK

Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah Ini. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Laut sebagai kabupaten induk dimana sesuai namanya secara geografis meliputi wilayah Pulau Banggai. Berdasarkan hasil analisis dan opini yang ada terhadap Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut yang ada sekarang, maka diperoleh hal-hal yang mendasari mengapa diadakannya perencanaan baru Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut.

Kabupaten Banggai Laut ini juga berada diantara tiga kota penting di Indonesia Timur yaitu Makassar, Ambon, dan Bitung/Manado, sehingga menjadikannya berada pada posisi yang sangat strategis dalam lalu-lintas perdagangan antar pulau. Kabupaten Banggai Laut ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai secara umum. Kabupaten Banggai Laut merupakan desa pesisir sehingga memiliki suhu udara yang relatif tinggi. Kabupaten Banggai Laut

secara keseluruhan tersusun atas beberapa jenis tanah. Untuk lebih memperjelas kondisi tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa struktur tanah sangat mempengaruhi keberadaan vegetasi suatu wilayah, atau dengan kata lain dapat diidentifikasi berdasarkan jenis vegetasi yang hidup pada wilayah ini.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan	3
1.3.1 Tujuan Perancangan.....	3
1.3.2 Manfaat Perancangan.....	4
1.4 Lingkup Pembahasan	4
1.5 Metode dan Sistematika Pembahasan	4
1.5.1 Metode Pembahasan.....	4
1.5.2 Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA	
2.1 Bidang Lembaga Kekuasaan di Indonesia	6
2.2 DPRD Sebagai Lembaga Legislatif di Daerah	6
2.2.1 Kedudukan dan Hak DPRD	6
2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	8

2.2.3	Keanggotaan DPRD	9
2.2.4	Pimpinan dan Fraksi-fraksi pada DPRD	9
2.2.5	Struktur Organisasi dan Alat-Alat Kelengkapan DPRD.....	10
2.2.6	Tata Sidang Rapat	17
2.3	Pola Hubungan DPRD Kabupaten/Kota	22
2.3.1	Pola Hubungan Eksternal	22
2.3.2	Pola Hubungan Internal	23
2.4	Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Gedung DPRD Pada Kabupaten/Kota	23
2.5	Gedung DPRD Sebagai Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Legislatif	24
2.5.1	Batas Pengertian	24
2.5.2	Motivasi DPRD	24
2.5.3	Tuntutan Perwujudan Gedung DPRD	24
2.5.4	Pola Hubungan Organisasi	29
2.5.5	Tujuan Spesifik Tata Sidang	32
2.6	Studi Banding Gedung DPRD	35
2.6.1	Gedung DPRD Kota Ambon	35
2.6.2	Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat	36
2.6.3	Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah	37
2.6.4	Gedung DPRD Kabupaten Buru	39
2.6.5	Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara	40

BAB III TINJAUAN UMUM GEDUNG DPRD KABUPATEN BANGGAI LAUT

3.1	Tinjauan Umum Kabupaten Banggai Laut.....	42
3.1.1	Letak Geografi	42
3.1.2	Luas Wilayah	42
3.1.3	Penduduk	43
3.1.4	Iklm	44
3.1.5	Kondisi Tanah	44
3.2	Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut Sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	46
3.2.1	Latar Belakang	46
3.2.2	Tujuan	47
3.2.3	Motivasi Pengadaan Wadah	47
3.2.4	Fungsi dan Peran	48
3.3	Gedung DPRD Dalam Sistem Pemerintahan	48
3.4	Bentuk dan Tampilan Gedung DPRD.....	49
3.4.1	Bentuk Dasar Gedung DPRD	49
3.4.2	Tampilan Gedung DPRD	50
3.5	Aktifitas yang Terjadi Pada Gedung DPRD.....	52
3.5.1	Aktifitas Pokok	52
3.5.2	Aktifitas Pendukung	52
3.5.3	Aktifitas Pelayanan	53
3.5.4	Aktifitas Servis	53
3.6	Ungkapan Spesifikasi Tata Fisik	54

3.6.1	Kebutuhan Ruang	54
3.6.2	Organisasi Ruang	55
3.6.3	Sistem Sirkulasi	56

**BAB IV PENDEKATAN PERANCANGAN GEDUNG DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

4.1	Program Tata Ruang Makro	57
4.1.1	Titik Tolak Perencanaan	57
4.1.2	Penentuan Lokasi dan Site/Tapak.....	58
4.1.3	Pola Tata Lingkungan dan Analisis Tapak	63
4.1.4	Landsekap	63
4.1.5	Tata Masa dan Tampilan Bangunan	64
4.1.6	Pola Sirkulasi pada Bangunan	66
4.2	Program Tata Ruang Mikro	67
4.2.1	Pengelompokan dan Kebutuhan Ruang	67
4.2.2	Bentuk Ruang	102
4.2.3	Interior/Bahan	102
4.2.4	Sistem Utilitas	104
4.2.5	Struktur Bangunan	110
4.2.6	Envirotmen Ruang	113

BAB V PENUTUP

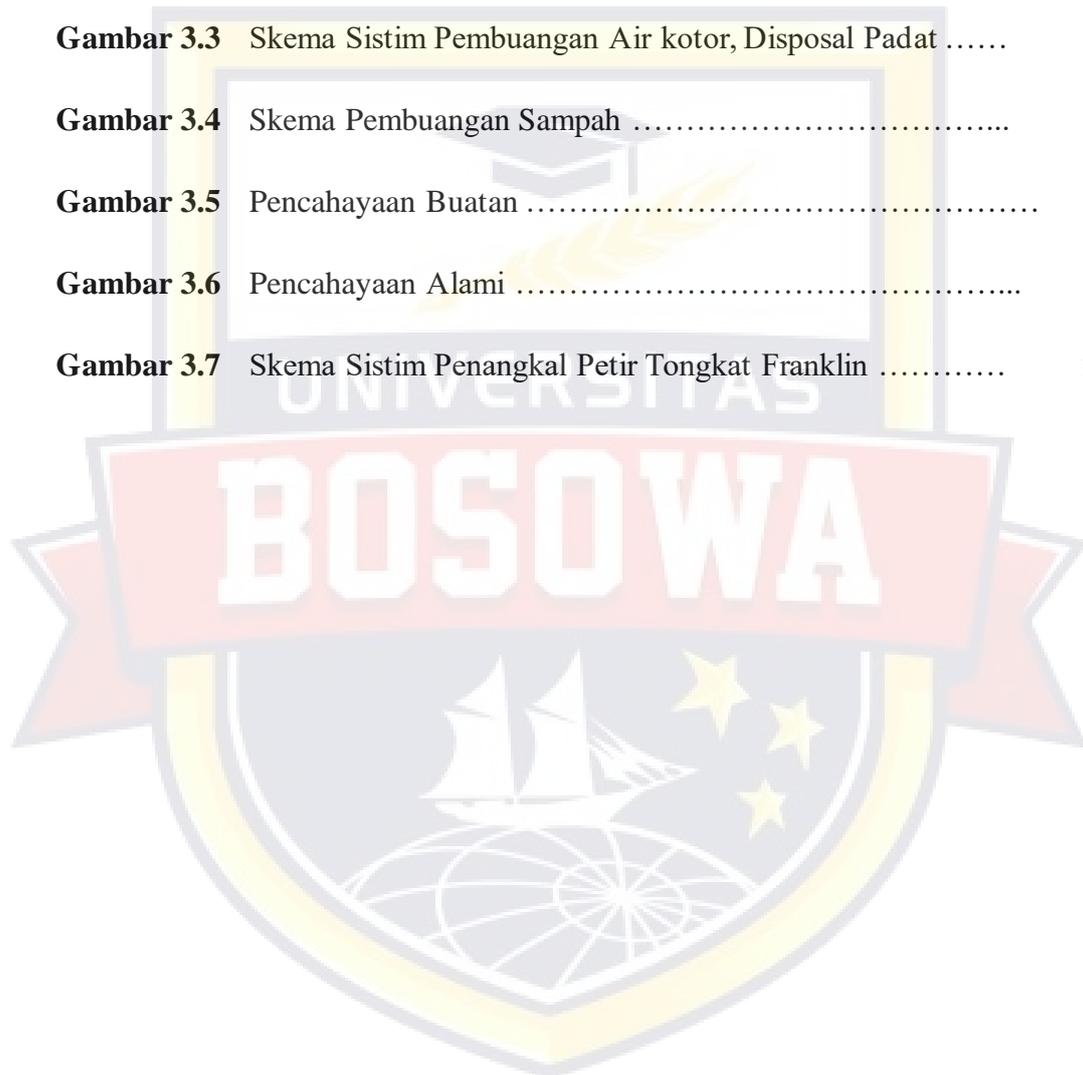
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema Sistim Jaringan Air Bersih	14
Gambar 3.2	Skema Sistim Pembuangan Air Kotor, Disposai Cair	14
Gambar 3.3	Skema Sistim Pembuangan Air kotor, Disposai Padat	15
Gambar 3.4	Skema Pembuangan Sampah	15
Gambar 3.5	Pencahayaan Buatan	17
Gambar 3.6	Pencahayaan Alami	17
Gambar 3.7	Skema Sistim Penangkal Petir Tongkat Franklin	20



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD	8
Tabel 2.2	Perhitungan Jumlah Kursi Anggota DPRD Berdasarkan Jumlah Penduduk	9
Tabel 2.3	Jumlah dan Tugas Komisi	16
Tabel 2.4	Fraksi Partai dan Jumlah Anggota Kab. Banggai Laut.....	20
Tabel 2.5	Waktu Rapat Anggota DPRD	22
Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Kabupaten Banggai Laut.....	43
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kab. Banggai Laut.....	61
Tabel 4.2	Ruang Sidang Pleno	79
Tabel 4.3	Ruang Komisi	81
Tabel 4.4	Ruang Fraksi	82
Tabel 4.5	Lobi Fraksi	82
Tabel 4.6	Ruang Lobi Anggota	83
Tabel 4.7	Ruang Resepsi dan Tamu	83
Tabel 4.8	Ruang Panitia Musyawarah	84

Tabel 4.9	Ruang Panitia Anggaran	84
Tabel 4.10	Ruang Kerja Ketua DPRD	85
Tabel 4.11	Ruang Wakil Ketua DPRD	86
Tabel 4.12	Ruang Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	87
Tabel 4.13	Ruang Bagian Protokoler	87
Tabel 4.14	Ruang Bagian Risalah	88
Tabel 4.15	Ruang Bagian Persidangan	88
Tabel 4.16	Ruang Bagian Anggaran dan Pembayaran	89
Tabel 4.17	Ruang Bagian Pembukuan dan Pelaporan	89
Tabel 4.18	Ruang Bagian Keamanan	90
Tabel 4.19	Ruang Bagian Informasi dan Pendaftaran	90
Tabel 4.20	Ruang Bagian Distrbusi	90
Tabel 4.21	Ruang Perpustakaan	91
Tabel 4.22	Ruang Ibadah/Mushollah	91
Tabel 4.23	Ruang Dokumentasi	92
Tabel 4.24	Ruang Pengadaan	92
Tabel 4.25	Ruang Pers	93
Tabel 4.26	Ruang Aspirasi	94
Tabel 4.27	Ruang Lavatori	95
Tabel 4.28	Ruang Data Multimedia	96

Tabel 4.29	Ruang Cafeteria	96
Tabel 4.30	Ruang Jaga	97
Tabel 4.31	Rekapitulasi Besaran Ruang	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Laut sebagai kabupaten induk dimana sesuai namanya secara geografis meliputi wilayah Kepulauan. Kabupaten Banggai Laut memiliki 7 (Tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Utara dengan ibukota Banggai Utara, Kecamatan Banggai Tengah dengan Banggai Tengah, Kecamatan Banggai Selatan dengan Banggai Selatan, kecamatan Bangkurung dengan ibukota Bangkurung, Kecamatan Boka Kepulauan dengan Ibukota Bangkurung, dan Labobo dengan ibu kota labobo. Penduduk Kabupaten Banggai Laut terdiri dari orang-orang asli penghuni Pulau Banggai, kemudian penduduk yang berasal dari Pulau Banggai dan penduduk pendatang kebanyakan berasal dari etnis Buton, Jawa dan Bugis.

Berdasarkan hasil analisis dan opini yang ada terhadap Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut yang sekarang belum mempunyai gedung tersendiri, maka diperoleh hal-hal yang mendasari mengapa diadakannya perencanaan baru Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut. Disebabkan bangunan DPRD Kabupaten Banggai Laut yang ada sekarang masih menggunakan kantor camat. Lokasi DPRD yang sekarang tidak terletak pada lokasi pusat

pemerintahan. Dari segi arsitektur, bangunan DPRD yang ada tidak menampakkan kewibawaan suatu kantor DPRD serta tidak menunjukkan ciri dan karakter dari masyarakat Kabupaten Banggai Laut.

Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut merupakan sebuah proyek pemerintah yang menampung kerja para anggota dewan yang dibantu oleh sekretariat dewan di Kabupaten Banggai Laut. Lokasi yang ditetapkan untuk Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut, merupakan lokasi dengan kawasan pemerintahan dan bagian dari rencana dasar tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buru Selatan. Fokus utama dari Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut ada pembagian atap gedung. Atap gedung menggunakan atap bangunan adat Banggai yang dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi arsitektur yang berkembang pada saat ini.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang layak sesuai dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Februari 2008, No:64/430/PUUD, mengenai pembangunan gedung DPRD pada tiap-tiap kabupaten/kota adalah merupakan kebijakan secara nasional yang berupa pengadaan gedung DPRD, guna menjalankan sistem pemerintahan di daerah. Dengan demikian kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan daerah dan DPRD sebagai lembaga yang mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat daerah serta berfungsi sebagai suatu wadah untuk menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat, maka perlu adanya wadah atau tempat berupa gedung DPRD yang representatif

untuk menampung serta membahas berbagai kebijakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang suatu gedung DPRD kota yang dapat mencerminkan wadah suatu bangunan yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat?
2. Bagaimana menentukan bentuk dan karakter bangunan Gedung DPRD Kota yang sesuai dengan fungsi kelembagaan dan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisional masyarakat setempat?
3. Bagaimana ketentuan struktur dan utilitas bangunannya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.3.1 Tujuan perancangan

1. Merancang gedung DPRD Kabupaten yang dapat mencerminkan wadah suatu bangunan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Merancang gedung DPRD yang sesuai dengan bentuk dan karakter masyarakat setempat.
3. Merancang gedung DPRD dengan struktur yang efisien, stabil dan tahan terhadap beban bangunan serta utilitas (air bersih, air kotor, listrik, telekomunikasi, pengamanan terhadap kebakaran dan penangkal petir) yang baik.

1.3.2 Manfaat perancangan

1. Bagi pemerintah

DPRD merupakan lembaga legislatif yang dianggap sebagai representatif masyarakat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Bagi masyarakat

Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian diimplementasikan dalam bentuk undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

1.4 Lingkup Pembahasan

Pembahasan diorientasikan pada faktor perencanaan fisik bangunan gedung DPRD melalui ilmu arsitektur dengan pendekatan arsitektur tradisional dan bentuk-bentuk lokal yang ada di Kabupaten Banggai Laut dengan penekanan pada upaya menjadikan gedung DPRD sebagai tempat/wadah untuk melaksanakan administrasi, menampung dan membahas segala aspirasi rakyat. Kelayakan perencanaan fisik diambil 10 (sepuluh) tahun ke depan, dan selama jangka waktu tersebut diharapkan tidak ada perubahan secara drastis sesuai rencana.

1.5 Metode dan Sistematikan Pembahasan

1.5.1 Metode pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan adalah analisis sintesa, yaitu menguraikan masalah yang ada melalui studi literatur, wawancara

dengan pihak terkait dan survei lapangan, kemudian mengaitkannya dengan beberapa variabel yang berpengaruh, sehingga dapat dirumuskan sebagai acuan untuk dijadikan bahan transformasi ke dalam desain.

1.5.2 Sistematika pembahasan

Untuk menjelaskan langkah perencanaan serta hal yang mencakup di dalamnya maka sistematika pembahasan dibentuk sebagai berikut:

- a. BAB I Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta metode dan sistematika pembahasan.
- b. BAB II Membahas berbagai tinjauan secara umum tentang sistem pemerintah dan kelembagaan DPRD di Indonesia.
- c. BAB III Merupakan tahap tinjauan khusus gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut.
- d. BAB V Merupakan tahap penyusunan acuan dasar perancangan gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut.
- e. BAB IV Kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM
LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

2.1 Bidang Lembaga Kekuasaan Di Indonesia

Dalam upaya mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kelembagaan pemerintah di Indonesia dapat dibagi atas tiga bidang *kekuasaan (trias politica)* yang merupakan gagasan dari *Montesquie*.

Ketiga bidang kekuasaan itu adalah :

1. Bidang kekuasaan *legislatif* yakni kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Bidang kekuasaan *eksekutif* yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
3. Bidang kekuasaan *yudikatif* yakni kekuasaan untuk mengawasi undang-undang.

Tujuan dari pembagian kekuasaan dimaksud agar kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada suatu lembaga saja.

2.2 DPRD Sebagai Lembaga Legislatif Di Daerah

2.2.1 Kedudukan dan hak DPRD

1. Kedudukan DPRD

Pada UU RI No. 32 pasal 3 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa *Pemerintah Daerah adalah Kepala*

Daerah dan DPRD. Menunjukkan bahwa kedudukan DPRD sejajar dengan kepala daerah dan merupakan lembaga Legislatif Daerah. Untuk itu DPRD sebagai lembaga legislatif harus mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, menjalankan tugas, mengawasi pemerintah daerah.

2. Hak DPRD

Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah (RANPERDA).
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imitas.
- g. Protokoler.
- h. Keuangan dan administratif.

2.2.2 Tugas dan kewajiban DPRD

Tabel 2.1
Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD

Tugas DPRD	Kewajiban DPRD
1. Membentuk peraturan dan Perundang-undangan Daerah (PERDA) dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.	1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Bupati (Kepala Daerah).	2. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah (PERDA) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.	4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
5. Memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah.	5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi.	6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.	7. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
	8. Menjaga etika dan moral dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
	9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
	10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
	11. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

2.2.3 Keanggotaan DPRD

Jumlah anggota DPRD tiap daerah ditetapkan dengan dasar perhitungan jumlah penduduk dalam menetapkan jumlah anggota DPRD Kabupaten. Syarat maksimum dan minimum jumlah anggota masing-masing daerah menurut UU RI No. 22 Pasal 69 Ayat 1 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR-DPR-DPRD adalah :

- a. Maksimum 45 orang.
- b. Minimum 25 orang.

Sedangkan perhitungan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten didasarkan pada jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perhitungan Jumlah Kursi Anggota DPRD
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	100.000 jiwa	20 kursi.
2.	100.001-200.000 jiwa	25 kursi.
3.	200.001-300.000 jiwa	30 kursi
4.	300.001-400.000 jiwa	35 kursi.
5.	400.001-500.000 jiwa	40 kursi.
6.	di atas 500.000 jiwa	45 kursi.

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

2.2.4 Pimpinan dan fraksi-fraksi pada DPRD

a. Pimpinan DPRD

Dalam UU RI No. 22 Pasal 73 Ayat 1 Tahun 2003, tentang susunan dan MPR-DPR-DPRD menjelaskan bahwa pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

b. Fraksi-fraksi pada DPRD

Untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota DPRD dalam menjalankan Demokrasi Pancasila maka DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik peserta Pemilihan Umum (PEMILU). Partai politik yang dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang membentuk jumlah kursi sekurang-kurangnya lima dari jumlah anggota DPRD yang ada. Anggota DPRD dari partai politik yang jumlah kursinya kurang dari lima dapat bergabung kedalam satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaan dan pimpinan fraksi diumumkan di lembaran daerah.

2.2.5 Struktur organisasi dan alat-alat kelengkapan DPRD

Susunan struktur organisasi dan formasi sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Daerah dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Disamping pimpinan DPRD sebagai alat kelengkapan, DPRD juga mempunyai alat kelengkapan lainnya yaitu :

a. Sekretariat

1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten/Kota

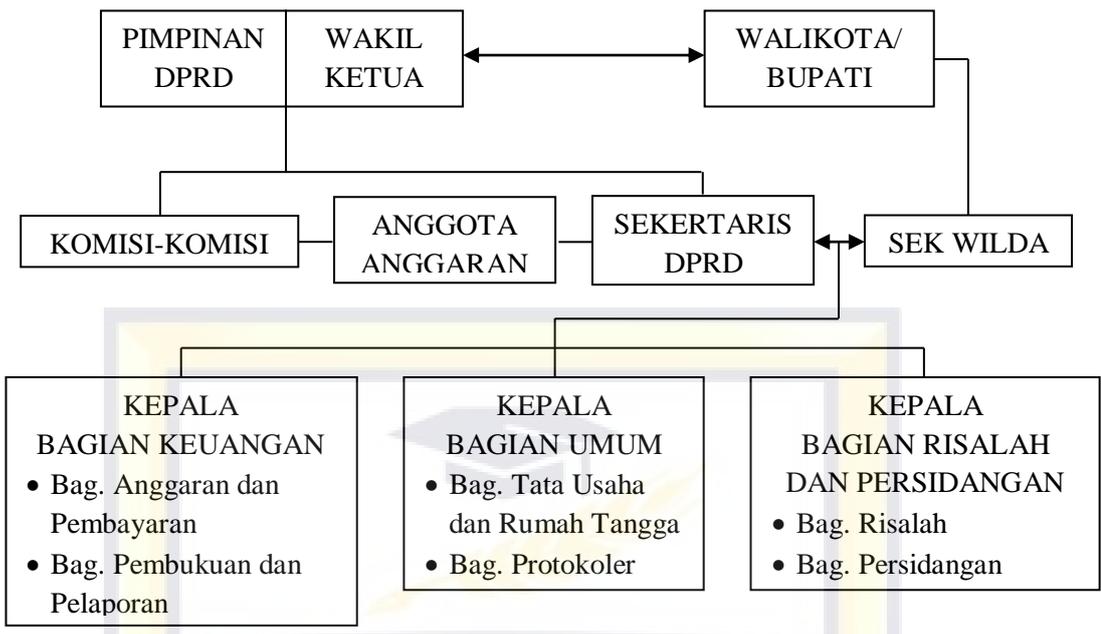
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

- 4) Pembentukan susunan organisasi dan formasi DPRD juga diatur dengan peraturan daerah sesuai yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri.

- 5) Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membangun anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

- 6) Anggaran belanja sekretariat DPRD ditetapkan dalam keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 7) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi yaitu memfasilitasi rapat anggota DPRD, melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, mengelola tata ruang DPRD.



Gambar 2.1 Skema Struktur Organisasi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
 (Sumber : Kabupaten Buru Selatan, 2012)



Gambar 2.2 Skema Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
 (Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

Dalam menjalankan tugasnya, sekretariat dibantu oleh suatu staf sekretariat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan pada susunan tugas sekretariat. Sekretariat DPRD kabupaten/kota, dapat dilihat sebagai berikut:

8) Bagian Umum membawahi :

- a) Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b) Sub bagian Protokoler

9) Bagian Keuangan membawahi :

- a) Sub bagian Anggaran dan Pembayaran
- b) Sub bagian Pembukuan dan Pelaporan

10) Bagian Risalah dan Persidangan membawahi :

- a) Sub bagian Risalah
- b) Sub bagian Persidangan

b. Panitia-panitia

Selain adanya fraksi-fraksi dan komisi-komisi dari partai politik, juga dikenal adanya panitia-panitia baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap (khusus). Panitia tetap yaitu panitia musyawarah dan panitia anggaran yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Adapun tugas panitia musyawarah adalah :

- 1) Memberi pertimbangan/saran kepada DPRD tentang penetapan program kerja baik diminta maupun tidak diminta.
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara DPRD.

- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- 4) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus (PANSUS).

Sedangkan tugas panitia anggaran adalah:

- 1) Memberi saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selambat-lambatnya lima bula sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa pokok-pokok DPRD.
- 2) Memberi saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkannya dalam Rapat Paripurna.
- 3) Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra-Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), baik penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disampaikan kepada kepala daerah.
- 4) Memberi saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
- 5) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat.

Peraturan tata tertib DPRD kabupaten/kota, Nomor 188 Tahun 2008. Panitia khusus mempunyai anggota sekurang-

kurangnya 5 orang anggota DPRD yang bersifat sementara mempunyai tugas:

- 1) Menampung persoalan-persoalan yang mendesak meliputi bidang tugas dan kewajiban beberapa komisi.
- 2) Menyelesaikan beberapa masalah mengenai Rencana Peraturan Daerah, yang perlu segera mendapat penyelesaian.
- 3) Meninjau persoalan-persoalan yang meminta penelitian secara khusus.

c. Komisi-komisi

Untuk melancarkan pekerjaan dan melaksanakan tugas utama pengawasan, maka DPRD membentuk komisi-komisi yang meliputi satu bidang atau lebih mempunyai tugas kewajiban. Melakukan pembahasan terhadap Rencana Peraturan Daerah khususnya Rancangan-Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merancang keputusan DPRD lainnya yang masuk bidang kerja komisi yang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, Nomor 188 Tahun 2008.

1) Mengenai jumlah dan tugas komisi, terdiri dari:

Tabel 2.3
Jumlah dan Tugas Komisi

Jumlah Komisi	Bidang-bidang	Keterangan
A	Bidang Pemerintahan, Hukum, Agama, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Pemberdayaan Perempuan	Aparatur/kepegawaian, kelembagaan, sarana/prasarana pemerintahan, perizinan, dan organisasi pemerintahan daerah, Informatika/komunikasi dan pengelolaan data elektronik, media masa, pemerintahan, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan perempuan dan BKKBN serta pertahanan negara, organisasi sosial politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan, penegakkan hukum, perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, perlindungan masyarakat dan Pertanahan.
B	Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Sosial	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, pengadaan pangan/logistik, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, dan aset daerah, perekonomian, koperasi dan UKM, perencanaan pembangunan.
C	Bidang Pembangunan, Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan fisik, prasarana wilayah, tata ruang, perumahan dan pemukiman serta tenaga kerja dan transmigrasi, perhubungan/prasarana transportasi, sumber daya air, kelistrikan, telekomunikasi, dan energi, pendidikan dan olah raga, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, keagamaan, kepemudaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup dan pengelolaannya.

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

- 2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu komisi, kecuali pimpinan DPRD wakil ketua dan sekretaris.
- 3) Mengenai anggota tiap-tiap komisi diatur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD kabupaten/Kota, tanggal 13 Oktober 2008.

- 4) Masa jabatan dari komisi tersebut selama satu tahun masa persidangan, diputuskan oleh pimpinan DPRD atas usul fraksi.

- 5) Pimpinan komisi-komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali seminggu, untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggota komisi dan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas dan kewajiban.

2.2.6 Tata sidang rapat

a. Persidangan

DPRD mengadakan sidang sekurang-kurang enam kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing fraksi, rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka dan umum. DPRD juga mengadakan rapat tertentu, apabila masalah yang akan dibicarakan bersifat rahasia atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan DPRD.

- 1) Macam-macam sidang dan rapat DPRD.
 - a) Sidang Pleno/Rapat Paripurna.
 - b) Rapat Fraksi.

- c) Rapat Komisi/Gabungan Komisi.
- d) Rapat Panitia Anggaran.
- e) Rapat Pimpinan.
- f) Rapat Kerja.
- g) Rapat Dengar Pendapat.

2) Tahun sidang DPRD dimulai pada tanggal 13 Oktober dan berakhir 25 Oktober setiap tahun, dan sidang dibagi empat masa persidangan yaitu :

- a) Oktober-Desember.
- b) Januari-Maret.
- c) April-Juni.
- d) Juli-Oktober.

3) Pada hari permulaan tahun sidang, kepala daerah memberikan amanat dihadapan DPRD pengantar nota keuangan dan Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD).

b. Persidangan Pleno/Rapat Paripurna

1) Sidang Pleno/Rapat Paripurna adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan tentang pelaksanaan dan wewenang DPRD.

2) Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua melaksanakan satu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

- 3) Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua membahas hak-hak khusus.

c. Peninjau Sidang

Peninjau sidang adalah mereka yang hadir dalam sidang DPRD atas undangan pimpinan DPRD.

- 1) Para peninjau sidang disediakan tempat tersendiri.
- 2) Para peninjau (pengunjung) harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban yang diadakan oleh DPRD dan dilarang menyatakan tanda setuju, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- 3) Pimpinan memelihara dan menjaga suasana yang lebih tertib, apabila ketentuan ini dilanggar maka pimpinan memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.
- 4) Sidang pleno/rapat paripurna dihadiri oleh:
 - a) Tamu sidang.
 - b) Anggota DPRD (pada tahun pemilihan).
 - c) Lima orang pencatat dan sekretaris DPRD Kabupaten.
 - d) Peninjau sidang dari stasiun televisi, stasiun radio, maupun media masa lainnya.

d. Rapat Fraksi

Fraksi-fraksi yang ada didalam DPRD bukanlah alat kelengkapan dari DPRD. Rapat fraksi ini dimaksud untuk

membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan dari masing-masing fraksi yang ada dalam kelembagaan DPRD.

Rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu rahasia dilaksanakan di ruang-ruang fraksi dalam DPRD sedang jika pembicaraan sangat rahasia maka di markas fraksi masing-masing. Ruang rapat fraksi dilengkapi dengan lobi fraksi yang digunakan untuk:

- 1) Digunakan istirahat sebelum rapat di mulai.
- 2) Digunakan sesudah rapat usai.
- 3) Istirahat anggota-anggota fraksi.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banggai Laut tahun pemilihan 2014-2019 adalah :

Tabel 2.4
Fraksi Partai dan Jumlah Anggota
Kab. Banggai Laut 2014-2019

Fraksi Partai	Jumlah Anggota
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4 orang
Fraksi Partai demokrat	3 orang
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)	3 orang
Fraksi Partai Gerindra	3 orang
Fraksi Perubahan	4 orang
Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (KPS)	3 orang
Total Keseluruhan anggota Fraksi	20 orang

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

e. Rapat Komisi

Rapat komisi yang dilakukan meliputi :

- 1) Rapat Komisi A.
- 2) Rapat Komisi B.
- 3) Rapat Komisi C.

Rapat komis dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Dewan menetapkan seorang ketua komisi dan wakil ketua komisi. Dalam rapat komisi ini dihadiri oleh :

- 1) Anggota komisi yang bersangkutan.
- 2) Pejabat yang diundang sesuai dengan jabatannya.

Rapat gabungan komisi jarang dilaksanakan, dan apabila dilaksanakan dapat dipergunakan ruang pleno pada rapat gabungan tiga komisi atau lebih.

f. Rapat Pimpinan DPRD

Rapat pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua DPRD. Rapat pimpinan diperluas adalah rapat pimpinan DPRD ditambah pimpinan komisi dan pimpinan panitia-panitia terkait serta dapat mengundang unsur pemerintah daerah yang dipandang perlu.

g. Rapat Panitia Musyawarah

Rapat panitia musyawarah adalah rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua panitia musyawarah.

h. Rapat Panitia Anggaran

Rapat panitia anggaran adalah rapat panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua panitia anggaran.

i. Rapat Kerja

Rapat kerja adalah rapat antara DPRD/panitia anggaran, komisi, gabungan komisi dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

j. Rapat Panitia Khusus

Rapat panitia khusus adalah rapat panitia khusus yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua panitia khusus.

k. Rapat Dengar Pendapat

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara DPRD, komisi, gabungan komisi, dan badan organisasi kemasyarakatan.

l. Waktu-waktu Rapat DPRD

Tabel 2.5
Waktu Rapat Anggota DPRD

Waktu Rapat	Siang	Malam
➤ Senin-Kamis	09.00-14.00	19.00-22.00
➤ Jumat	08.30-11.30	19.00-22.00
➤ Sabtu	08.30-13.00	19.00-22.00

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

2.3 Pola Hubungan DPRD Kabupaten/Kota

2.3.1 Pola hubungan eksternal

a. Hubungan terhadap masyarakat

- 1) Pelayanan aspirasi baik dalam arti mudah dicapai dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
- 2) Penampungan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas anggota DPRD.

b. Hubungan terhadap Pemerintah Daerah

1) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRD, maka Gedung DPRD dan Kantor Bupati diletakkan dalam satu area kawasan pemerintah.

2) Anggota DPRD dan kepala daerah menunjukkan hubungan yang kompak dan mencerminkan fungsi hubungan tinggi dan singkat.

2.3.2 Pola hubungan internal

a. Hubungan kesekretariatan penunjang kegiatan.

b. Sidang pleno/rapat paripurna sebagai puncak segala kegiatan dalam DPRD Kabupaten.

c. Rapat komisi/panitia sebagai kegiatan penunjang.

2.4 Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Gedung DPRD Pada Kabupaten/Kota

Untuk seluruh provinsi di Indonesia dimuat dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 2 Februari 1981 No. 641/438/ PUOD yang berbunyi :

2.4.1 Mengingat masalah Gedung DPRD maupun rumah jabatan pimpinan DPRD adalah tuntutan kebutuhan otonomi daerah, maka biaya untuk keperluan pembangunan DPRD dimaksud agar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah yang bersangkutan.

2.4.2 Pembangunan Gedung DPRD maupun rumah jabatan pimpinan, agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat, serta

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebelum (Buletin Pengembangan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri RI), 1999.

2.5 Gedung DPRD Sebagai Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Legislatif

2.5.1 Batas pengertian

Pemerintah daerah adalah Bupati dan DPRD dimana Bupati di bidang eksekutif dan DPRD dibidang legislatif.

2.5.2 Motivasi DPRD

- a. Sebagai koordinasi kegiatan kelembagaan DPRD sebagai pengembangan tugas pemerintah daerah dalam bidang legislatif dan merupakan wadah koordinasi kegiatan yang meliputi resensi, persidangan dan kesekretariatan.
- b. Sebagai wadah penyalur aspirasi, DPRD merupakan penjelmaan seluruh warga daerah yang berperan menyalurkan kehendak dan aspirasi masyarakat.

2.5.3 Tuntutan perwujudan gedung DPRD

a. Dasar filsafah

Pemerintah di indonesia berazaskan pancasila berarti kekuasaan berada ditangan rakyat (*power of people*) yang disebut dalam sila keempat yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

- 1) Sistem pemerintahan indonesia di dalamnya terdapat unsur:

- a) **Perwakilan**, yakni memilih wakil-wakil untuk duduk dalam kursi DPRD dengan kepercayaan melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b) **Musyawarah**, yakni jalan yang ditempuh untuk mengambil keputusan. Hal ini dilaksanakan dengan netral dan baik tidak memihak kepada salah satu golongan.
- c) **Mufakat**, yakni keputusan berdasarkan kebulatan pendapat yang dilakukan secara kekeluargaan. Untuk mencapai mufakat ini lazim dilakukan dengan berhadapan.

2) Dalam demokrasi Pancasila juga terdapat beberapa aspek yang harus tercermin dalam wadah fisiknya, antara lain:

- a) **Formil**, yang mencerminkan bagaimana rakyat turut berpartisipasi dalam menjunjung penyelenggaraan pemerintah.
- b) **Organisasi**, yang mencerminkan perwujudan demokrasi pancasila dalam organisasi pemerintah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- c) **Semangat**, yang menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan warga negara kepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian.
- d) **Kaidah** (beraturan) pencerminan aturan yang mengikat warga negara berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan tekun dalam pengabdian.

e) **Tujuan** (terarah) yang mewujudkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara berkesejahteraan dan negara berkebudayaan.

b. Ungkapan karakteristik

Gedung DPRD sebagai bangunan pemerintah harus mempunyai karakteristik tersendiri yang tercermin dalam wadah fisiknya antara lain :

- 1) Karakteristik bangunan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat.
- 2) Karakteristik yang sesuai dengan kondisi geografis yang beriklim tropis.
- 3) Karakteristik bangunan yang mewakili unsur tradisional.
- 4) Bentuk bangunan menampakan kewibawaan suatu gedung DPRD serta menunjukan ciri dan karakter kabupaten/kota.

c. Ungkapan bentuk

- 1) Gedung DPRD sebagai wadah wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD, mempunyai ungkapan bentuk yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat.
- 2) Tuntutan bentuk sesuai fungsi:
 - a) Jika dikaitkan fungsi yang cukup terhormat sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat dengan sendirinya menampilkan bentuk harusnya tampak agung, berwibawa terhadap lingkungan.

b) Jika dikaitkan dengan lembaga eksekutif sebagai rekan kerja, maka penampilan bentuk bangunan harus mencerminkan suatu bentuk yang kompak dengan lembaga eksekutif lainnya.

c) Jika dikaitkan dengan jenis kegiatan DPRD yang terdiri dari persidangan dan kesekretariatan maka penampilan bangunan harus mencerminkan fungsi sebagai bangunan konvensi dan kesekretariatan.

3) Tuntutan ungkapan bentuk sesuai dengan falsafah.

Tuntutan ungkapan sehubungan dengan falsafah demokrasi pancasila maka dalam penampilan bentuk fisiknya harus tercermin bentuk yang netral dan seimbang (*balance*), untuk mengekspresikan unsur perwakilan dan musyawarah yang tidak memihak kepada salah satu suku atau golongan.

a) Bentuk dan penampilan yang memusat, berhadapan, untuk mengekspresikan unsur mufakat dan musyawarah.

b) Aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, maka penampilan Gedung DPRD Kabupaten/Kota harus tercermin.

c) Bentuk yang sederhana, untuk mengekspresikan kaidah-kaidah formal.

d) Bentuk yang beraturan untuk mengekspresikan aspek kaidah atau aturan bentuk yang dinamis untuk mengekspresikan aspek semangat.

e) Bentuk ruang, pola sirkulasi dan organisasi ruang yang terarah untuk mengekspresikan aspek tujuan dalam

Demokrasi Pancasila.

d. Ungkapan sifat

Gedung DPRD sebagai unsur pemerintah daerah bidang Legislatif, dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pelayanan aspirasi, tidak terlepas dari tata cara pola kehidupan bermasyarakat, menyangkut sosial, ekonomi, dan politik untuk itu dalam penampilan haruslah tercermin keterbukaan. Sifat keterbukaan yang dimaksud adalah:

- 1) Terbuka bagi masyarakat dalam melayani keberatan, dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan aspirasi.
- 2) Terbuka dalam segala yang diprogramkan dan hasil-hasil yang telah dilaksanakan untuk disebarkan kepada segenap lapisan masyarakat.
- 3) Terbuka melihat keadaan/kemelut yang terjadi dalam masyarakat kemudian disalurkan melalui forum persidangan DPRD untuk di diskusikan jalan keluarnya.

2.5.4 Pola hubungan organisasi

a. Hubungan eksternal

1) Hubungan dengan masyarakat sebagai unsur yang dilayani.

Hubungan dengan warga masyarakat dikembalikan kepada peran DPRD sebagai wadah pelayanan aspirasi dengan dasar pertimbangan mudah dicapai oleh warga masyarakat.

2) Proses penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dengan memperoleh masukan tentang persoalan atau kendala yang timbul di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian dibahas dalam rapat-rapat atau sidang pendahuluan yang pada akhirnya diplenokan untuk pengambilan keputusan pemecahan masalah.



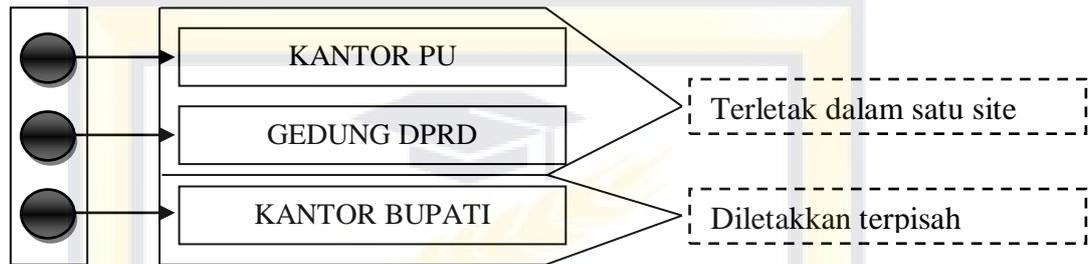
Gambar 2.3 Skema Hubungan Eksternal
(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

3) Hubungan dengan lembaga fungsional lain dengan bertitik

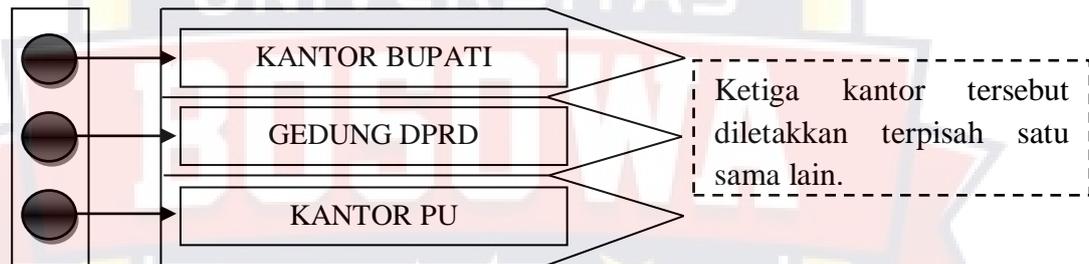
tolak dari Undang-undang RI Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang mempunyai

kedudukan sama tinggi dalam pemerintahan, maka kedudukan dalam zona kota memungkinkan beberapa alternatif sebagai berikut.

ALTERNATIF I



ALTERNATIF II

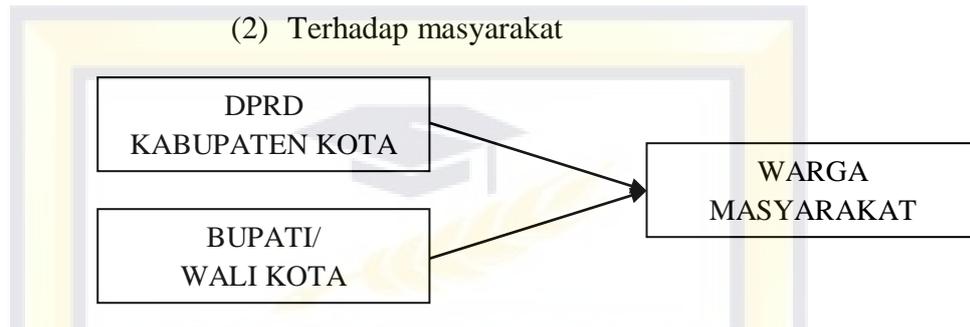


Gambar 2.4 Alternatif Skema *Lay Out* perletakan Site Lembaga Vertikal Pemerintah (Sumber : Bagus, 2013)

- 4) Hubungan dengan lembaga eksekutif
 - a) Hubungan kedudukan
 - (1) Ditinjau dari status hukum maka DPRD dan bupati kepala daerah mempunyai kedudukan yang sama tinggi.



Gambar 2.5 Skema Kedudukan DPRD
(Simber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)



Gambar 2.6 Hubungan Kedudukan DPRD
(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

5) Hubungan kedudukan dengan unsur-unsur terkait

Dari matriks di atas diketahui hubungan antara unsur legislatif dan eksekutif.

b. Hubungan Internal

1) Hubungan kedudukan ruang-ruang

Ruang sidang/pleno paripurna merupakan puncak semua kegiatan yang didukung oleh sidang komisi, sedangkan kegiatan administrasi dan sekretariat mendukung semua kegiatan yang ada.



**Gambar 2.7 Hubungan Ruang Rapat DPRD
(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)**

2) Hubungan kegiatan

- a) Semua kegiatan yang berlangsung didalam DPRD berorientasi ke ruang sidang pleno/paripurna.
- b) Kegiatan DPRD berorientasi kepada kebijaksanaan pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagai penentu kebijaksanaan.

2.5.5 Tujuan spesifik tata sidang

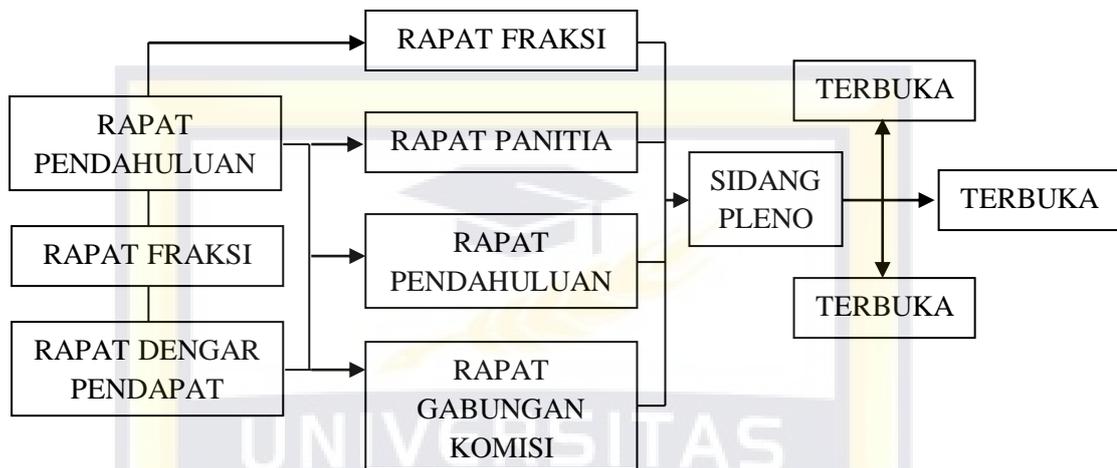
a. Spesifikasi kegiatan dalam DPRD

- 1) Kegiatan utama dalam DPRD adalah persidangan yang didukung oleh kegiatan kesekretariatan dan administrasi.
- 2) Macam sidang dan rapat

Sidang-sidang atau rapat-rapat dalam DPRD dalah:

- a) Sidang pleno/peripurna
- b) Rapat komisi
- c) Rapat fraksi
- d) Rapat kerja

- e) Rapat dengar pendapat
- f) Rapat panitia
- g) Rapat gabungan komisi



**Gambar 2.8 Gambar Skema Hubungan Ruang Rapat
(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)**

b. Falsafah ungkapan ruang

- 1) Sebagai wadah kegiatan utama lembaga legislatif maka falsafah ruangnya harus berdasarkan unsur musyawarah untuk mufakat yang biasa dilakukan dengan orientasi peserta memusat ke pimpinan sidang
- 2) Kegiatan penentuan/pengesahan peraturan daerah yang harus dijalankan dan ditaati oleh warga masyarakat. Untuk itu ungkapan falsafah ruang menurut sifatnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sifat formil

Sifat formil dalam ruang diungkapkan dalam bentuk tata ruang yang netral.

b) Sifat anggun dan wibawa

(1) Diungkapkan dengan bentuk simetris dengan sumbu
(*imajine*) yang kuat

(2) Dengan *lay out furniture* yang memusat ke pimpinan
sidang

(3) Ketinggian lantai atau meja pada area pimpinan
sidang

(4) Mengambil ruang sidang yang lebih besar (lebih
besar dari standar) untuk mendapatkan kesan wibawa
ruang.



Gambar 2.9 Ruang Rapat Paripurna DPRD
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015)

c. Kedudukan ruang

Puncak dari semua kegiatan adalah sidang pleno/paripurna, jadi ruang sidang pleno/paripurna, kedudukan lebih tinggi dari ruang-ruang yang ada di gedung DPRD.

2.6 Studi Banding Gedung DPRD

Sebagai bahan pembandingan dan literatur dalam penulisan, dilakukan studi literatur mengenai gedung DPRD yang ada di Indonesia. Dalam studi banding yang dilakukan tidak berdasarkan kepada pertimbangan fasilitas maupun klasifikasi ruang yang dimiliki, tetapi lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah tentang pembangunan gedung DPRD.

2.6.1 Gedung DPRD Kota Ambon



**Gambar 2.10 : Gedung DPRD Kota Ambon
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015)**

Maluku atau yang dikenal secara internasional sebagai Moluccas dan Molukken adalah provinsi tertua yang ada di Indonesia. Ibukota Maluku adalah Ambon yang bergelar atau memiliki julukan sebagai Ambon Manise. Kota Ambon berdiri di bagian selatan dari Pulau Ambon yaitu di Jazirah Leitimur. Ada wacana bahwa Kota Ambon Manise sudah semakin padat dan tidak lagi layak untuk menampung jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun meningkat tajam yang merupakan Ibukota Provinsi akan menjadi kota biasa

karena ibu kota direncanakan pindah ke negeri Makariki di Kabupaten Maluku Tengah.

Jumlah penduduk provinsi tahun 2010 dalam hasil sensus berjumlah 1.533.506 jiwa. Maluku terletak di Indonesia Bagian Timur.

Berbatasan langsung dengan Maluku Utara dan Papua Barat di sebelah Utara dengan Laut Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, di sebelah Barat dengan Laut Banda, Timor Leste, dan Nusa Tenggara Timur, di sebelah Selatan dengan Laut Aru dan Papua di sebelah timur.

2.6.2 Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat



Gambar 2.11 : Gedung DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seram_Bagian_Barat, 2015)

Kabupaten Seram Bagian Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku dengan luas daerah 84,181 km² yang terdiri dari 79,005 km² lautan dan 5,176 km² daratan (6,15%), dengan garis pantai 719.20 km². Daerah ini terletak diantara 20.55-30.30' Lintang Selatan dan 1270-550 Bujur Timur. Perbatasan Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Utara dengan Laut Seram, di sebelah Selatan dengan Laut Banda, di sebelah Timur dengan Kabupaten Maluku Tengah dan di sebelah barat dengan Laut Buru.

Pusat administrasi dari Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Piru. Nama asli Piru adalah “Hatu Telu” yang berarti tiga batu. Selama masa kolonial Piru menjadi pusat militer Belanda di seluruh Pulau Seram. Selama abad ke-17, Seram Bagian Barat khususnya Huamual menjadi terkenal karena kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas 11 kecamatan, yaitu Kairatu, Seram Barat, Taniwel, Huamual Belakang (Waesala), Amalatu, Inamosol, Kairatu Barat, Huamual, Kepulauan Manipa, Taniwel Timur dan Elpaputih.

2.6.3 Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 2.12 : Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tengah
(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah, 2015)

Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Ibukota Kabupaten terletak di Masohi. Sebagian wilayah berada di Pulau Seram (Kecamatan Amahai dan Tehoru. Ada dua kecamatan yang terletak di Pulau Ambon (Kecamatan Leihitu dan Salahutu), dan sisanya adalah pulau-pulau di sekitarnya. Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N.

No. 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957, tentang pokok-pokok pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dibentuk daerah-daerah "Swatantra" diantaranya daerah Swatantra Tingkat I Maluku dengan undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 (LN. No. 79/1957) yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 20 Tahun 1958 (L.N. No. 60/1958).

Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 maka dibentuk pula daerah-daerah Swatantra Tingkat II, sehingga dibentuklah daerah Swatantra Tingkat II di Maluku dengan undang-undang darurat No. 23 tahun 1957 (L.N. No. 80/1957), yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 (L.N. No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon. Wilayah-Wilayah yang termasuk dalam daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah adalah : Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau-Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram, Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 Tahun 1952 tersebut.

2.6.4 Gedung DPRD Kabupaten Buru



Gambar 2.13 : Gedung DPRD Kab. Buru (Namlea)
(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Namlea,_Buru, 2015)

Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Ibukota Kabupaten Buru terletak di Namlea dengan luas wilayah 951,15 km², Perbatasan Kabupaten Buru adalah sebelah Utaran dengan Laut Seram, Selatan dengan Selat Manipa, Barat dengan Teluk Kayeli dan Dusun Batu Boy sedangkan sebelah Timur dengan Selat Manipa. Wilayah Kabupaten Buru didominasi dataran rendah yang berasosiasi dengan daerah pantai serta perbukitan yang menempati bagian barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 400 meter. Selain itu terdapat juga bukit di bagian selatan dan barat Kabupaten Buru dengan ketinggian sekitar kurang dari 100 meter. Kondisi perbukitan sebagian besar tidak tertutupi vegetasi dengan kondisi batuan agak lapuk sehingga di beberapa tempat bisa mengakibatkan longsor.

2.6.5 Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara



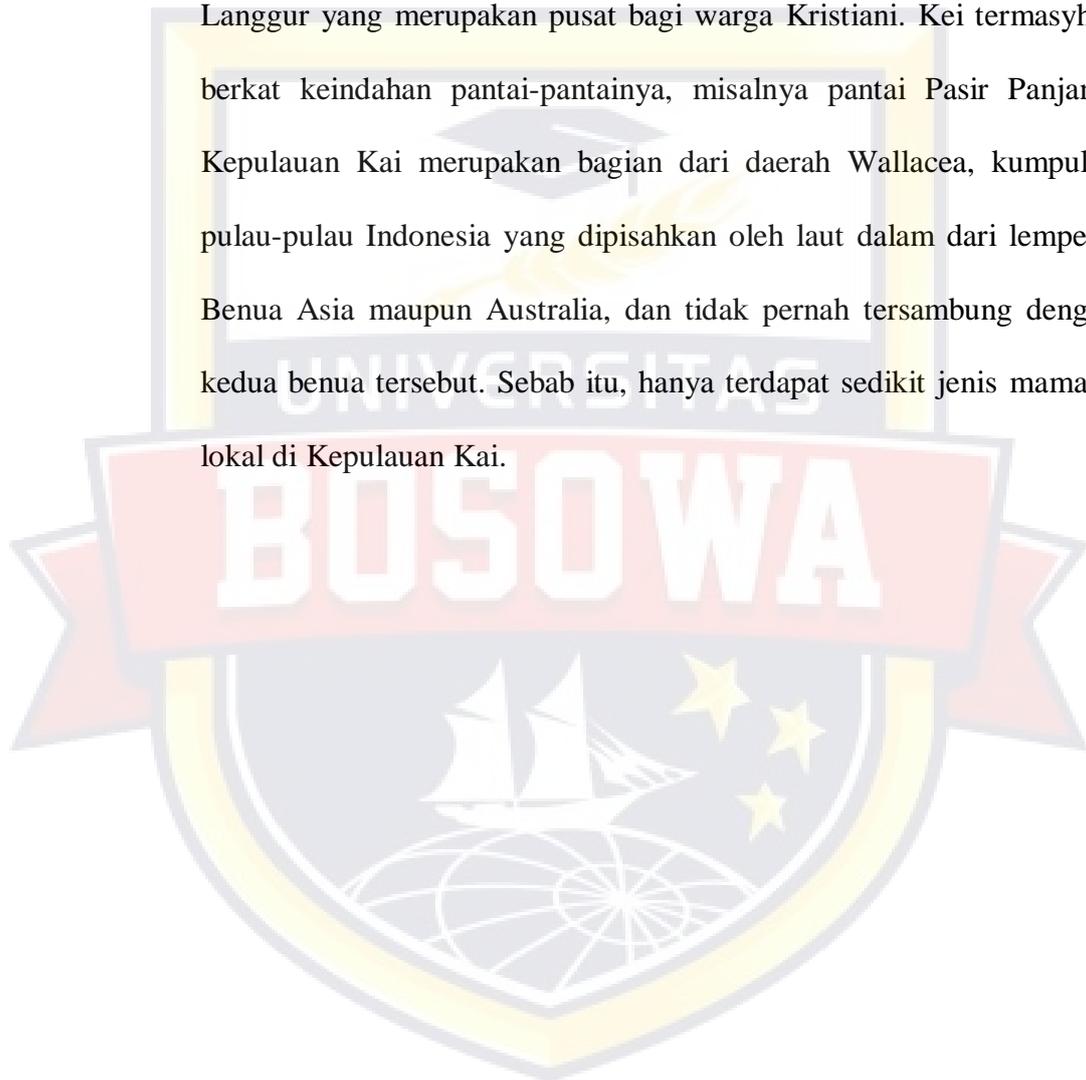
Gambar 2.14 : Gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kei, 2015)

Kepulauan Kai (atau Kei) berada di bagian tenggara Kepulauan Maluku, termasuk dalam Provinsi Maluku. Terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para pendiri kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku. Setelah Pemekaran Kota Tual tahun 2008 sebagai Kota Administratif, maka Pulau Dullah, Pulau Kuur, Pulau Taam dan tayando menjadi daerah Kota Tual, sedangkan Pulau Kei Kecil, Kei Besar, Tanimbar kei menjadi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Induk dengan Ibukota Kabupaten Langgur (Terletak di pulau kei kecil). Sejak 1 Januari 2010 Pusat pemerintah kabupaten maluku tenggara resmi berada di langgur walaupun penyerahan aset kabupaten ke pemerintah kota tual baru dilaksanakan tanggal 23 januari 2010.

Selain itu masih terdapat sejumlah pulau kecil tak berpenghuni. Total luas area daratan Kepulauan Kai adalah 1438 km². Kei Besar

bergunung dan berhutan lebat. Kei Kecil datar dan memiliki populasi terbanyak. Pulau ini sebenarnya merupakan sebuah pulau koral yang terangkat ke permukaan laut. Ibukota kepulauan ini adalah Kota Tual, yang mayoritas warganya beragama Islam. Tak jauh dari Tual terletak

Langgur yang merupakan pusat bagi warga Kristiani. Kei termasyhur berkat keindahan pantai-pantainya, misalnya pantai Pasir Panjang. Kepulauan Kai merupakan bagian dari daerah Wallacea, kumpulan pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh laut dalam dari lempeng Benua Asia maupun Australia, dan tidak pernah tersambung dengan kedua benua tersebut. Sebab itu, hanya terdapat sedikit jenis mamalia lokal di Kepulauan Kai.



BAB III
TINJAUAN UMUM GEDUNG DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT

3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Banggai Laut

3.1.1 Letak geografis

Secara Geografis Banggai Laut terletak di antara 1°26'0" Lintang selatan sampai dengan 2° 18' Lintang Selatan dan 123 °0'0 Bujur timur sampai dengan 124°20'0 bujur timur di jazirah timur laut pulau Sulawesi. Sebagai daerah di Kepulauan kabupaten banggai Laut terdiri dari gugusan pulau-pulau yaitu terdiri dari 4 pulau sedang dan 286 pulau kecil. Berdasarkan letak geografis dan peta kabupaten banggai laut, memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Maluku, selat kalumbatan dan selat bangkurung.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut banda.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tolo.

3.1.2 Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Banggai Laut 2,448,79 km², ditinjau dari luas menurut Kepulauan, maka wilayah terluas adalah Pulau Peling (2,340 km²), Pulau Banggai(268 km²), Pulau Bangkurung(145 km²), Pulau Bokan Kepulauan (84 km²), dan yang terkecil adalah Pulau labobo (80 km²).

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banggai	Lompio	86,95 Km ²
2	Banggai Tengah	Adean	68,19 Km ²
3	Banggai Selatan	Matanga	81,2 Km ²
4	Banggai Utara	Lokotoy	58,05Km ²
5	Bangkurung	Lantibung	85,65Km ²
6	Bokan Kepulauan	Bungin	229,08Km ²
7	Labobo	Mansalean	85,65Km ²
Total			

(Sumber: Kecamatan dalam Angka, BPS Kabupaten Banggai Laut, 2013)

3.1.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2009-2013 adalah 63,127 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,63%. Untuk proyeksi hingga 10 tahun mendatang tahun 2025.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Bangkurung	4,425	4,393	8,818
Labobo	2,771	2,725	5,496
Banggai Utara	3,306	3,306	6,517
Banggai	11,730	11,484	23,214
Banggai Tengah	3,586	3,679	7,256
Banggai Selatan	2,800	2,711	5,511
Bokan Kepulauan	6,385	6,308	12,693
Jumlah Penduduk			69 514

(Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Untuk menghitung proyeksi penduduk tahun 2035 dipakai rumus geometri:

$$P_t = P_o \cdot (1 + R)^n.$$

P_t = Jumlah penduduk tahun proyeksi.

P_o = Jumlah penduduk tahun dasar.

R = Prosentase pertumbuhan penduduk.

N = Jumlah tahun proyeksi.

Maka dipakai.

$$\begin{aligned} P_o &= 281.690 \cdot (1+3,63\%)^{10} \\ &= 402.370 \text{ jiwa.} \end{aligned}$$

3.1.4 Iklim

iklim di daerah ini pada umumnya dipengaruhi oleh angin muson yang berlangsung pada bulan juli sampai dengan september, musim kemarau terjadi sampai dengan bulan september dan musim penghujan terjadi pada bulan september sampai dengan november. Berdasarkan pendekatan tipe iklim Oldeman maka tipe iklim untuk Banggai Laut termasuk dalam tipe B1 (9 bulan basah berturut-turut dan lebih kecil 2 bulan kering). Suhu udara di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jarak dari garis pantai. Secara umum, suhu udara berkisar antara 26,8 – 29,4 °C. Pada tahun 2013 suhu udara rata-rata yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bubung di Luwuk berkisar antara 28,2°C sampai 31,2°C. Suhu udara maksimum terjadi di bulan Januari, yaitu sebesar 33,1°C.

Sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan Juli dan Desember, yaitu sebesar 24°C. Rata-rata kelembaban udara relatif pada Stasiun Meteorologi Bubung pada tahun 2013 berkisar antara 65% (Oktober) dan 78% (April). Pada tahun 2013 tekanan udara rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bubung berkisar antara 1.006,7 mb sampai 1.012,4 mb. Tekanan udara maksimum terjadi di bulan Maret, yaitu sebesar 1.014,5 mb. Sedangkan tekanan udara minimum terjadi di bulan April, yaitu sebesar 1.000,5 mb. Rata-rata kecepatan angin pada Stasiun Meteorologi Bubung pada tahun 2013 berkisar antara 4 knot dan 7 knot. Rata-rata jumlah curah hujan di Stasiun Meteorologi Bubung selama tahun 2013 berkisar antara 33 mm (Januari) dan 177,7 mm (Juli). Sedangkan jumlah hujan selama tahun 2013 berkisar antara 8 hari (September) dan 25 hari (Juli).

Kabupaten Banggai Laut secara keseluruhan tersusun atas beberapa jenis tanah. Untuk lebih memperjelas kondisi tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa struktur tanah sangat mempengaruhi keberadaan vegetasi suatu wilayah, atau dengan kata lain dapat diidentifikasi berdasarkan jenis vegetasi yang hidup pada wilayah ini. Mengingat, kontur wilayah merupakan indikasi tekstur ketinggian wilayah yang mempunyai tingkat ketepatan dalam menentukan jenis vegetasi, maka hingga saat ini, karakteristik tanah yang ditemukan di wilayah Banggai Laut dapat ditunjukkan dari beberapa jenis tanah antara lain:

- a. Tanah Regosol (*Psammets*) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam.
- b. Tanah Aluvial (*Fluvents*), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang.
- c. Tanah Gleisol (*Aquents/Aquepts*), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk.
- d. Tanah Litosol (*Lithick orthents*), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan.
- e. Tanah Rensina (*Rendolls*), dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik.
- f. Tanah Kambisol (*Tropepts*), dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar.
- g. Tanah Brunizem (*Udalfs*), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus.
- h. Tanah Podsolik (*Udults*), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.

3.2 Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut Sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Aspirasi Rakyat

3.2.1 Latar belakang

- a. Sejarah pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut

Kabupaten Banggai Laut adalah salah satu provinsi di Sulawesi tengah, Indonesia. Banggai Laut Merupakan Hasil Pemekaran dari

Kabupaten Banggai Kepulauan yang di sahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 desember 2012 di Gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah otonom baru

- b. Dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Februari 2008 No. 64/430/PPUD, mengenai pengadaan Gedung DPRD dan rumah jabatan pimpinan DPRD ditanggung oleh pemerintah masing-masing, maka untuk Kabupaten Banggai Laut sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut itu sendiri.
- c. Wujud bentuk bangunan harus dapat menterjemahkan aspirasi masyarakat dalam bentuk bangunan pemerintah yang mewakili daerah setempat.
- d. Untuk dapat menunjang kualitas ruang yang baik untuk gedung DPRD, perlu ditunjang dengan studi pendekatan yang lebih analitik baik menyangkut aktivitas maupun persyaratan.
- e. Lokasi/tapak gedung DPRD Banggai Laut harus sesuai dengan pola pengembangan, dimana lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai zona peruntukan perkantoran pemerintahan.

3.2.2 Tujuan

Untuk mengungkapkan wadah fisik dari Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini sebuah Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut baik secara makro maupun mikro sangat dipengaruhi:

- a. Ungkapan sifat/karakteristik pelayanannya

- b. Unsur spesifikasi yang mencakup pelaku kegiatan, macam kegiatan serta pengadaan fasilitas.
- c. Ungkapan sifat/karakteristik pelayanannya adalah formil, anggun, monumental dan sederhana yang mencerminkan kesan terbuka menerima dan dinamis.

3.2.3 Motivasi pengadaan wadah

Motivasi pengadaan wadah Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut dimaksud untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan akan wadah penyaluran aspirasi yang sifatnya formil sehingga apa yang dikehendaki oleh rakyat banyak dapat disalurkan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya.
- b. Sebagai sarana yang dapat mengkoordinasikan kegiatan kelembagaan sebagai pemegang Legislatif tertinggi daerah.

3.2.4 Fungsi dan peran

Adapun fungsi dari Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah khususnya dalam bidang legislatif. Sedangkan peranannya adalah mengamalkan serta menjalankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan/kaidah hukum yang berlaku.

3.3 Gedung DPRD Dalam Sistem Pemerintahan

Gedung DPRD dalam sistem pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan di Indonesia secara sistematis, namun telah ada pembagian tugas yang jelas yaitu, DPRD dalam bidang legislatif dan kepala daerah dalam bidang eksekutif.
2. DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah mempunyai tugas, hak dan kewajiban dalam terlaksananya pemerintah di tingkat daerah.
3. Kabupaten Banggai Laut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki lembaga legislatif berupa DPRD Kabupaten Banggai Laut untuk bersama dengan kepala daerah mengelola dan menjalankan pemerintahan di daerah.
4. Suatu bangunan DPRD haruslah dapat mewakili sifat dan karakteristik fungsi DPRD itu sendiri, sehingga bangunan yang ada dapat mencerminkan fungsinya.
5. Pada umumnya di kabupaten, Gedung DPRD yang sudah ada tidak representatif lagi untuk menampung kegiatan di dalamnya serta tempat menyalurkan aspirasi rakyat.
6. Khususnya di Kabupaten Banggai Laut, Gedung DPRD yang ada sekarang ini, belum memenuhi syarat sebagai suatu bangunan tempat wakil rakyat menerima aspirasi masyarakat baik dari fisik maupun letak bangunan.
7. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan baru gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut yang representatif.

3.4 Bentuk dan Tampilan Gedung DPRD

3.4.1 Bentuk dasar gedung DPRD

Pemilihan bentuk dasar pada gedung DPR dipertimbangkan terhadap:

- a. Fungsi dari bangunan komersil serta kebutuhan dari masing-masing kegiatan yang ditampung.
- b. Kondisi dan bentuk tapak
- c. Efisiensi *environment*
- d. Integritas dan bentuk lingkungan

Pendekatan bentuk dasar terhadap bentuk tapak tidak terlepas pada daerah setempat, sehingga bentuk dasar bangunan akan cenderung mengikuti bentuk tapak, dalam hal ini adalah bentuk persegi. Selain itu faktor lingkungan sekitar site yang bentuk dasarnya kotak-kotak akan mempengaruhi perencanaan dari bentuk bangunan ini. Sehingga bentuk dasar bangunan yang mencerminkan sifat dan keadaan lokasi dari kegiatan ditampung, yaitu bentuk geometri segi empat dipadukan dengan bentuk lingkungan sebagai wujud bentuk dinamis. Dalam perencanaan bangunan ini perubahan atau modifikasi dari bentuk dasar akan dikembangkan untuk memberi nilai estetika dan aksen pada bangunan

3.4.2 Tampilan gedung DPRD

- a. Gedung DPRD Kabupaten Buru Selatan merupakan wadah dan sarana bagi kegiatan perwakilan rakyat dan administrasi DPRD itu sendiri.

b. Sifat dan karakter Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut dipengaruhi oleh sifat dan kegiatan yang terjadi yaitu:

- 1) Formal.
- 2) Dinamis.
- 3) Wibawa.
- 4) Terorganisir.
- 5) Terarah.
- 6) Seimbang.

c. Jenis kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan pokok/utama.
- 2) Kegiatan pendukung.
- 3) Kegiatan pelayanan.
- 4) Kegiatan servis.

d. Sedangkan pola kedudukan masyarakat sebagai unsur yang mendapat perwakilan.

- 1) Kedudukan terhadap masyarakat sebagai unsur yang mendapat perwakilan.
- 2) Kedudukan terhadap lembaga pertahanan.
- 3) Kedudukan terhadap pemerintah provinsi.
- 4) Kedudukan terhadap hubungan internal

e. Tuntutan sifat dan karakteristik bangunan Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut ini harus mencerminkan sifat keterbukaan namun tetap anggun, berwibawa, dan disiplin. Sedangkan karakteristiknya harus sesuai dengan iklim dan

topografi Kabupaten Banggai Laut, memiliki ciri bangunan setempat serta harus sesuai dengan kedudukan kota.

f. Tuntutan perwujudan bentuk antara lain:

1) Ungkapan bentuk harus sesuai dengan fungsinya yakni bentuk anggun, berwibawa bagi lingkungannya.

2) Bentuk mencerminkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya demokrasi pancasila.

3) Bentuk yang mencerminkan fungsi sebagai bangunan konvensi dan kesekretariatan.

4) Bentuk mencerminkan demokrasi dan nuansa budaya arsitektur Kabupaten Banggai Laut.

3.5 Aktifitas Yang Terjadi Pada Gedung DPRD

3.5.1 Aktifitas pokok (utama)

Merupakan puncak kegiatan DPRD adalah sidang pleno, paripurna yang dapat dilakukan dengan:

a. Sidang pleno/paripurna tertutup (*interen*), hanya dihadiri oleh anggota dewan saja.

b. Sidang pleno/paripurna terbuka dan dihadiri oleh:

1) Anggota dewan hasil pemilihan.

2) Tamu sidang yang terdiri dari:

a) Semua pejabat yang terkait didaerah tersebut.

b) Lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

c) Undangan lainnya.

- 3) Staf kesekretariat 3 orang.
- 4) Peninjau sidang terdiri dari:
 - a) Unsur masa media elektronik 3 orang.
 - b) Unsur masa media cetak 5 orang.

3.5.2 Aktifitas pendukung

Aktifitas pendukung utama dalam gedung DPRD adalah persidangan dan rapat-rapat kegiatan itu adalah:

- a. Rapat fraksi sesuai dengan jumlah fraksi-fraksi DPRD kabupaten setempat.
- b. Rapat komisi yang terdiri dari komisi A, B dan C.
- c. Rapat gabungan komisi.
- d. Rapat musyawarah.
- e. Rapat panitia anggaran dan panitia khusus.
- f. Rapat pimpinan DPRD.
- g. Rapat kerja.
- h. Rapat dengar pendapat.

3.5.3 Aktifitas pelayanan

Yang berperan melayani semua aktivitas persidangan adalah sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris DPRD. Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banggai Laut diatur dalam struktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut tahun 2008 terdiri dari.

- a. Bagian umum (10 orang) yang terdiri dari:
 - 1) Sub bagian akuntan.
 - 2) Sub bagian kesejahteraan.

- b. Bagian persidangan dan risalah (8 orang) yang terdiri dari:
 - 1) Sub bagian rapat.
 - 2) Sub bagian perpustakaan.
- c. Bagian keuangan dan kepegawaian (6 orang) yang terdiri dari:
 - 1) Sub bagian pembiayaan dan pembukuan.
 - 2) Sub bagian kepegawaian.

3.5.4 Aktifitas servis

Adalah kegiatan yang memberikan pelayanan servis kepada kegiatan-kegiatan yang lain dalam kelembagaan DPRD, disamping juga berorientasi kepada masyarakat/warga daerah.

3.6 Ungkapan Spesifik Tata Fisik

3.5.1 Kebutuhan ruang

- a. Ruang sidang pleno/paripurna, terdiri dari fasilitas:
 - 1) Ruang sidang paripurna.
 - 2) Lobbi anggota untuk duduk rapat-rapat, serta saat sidang di skors.
- b. Ruang rapat komisi:
 - 1) Ruang rapat komisi A.
 - 2) Ruang rapat komisi B.
 - 3) Ruang rapat komisi C.
- c. Ruang rapat fraksi.
- d. Ruang rapat gabungan fraksi.

- e. Ruang sekretariat, terdiri dari:
- 1) Ruang ketua DPRD.
 - 2) Ruang wakil ketua DPRD.
 - 3) Ruang sekretaris.
 - 4) Ruang bagian tata usaha, terdiri dari:
 - a) Ruang umum dan perlengkapan.
 - b) Ruang humas dan protokoler.
 - 5) Ruang bagian persidangan dan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a) Ruang urusan persidangan.
 - b) Ruang bagian perundang-undangan.
 - c) Ruang perpustakaan.
 - 6) Ruang bagian keuangan dan kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Ruang urusan pembiayaan dan pembukuan.
 - b) Ruang urusan kepegawaian.
 - 7) Ruang dhrama wanita.
 - 8) Ruang aspirasi.
 - 9) Ruang kegiatan servis.
 - a) Ruang tunggu/hall.
 - b) Ruang data gedung DPRD kabupaten setempat.
 - c) Ruang kantin.
 - d) Ruang istirahat pengemudi.
 - e) Ruang penjaga.
 - f) Ruang mekanikal dan elektrik.

- g) Ruang operator.
- h) Ruang inventaris.
- i) Lavatori.
- j) Lapangan upacara.
- k) Taman.

3.5.2 Organisasi ruang

Organisasi ruang erat kaitannya dengan pengelompokan ruang dan sifat kegiatan:

a. Pengelompokan aktifitas, terbagi atas:

- 1) Aktifitas persidangan.
- 2) Aktifitas sekretariat/ administrasi.
- 3) Aktifitas servis/penunjang.

b. Sifat kegiatan terbagi atas:

- 1) Sifat umum.
- 2) Sifat privasi
- 3) Sifat *service*.

3.5.3 Sistem sirkulasi

Sitem sirkulasi sangat erat dengan pola penempatan aktivitas dan penggunaan bangunan serta ruang, sehingga merupakan pergerakan dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Pengaturan sirkulasi pada perkantoran, dengan pola yang ada yaitu pola satu arah, dengan maksud untuk kemudahan dan kelancaran kerja.



BAB IV
PENDEKATAN PERANCANGAN
GEDUNG DPRD KABUPATEN BANGGAI LAUT

4.1 Program Tata Ruang Makro

4.1.1 Hasil perencanaan

Pendekatan ke arah dasar penentu perencanaan ini dimaksudkan sebagai langkah untuk transformasi kearah ungkapan fisik perencanaan. Hal ini merupakan upaya untuk memecahkan masalah bagi tuntutan perwujudan fisiknya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

a. Tiitk tolak perencanaan makro sebagai langkah penyelesaian terhadap lokasi atau tata fisik makro, yaitu tata massa dan tata ruang luarnya.

b. Titik tolak perencanaan mikro sebagai langkah penyelesaian dalam menyusun program ruang untuk :

- 1) Kebutuhan ruang berdasarkan fungsi dan kegiatan yang terjadi serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 2) Besaran ruang yang terjadi berdasarkan kualifikasi dan jumlah pelaku dan dimensi ruangan, dimensi gerak, sirkulasi pelaku kegiatan dan sistem peruangan.
- 3) Pola pengelompokan ruang dan organisasi ruang.
- 4) Bentuk dan penampilan bangunan berdasarkan fungsi bangunan.
- 5) Sistem struktur dan material.

4.1.2 Penentuan lokasi dan site/tapak

a. Lokasi

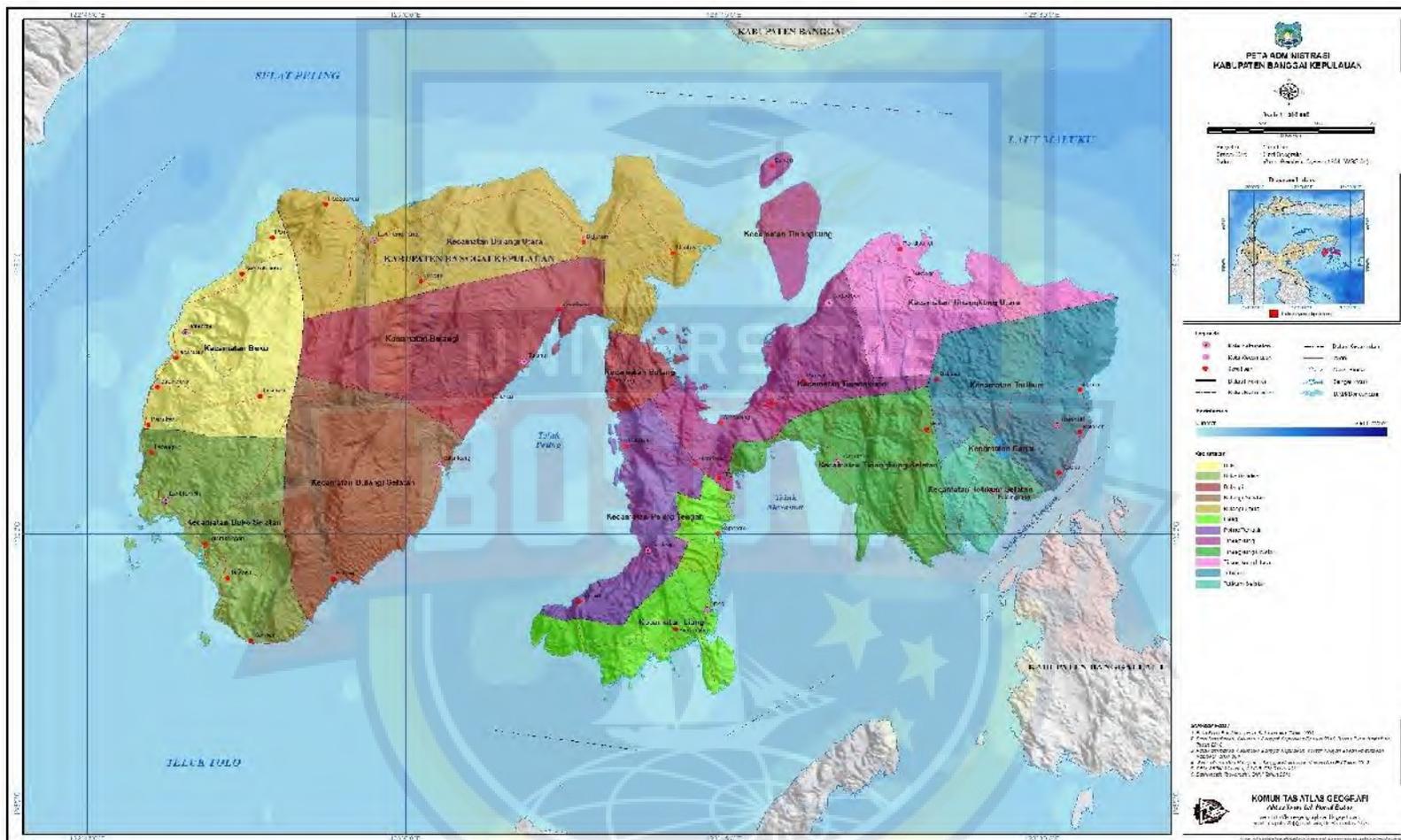
Penentuan lokasi merupakan acuan dalam mengadakan berbagai hal pertimbangan dalam perencanaan Gedung DPRD guna memenuhi kebutuhan pelaku kegiatan. Dalam menentukan lokasi harus disesuaikan dengan fungsi sebagai area kawasan pusat pemerintahan yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Pedoman dasar ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan fungsi yang ditentukan. Sesuai dengan kebijakan kota yang telah dituangkan dalam Revisi RUTRK Kabupaten Banggai Laut.

Dasar pertimbangan penentuan lokasi

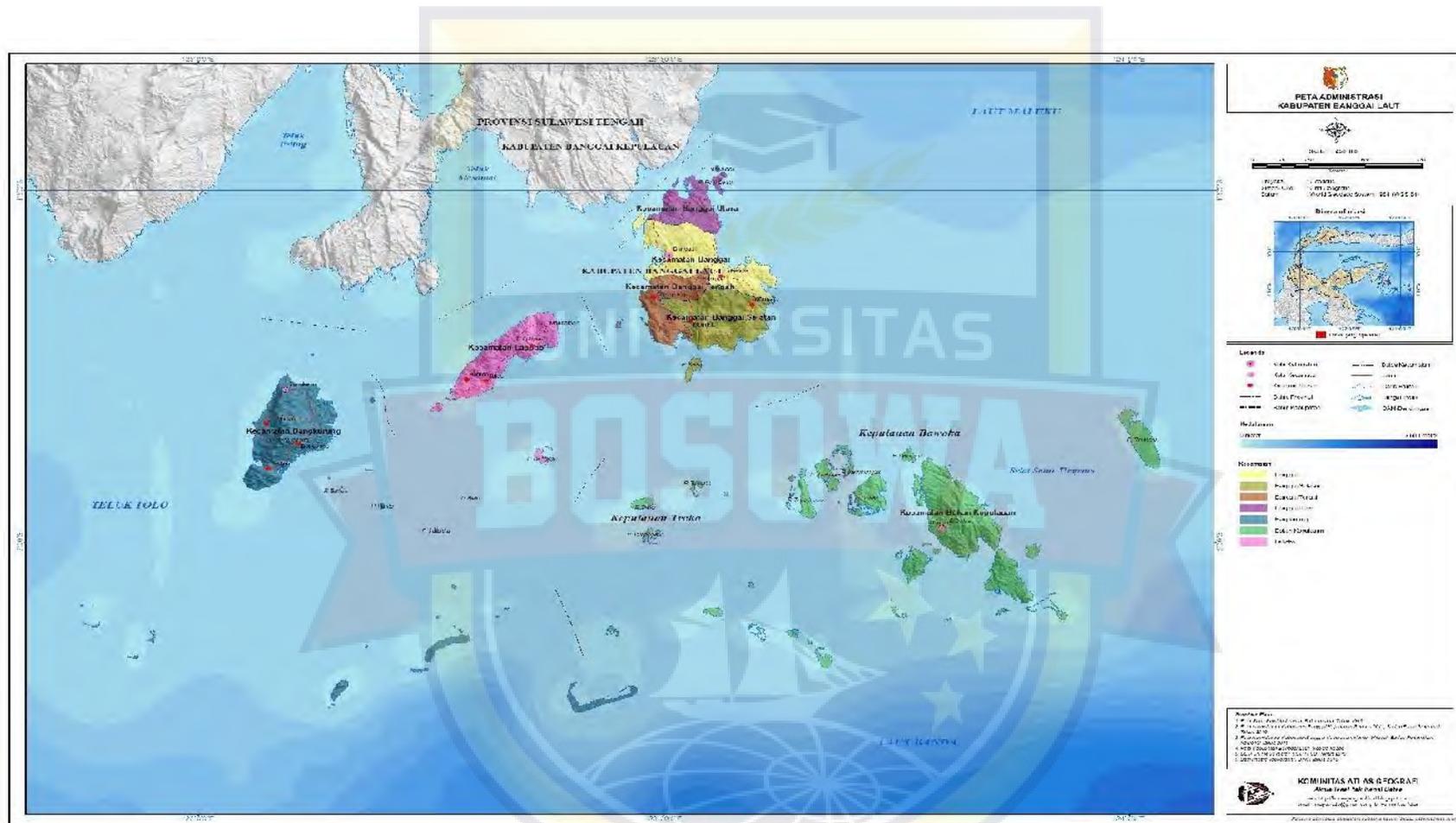
- 1) Sesuai dengan arah pengembangan kota.
- 2) Pencapaian mudah ke lokasi.
- 3) Tersedianya jaringan utilitas kota.
- 4) Topografi

Kriteria penentuan lokasi

- 1) Sesuai dengan perencanaan pengembangan wilayah perkantoran dan pusat pemerintah.
- 2) Tersedia jalur transportasi umum dan pribadi.
- 3) Tersedia jaringan utilitas kota (listrik, telepon, drainase, dan air bersih).
- 4) Kondisi tanah relatif datar, bebas banjir dan daya dukung tanah cukup baik untuk mendukung bangunan.



**Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Banggai Laut
(Sumber : Dinas BAPPEDA Kab. Banggai Laut, 2012)**



**Gambar 4.2 : Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Banggai Laut
(Sumber : Dinas BAPPEDA Kab. Banggai Laut, 2012)**

Pengembangan wilayah dan tata ruang sesuai arahan RTRW Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan pola pemanfaatan lahan darat dan laut dari potensi yang dimiliki, maka wilayah Kabupaten Banggai Laut dibagi dalam 5 (lima) sub wilayah yaitu :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Pengembangan (WP)
Kab. Banggai Laut

Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan	Fungsi Utama
WP I	Banggai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat Pemerintah dan pelayanan jasa ➤ Pusat transportasi regiona ➤ Sentral produksi pertanian tanaman pangan
WP II	Banggai Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat perdagangan, pelayanan jasa ➤ Sentral produksi kehutanan, pertanian (hortikultural) ➤ Sentral produksi perkebunan, perikanan dan wisata
WP III	Banggai Utara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentral produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan ➤ Pusat pelayanan jasa dan wisata.
WP IV	Banggai Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentra produksi pertanian, perkebunan ➤ Sentra produksi peternakan
WP V	Bokan Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentra produksi perikanan, perkebunan ➤ Sentral produksi peternakan ➤ Pusat pelayanan jasa dan wisata

(Sumber : Kabupaten Banggai Laut, 2012)

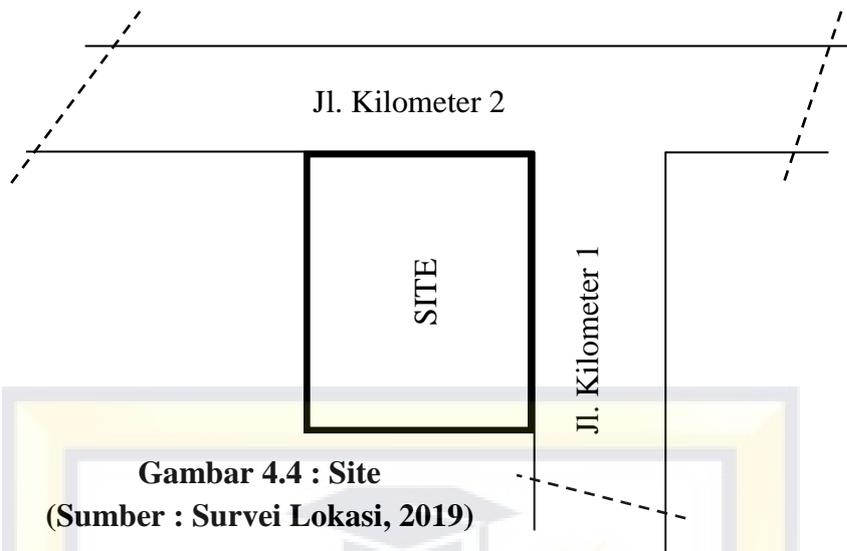


Gambar 4.3 : Lokasi
(Sumber : Survei Lokasi, 2019)

b. Penentuan site/tapak

Berdasarkan analisa *existing condition* pada lokasi, maka penentuan site dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kondisi lingkungan, diusahakan pada peruntukkan bagi fasilitas gedung pemerintahan daerah kabupaten.
- 2) Luas tapak yang tersedia $\pm 1,5$ Ha untuk pembangunan gedung DPRD.
- 3) Topografi tanah relatif datar, daya dukung tanah cukup baik untuk mendukung bangunan, sehingga memudahkan secara teknis.
- 4) Letak site/tapak berada pada jalur transportasi, jalan poros.
- 5) View yang baik menunjang penampilan bangunan.
- 6) Tersedia jaringan utilitas kota, (berupa jaringan listrik, air bersih, telepon dan drainase).



Gambar 4.4 : Site
(Sumber : Survei Lokasi, 2019)

4.1.3 Pola tata lingkungan dan analisis tapak

Berdasarkan studi literatur, persyaratan bangunan perkantoran pemerintah harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka cukup luas, dan mudah dilihat dari segala arah.
- b. Tersedianya jaringan utilitas kota.
- c. Penentuan kualitas pandangan site sesuai jenis aktifitas pemakai dengan memperhitungkan tingkat kebisingan.
- d. Adanya ruang penerimaan ke arah bangunan yang ditunjukkan bagi pemakai kendaraan dan pejalan kaki.

4.1.4 Landsekap

Dalam penataan landsekap Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut secara fungsional ditata berdasarkan :

- a. Pola penataan jalan masuk (*main entrance*).
Tujuan penataan yaitu untuk mencapai ruang hijau, indah dan menarik serta dapat mengarahkan pada ruang yang ingin dituju.
- b. Pola penataan di daerah bangunan.

Daerah sekelilingi bangunan dengan panorama yang bagus ditata dengan baik, misalnya dengan memberikan pot bunga daerah pinggir jalan ditanami dengan tanaman perdu.

c. Landsekap sebagai pohon pelindung.

Supaya terjadi kejelasan dalam batasan-batasan gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut, maka dalam penataan landsekap harus dinampakan adanya pohon-pohon tersebut antara lain:

1) Pohon penyerap kebisingan.

Polusi udara yang kemungkinan yang bersumber dari kendaraan yang melintas jalan regional penghubung, maka pinggir jalan sepanjang pagar ditanami pohon – pohon dengan pola penanaman sejajar dengan pagar.

2) Pohon pembatas juga berfungsi sebagai penyejuk yaitu ditanami sepanjang pagar, samping dan belakang bangunan.

3) Penerapan pada landsekap pada malam hari digunakan lampu merkuri.

4.1.5 Tata massa dan tampilan bangunan

a. Tata Masa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan massa bangunan adalah:

1) Lingkungan

- Penampilan bangunan disekitar site.
- Kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan disekitar site.

2) Bentuk site

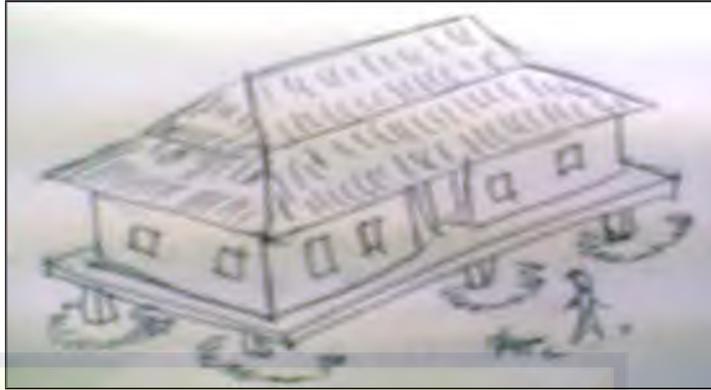
Bentuk site dipertimbangkan karena merupakan salah satu faktor penentu untuk mencapai keserasian penampilan bangunan dengan lingkungan disekitar site.

b. Penampilan Bangunan (*Building Performance*)

Ekspresi/penampilan luar bangunan pada Gedung DPRD dipengaruhi oleh:

1) Bentuk bangunan

- a) Sesuai dengan sarana pelayanan mencerminkan kesan terbuka dengan menerima pencetusnya dalam penataan tata massa bangunan dan penerimaan bidang pada entrance bangunan, dimana aspek keterbukaan, demokrasi yang menjadi ciri utama.
- b) Mencerminkan kesan monumental, kesan wibawa diungkapkan dengan perencanaan tinggi bangunan yang lebih dari skala manusia.
- c) Hasil rancangan bangunan mengikuti gaya arsitektur tradisional Banggai (Kabupaten Banggai Laut), dimana bentuk dan penampilan yang disesuaikan dengan gaya-gaya arsitekturnya, seperti bentuk atap rumah tradisional Banggai



Gambar 4.5: Bangunan Tradisional Kab. Banggai Laut

(Sumber : Mukadam, 2012)

2) Material/elemen tekstur

Material/elemen tekstur pada gedung DPRD merupakan penunjang atau pendukung penampilan luar bangunan antara lain:

- a) Tekstur alam seperti batu kali, batu pecah, batu kerikil ditata sedemikian rupa dilahan terbuka yang tidak sengaja difungsikan sebagai pelataran lahan terpakai dan lahan hijau juga sebagai pengarah yang mengikuti setapak.
- b) Tekstur buatan seperti kaca, tempelan semen, marmer dan sebagainya yang ditata sesuai dengan karakter tekstur tersebut yang menunjang penampilan bangunan gedung DPRD.

4.1.6 Pola Sirkulasi Pada Bangunan

a. Di luar bangunan

Dalam perencanaan tata lingkungan dan sirkulasi sekitarnya maka bangunan dicapai dari pusat kota dengan pemikiran bahwa jalur tersebut harus dibuat dua arah sirkulasi kendaraan yang keluar masuk pada bangunan tidak mengganggu kendaraan umum.

b. Dalam bangunan

Penyelesaian sirkulasi dalam bangunan terbagi dua yaitu:

- 1) Sirkulasi vertikal menggunakan tangga.
- 2) Sirkulasi horisontal diarahkan pada koordinat penghubung.

c. Sistem parkir

Sistem parkir kendaraan merupakan bagian yang penting dalam penunjang pada sirkulasi kendaraan sekitar bangunan. Berdasarkan area parkir yang dibutuhkan diperhitungkan berdasarkan:

- 1) Jumlah pegawai/karyawan.
- 2) Peserta sidang.
- 3) Tamu/pengunjung.

4.2 Program Tata Ruang Mikro

4.2.1 Pengelompokan dan kebutuhan ruang

a. Pengelompokan ruang

Ditinjau dari sifat karakteristik kegiatan yang ada, hal tersebut mendasari pengelompokan ruang secara mikro, yaitu:

- 1) Kegiatan persidangan.
- 2) Kegiatan administrasi.
- 3) Kegiatan pendukung (*service*).

b. Kebutuhan ruang

Dasar pertimbangan untuk menentukan besaran ruang adalah:

- 1) Memisahkan kelompok-kelompok kegiatan yang sesuai.
- 2) Jumlah fraksi-fraksi/peralatan yang diperlukan.

Kebutuhan fasilitas ruang dalam DPRD Kabupaten Banggai Laut.

c. Kegiatan persidangan

1) Ruang sidang pleno.

a) Fungsi:

(1) Puncak dari semua kegiatan DPRD.

(2) Digunakan pada rapat gabungan komisi.

b) Adapun fasilitas yang digunakan :

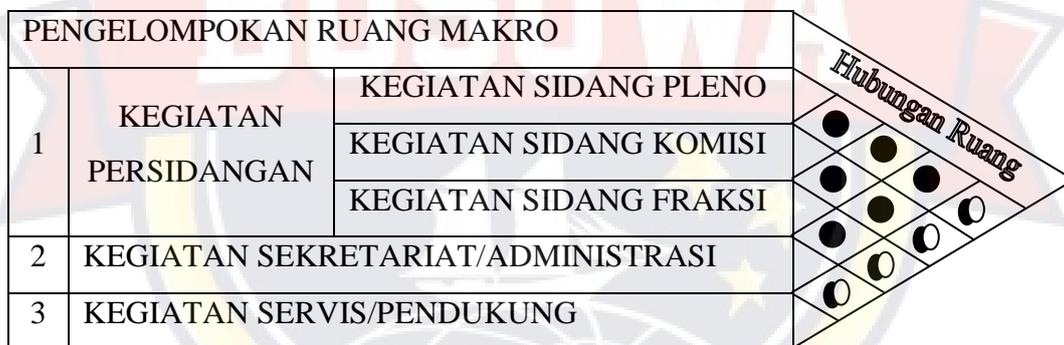
(1) Meja dan kursi.

(2) Papan hardboard dan sebagainya.

(3) Podium.

(4) White board.

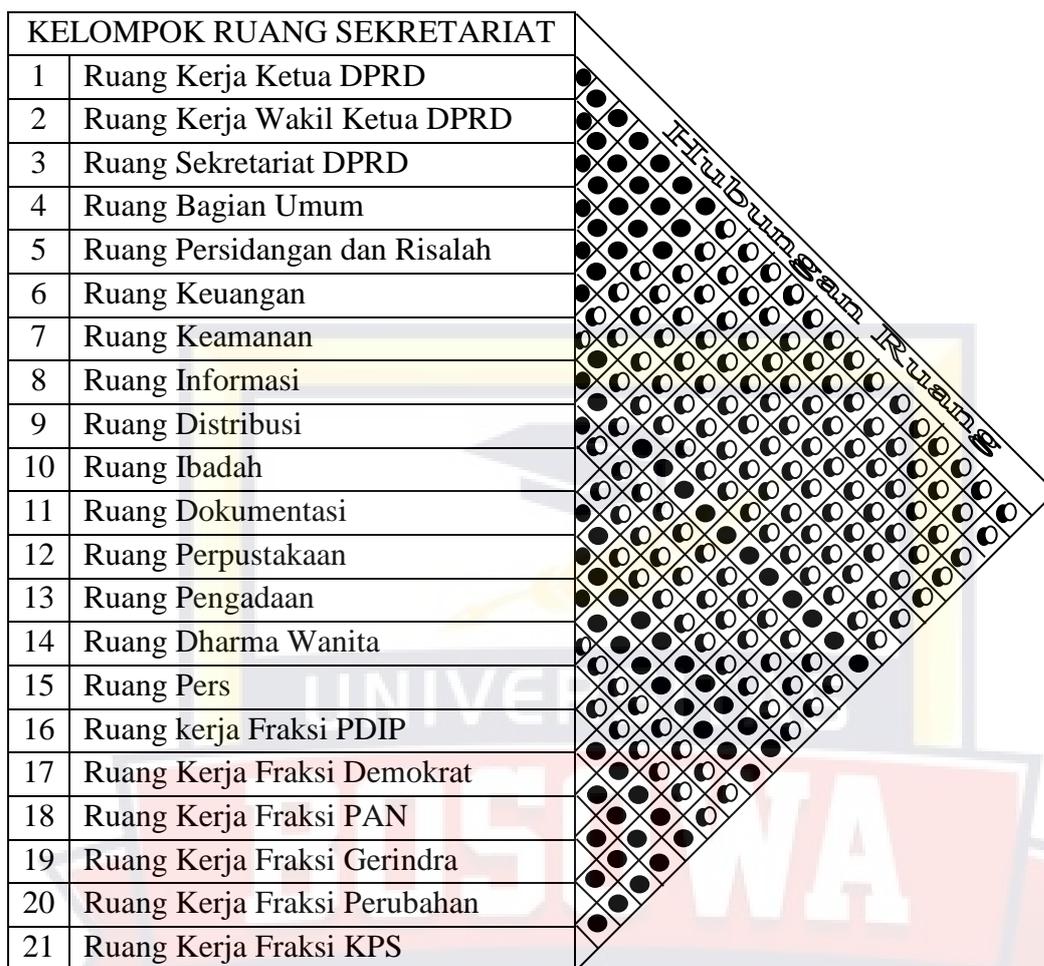
(5) Toilet.



Gambar 4.6: Pengelompokan Ruang
(Sumber: Bagus, 2013)

Keterangan:

- : Hubungan Erat
- ◐ : Hubungan Kurang Erat
- : Tidak Ada Hubungan



**Gambar 4.7: Kelompok Ruang Sekretariat
(Sumber: Bagus, 2013)**

Keterangan:

- : Hubungan Erat
- ◐ : Hubungan Kurang Erat
- : Tidak Ada Hubungan

KELOMPOK RUANG SIDANG		
1	Ruang Sidang Pleno/Paripurna	●
2	Ruang Gabungan Komisi	●
3	Ruang Rapat Panitia Anggaran	●
4	Ruang Rapat Panitia Musyawarah	●
5	Ruang Rapat Komisi A	●
6	Ruang Rapat Komisi B	●
7	Ruang Rapat Komisi C	●
8	Ruang Resepsi DPRD	●
9	Ruang Lobbi Anggota	○
10	Ruang Lobbi Fraksi	○
11	Ruang Rapat Fraksi	○

Gambar 4.8: Kelompok Ruang Sidang
(Sumber: Bagus, 2013)

Keterangan:

- : Hubungan Erat
- ◐ : Hubungan Kurang Erat
- : Tidak Ada Hubungan

- Juga dilengkapi dengan:

- Ruang resepsionis.

- Fungsi:

- Tempat menerima tamu DPRD.
- Istirahat anggota.
- Lobi anggota.

- Fungsi:

- Tempat duduk sebelum rapat dimulai.

2) Ruang rapat fraksi.

- Fungsi:

- Ruang pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, khususnya rancangan peraturan daerah.

3) Ruang rapat komisi ada 3 (tiga) terdiri dari:

a) Ruang komisi A.

b) Ruang komisi B.

c) Ruang komisi C.

Fasilitas:

a) Meja dan kursi rapat.

b) *White board*.

d. Kegiatan Sekretariat

1) Ruang Ketua DPRD

a) Fungsi:

- Ruang kerja ketua DPRD.

b) Fasilitas:

(1) Meja dan kursi kerja.

(2) Meja dan kursi tamu.

(3) Lemari dan rak buku.

(4) Toilet.

2) Ruang Wakil Ketua DPRD

a) Fungsi:

- Ruang kerja wakil ketua DPRD

b) Fasilitas:

- (1) Meja dan kursi kerja.
- (2) Meja dan kursi tamu.
- (3) Toilet.

3) Ruang Sekertaris

a) Fungsi:

- Ruang sekertaris DPRD sebagai penanggung jawab administrasi

b) Fasilitas:

- (1) Meja dan kursi kerja.
- (2) Meja dan kursi tamu.
- (3) Lemari dan rak buku.

4) Ruang Bagian Tata Usaha.

- Fungsi:

Ruang kerja bagian dan sub bagian, terdiri dari:

- Sub Bagian Angkutan.

Fasilitas:

- ✓ Meja dan kursi kerja.
- ✓ Meja informasi dan ruang pos keamanan.

- Sub Bagian Kesejahteraan.

Fasilitas:

- ✓ Ruang ibadah.
- ✓ Ruang distribusi.
- ✓ Ruang pangan.

5) Ruang Bagian Persidangan dan Risalah

- Fungsi:

Ruang kerja kepala bagian, terdiri dari:

a) Urusan rapat.

Fungsi:

Mengadakan pemuatan risalah dan rapat.

b) Perpustakaan.

Fungsi:

(1) Ruang baca.

(2) Ruang penyimpanan buku.

Fasilitas:

(1) Meja dan kursi kerja.

(2) Lemari dan rak buku.

(3) Ruang baca.

c) Pengadaan.

Fungsi:

(1) Tempat pengadaan risalah.

(2) Tempat mesin foto copi.

(3) Lemari dan rak buku.

6) Ruang Bagian Keuangan.

Merupakan ruang kerja kepala bagian dan sub bagian, terdiri dari:

a) Bagian pembiayaan.

b) Bagian keuangan

Fasilitas:

- (1) Lemari buku.
- (2) Meja dan kursi kerja.
- (3) Brankas.

7) Ruang kerja fraksi.

Merupakan ruang kerja, pelayanan dan pengaduan masyarakat

Ruang fraksi terdiri dari:

- a) Fraksi Partai demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) jumlah anggota 4 orang
- b) Fraksi Partai Demokrat jumlah anggota 3 orang.
- c) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) jumlah anggota 3 orang.
- d) Fraksi Partai Gerindra jumlah anggota 3 orang.
- e) Fraksi Perubahan anggota 4 orang, terdiri dari : Nasdem 2 orang, PKB 1 orang, Hanura 1 orang.
- f) Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (KPS), Jumlah anggota 3 orang, terdiri dari: PPP, Golkar dan PKS.

8) Ruang aspirasi.

Merupakan ruang yang diperuntukan bagi masyarakat pendemo

a) Fasilitas:

- (1) Meja dan kursi.
- (2) Lavatori pria dan wanita.

e. Kegiatan *Service* (Pendukung).

- 1) Ruang tunggu/hall, merupakan ruang tunggu, ruang penghubung dan ruang penerimaan.

Fasilitas:

- a) Meja dan kursi kerja.
- b) Lavatori pria dan wanita.

- 2) Ruang data/*multipurpose*.

Ruang yang diperhitungkan bagi warga masyarakat.

Fasilitas:

- a) Meja dan kursi kerja.
- b) Ruang staf/petugas.

- 3) Ruang *cafeteria*, dapur dan tempat cuci.

Merupakan ruang sarapan bagi anggota DPRD/staf administrasi.

Fasilitas:

- a) Meja dan kursi makan.
- b) Lemari dapur.
- c) Pantri dan dapur.
- d) Toilet.

- 4) Ruang penjaga.

a) Fungsi:

- Tempat menjaga gedung.

b) Fasilitas:

- (1) Ruang tidur.
- (2) Ruang makan.

- (3) Dapur.
- (4) Kamar mandi/WC.
- 5) Ruang istirahat pengemudi.
 - a) Fungsi.
 - Ruang istirahat pengemudi ketua DPRD dan wakil

DPRD.

- b) Fasilitas:
 - Meja dan kursi.

- 6) Lavatori pria dan wanita.

- a) Fungsi:

- Untuk pengunjung umum dan anggota DPRD/staf administrasi.

- b) Fasilitas:

- (1) Bak mandi.
- (2) Wastafel/cermin.
- (3) Urinoir.
- (4) *Closed.*

- 7) Ruang inventaria.

- a) Fungsi:

- Merupakan tempat penyimpanan inventaria gedung dan perabot.

- b) Fasilitas:

- Lemari dan rak.

8) Ruang operator.

a) Fungsi:

(1) Mengatur *sound system*.

(2) Mengatur komunikasi telepon.

(3) Fasilitas:

(1) Meja dan kursi.

(2) Lemari dan rak.

9) Ruang mekanikal.

a) Fungsi:

- Sebagai ruang mesin generator.

b) Fasilitas:

(1) Ruang mesin jaga.

(2) Mesin generator.

10) Ruang garasi mobil/motor.

- Fungsi:

- Tempat menyimpan mobil/motor.

11) Menara air reservoir.

a) Fungsi:

- Tempat penampungan air bersih untuk kompleks DPRD dan penampungan air untuk *fire hydrant*.

b) Fasilitas:

(1) *Tower*.

(2) *Reservoir*.

f. Besaran ruang/kapasitas ruang

Dasar pertimbangan:

1) Besaran ruang diproyeksikan sampai tahun 2028 yang akan datang

2) Besaran ruang ditentukan dari:

- a) Jumlah dan dimensi perabot yang digunakan.
- b) Pola gerak statis dan dinamis.
- c) Pola kegiatan memerlukan ruang dengan luas yang berbeda.
- d) Jumlah pelaku kegiatan.

3) Standar yang dinamis:

- a) Standar Neufert.
- b) Standarisasi ruang.
- c) Studi perabot.
- d) Standar Bapenas.

4) Luas masing-masing ruang dihitung berdasarkan rumus

$$L=A \times B \times C.$$

Diminta:

A = standar kebutuhan ruang setiap personal.

B = jumlah kapasitas pemakai.

C = koefisien ruang gerak dan *space*, dengan indeks 1,3 pada ruang khusus dan 1,67 pada ruang umum.

5) Perincian/macam besaran ruang sebagai berikut:

a) Ruang sidang pleno.

(1) Jumlah anggota dewan peserta sidang:

Berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 281.690 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,63% pertahun, dengan jumlah anggota dewan sebanyak 20 orang. Maka 10 tahun mendatang diproyeksikan berjumlah 402.370 jiwa. Tiap 10.000 orang pemilih mendapat 1 orang wakil, maka akan diperoleh anggota dewan sebanyak 40 orang.

(2) Peserta/peninjau sidang:

(a) Muspida = 13 orang

(b) Bag. Sekretaris = 12 orang

(c) Sek. Daerah = 2 orang

(d) BPD = 4 orang

(e) BAPEDA = 4 orang

(f) IRWILKAB = 4 orang

(g) Dinas Daerah = 15 orang

(h) Uns. Vertikal = 13 orang

(i) Undangan lain (asumsi) = 40 orang

Jumlah = 107 orang

40 anggota dewan dan 107 undangan eksklusif adalah 147 orang.

Tabel 4.2
Ruang Sidang Pleno

No	Ruangan	m ² /orang
1	Untuk standar 1 orang bersidang	2,7 m ²
2	Kapasitas ruangan	147 orang
3	2,7 x 147	396,9 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 396,9	119,07 m ²
Jumlah		515,97 m²

(Sumber : Analisis Penulis, 2015)

b) Ruang komisi.

(1) Ruang rapat komisi terdiri dari komisi A, B dan C.

Kapasitas ruang rapat komisi untuk 1 ruang rapat: 20 orang.

(a) Kapasitas anggota komisi	= 7 orang
(b) Kepala daerah dan wakil	= 2 orang
(c) Sekretaris DPRD	= 1 orang
(d) BAPEDA	= 1 orang
(e) Undangan lain	= 9 orang
Jumlah	= 20 orang

Standar 1 orang bersidang $2,7 \text{ m}^2$ (standar Bapenas)

$$20 \times 2,7 \text{ m}^2 = 54 \text{ m}^2$$

$$\text{Besaran ruang komisi} = 54 \text{ m}^2$$

Pada ruang rapat komisi terdapat ruang kerja komisi dengan standar ruang kerja untuk 1 orang $3,75 \text{ m}^2$ (standar Bapenas)

(a) Pimpinan setiap komisi	= 1 orang
(b) Wakil pimpinan	= 1 orang
(c) Anggota	= 7 orang
Jumlah	= 9 orang

$$\text{Besaran ruang rapat komisi} \quad 9 \times 3,75 = 33,75 \text{ m}^2$$

Tabel 4.3
Ruang Komisi

No	Ruangan	m ²
1	Ruang rapat komisi	54 m ²
2	Ruang kerja komisi	33,75 m ²
3	Jumlah	87,75 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 87,75	26,325 m ²
5	87,75 + 26,325	114,075 m ²
Total besar ruang 3 komisi 3 x 114,075 m ²		342,225m²

(Sumber : Analisis Penulis, 2015)

c) Ruang rapat fraksi.

Peserta dari rapat fraksi adalah anggota DPRD yang terpilih staf, sekretariat fraksi (diluar anggota terpilih)

Kapasitas ruang rapat fraksi

(1) Asumsi jumlah tiap fraksi = 4 orang

(2) Jumlah fraksi = 6 buah

(3) Untuk 6 ruang rapat fraksi 4 x 9 = 36 orang

Standar 1 orang bersidang 2,7 m² (standar Bapenas)

Besar ruang rapat fraksi 36 x 2,7 m² = 97,2 m²

Jadi untuk 6 ruang fraksi 145,8 m² : 6 = 24,3 m²

Pada ruang rapat fraksi terdapat ruang kerja fraksi dengan standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m² (standar Bapenas)

(1) Pimpinan setiap fraksi = 1 orang

(2) Wakil pimpinan = 1 orang

(3) Anggota = 4 orang +

Jumlah = 6 orang

Untuk 1 ruang kerja fraksi 6 x 3,75 m² = 22,5 m²

Jadi besaran 1 ruang fraksi adalah:

Tabel 4.4
Ruang Fraksi

No	Ruangan	m ²
1	Ruang rapat fraksi	24,3 m ²
2	Ruang kerja fraksi	22,5 m ²
3	Jumlah	46,8 m ²
4	Flow/sirkulasi 30 x 46,8 m ²	14,04 m ²
5	46,8 + 14,04	60,84 m ²
Total besar ruang fraksi 6 x 60,84 m ²		365,04 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

d) Lobby fraksi

Standar yang digunakan 0,72 m² standar perabot dan ruang gerak pada ruang umumnya 1,67 m² orang, (Neuvert, data arsitek I dan II).

Asumsi yang digunakan lobbi fraksi dari jumlah fraksi 40 orang.

Tabel 4.5
Lobi Fraksi

No	Ruangan	m ² /orang
1	40 orang	40 orang
2	Lobi fraksi A x B x C	0,72 x 40 x 1,67
Jumlah		48,096 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

e) Ruang lobbi anggota

Yang menggunakan lobbi anggota adalah peserta sidang komisi. Standar yang digunakan adalah 0,72 m² standar perabot dan standar ruang pada ruang umum 1,67 m²/orang,

(Neuvert, data arsitek I dan II).

Tabel 4.6
Ruang Lobi Anggota

No	Ruangan	m ² /orang
1	Peserta rapat komisi 7 x 6	42 orang
2	Untuk 3 ruang rapat komisi 3 x 42	126 orang
3	Luas lobi anggota A x B x C	0,72 x 126 x 1,67
Jumlah		151,502 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

f) Ruang resepsi dan ruang tamu

Standar yang digunakan adalah 0,72 m² standar perabot dan standar ruang gerak pada ruang umum 1,67 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II).

Tabel 4.7
Ruang Resepsionis dan Tamu

No	Ruangan	m ² /orang
1	20 orang	20 orang
2	Luas ruang : A x B x C	0,72 x 20 x 1,67
3	Jumlah	24,048 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 24,048	7,214 m ²
Total ruang resepsionis dan tamu		31,262 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

g) Ruang-ruang yang menggunakan ruang sidang pleno:

(1) Ruang rapat gabungan komisi

(a) Kapasitas ruang rapat 3 komisi

(b) Luas ruang 3 x standar rapat komisi

$$3 \times 40,5 \text{ m}^2 = 121,5 \text{ m}^2$$

$$\text{Flow/sirkulasi } 30\% \times 121,5 = 36,45 \text{ m}^2$$

$$\text{Total ruang rapat gabungan komisi} = 157,95 \text{ m}^2$$

(2) Ruang panitia musyawarah

Kapasitas ruangan:

Tabel 4.8
Ruang Panitia Musyawarah

No	Ruangan	m ² /orang
1	Anggota panitia musyawara (asumsi)	10 orang
2	Kepala daerah	1 orang
3	Pencatat staf	2 orang
4	Jumlah	13 orang
5	Standar 1 orang bersidang (<i>standar Bapenas</i>)	2,7 m ²
6	Luas ruang	13 x 2,7
7	Jumlah	35,1 m ²
8	Flow/sirkulasi 30% x 35,1	10,53 m ²
Total ruang panitia musyawarah		45,63 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(3) Ruang-ruang panitia anggaran.

Kapasitas ruang:

Tabel 4.9
Ruang panitia anggaran

No	Ruangan	m ² /orang
1	Anggota panitia anggaran	10 orang
2	Kepala daerah	1 orang
3	Sekretariat daerah	1 orang
4	Bappeda	1 orang
5	Irwilkab	1 orang
6	Kepala bidang keuangan	1 orang
7	Dinas daerah	4 orang
8	Pencatat staf sekretariat	2 orang
9	Jumlah	21 orang
10	Standar 1 orang bersidang (<i>standar Bapenas</i>)	2,7 m ²
11	Luas ruang	21 x 2,7 m ²
12	Jumlah	56,7 m ²
13	Flow/sirkulasi 30% x 56,7 m ²	17,01 m ²
Total ruang panitia anggaran		73,71 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

h) Ruang liput

Standar luas ruang (Standar Bapenas)

✓ Luas ruang 3 x 5,5	= 16,5 m ²
Flow/sirkulasi 30% 16,5	= 4,95 m ²
Jumlah	= 21,45 m ²
Total ruang liput 2 x 21,45	= 42,9 m²

i) Ruang anggota dewan

Standar luas ruang (Standar Bapenas)

✓ Luas ruang 5 x 3,5	= 17,5 m ²
Flow/sirkulasi 30% x 17,5	= 5,25 m ²
Jumlah	= 22,75 m ²

Total ruang anggota dewan 17 x 22,75 = 386,75 m²

j) Ruang-ruang administrasi

(1) Ruang kerja ketua DPRD.

Standar yang digunakan (Neuvert, data arsitek I dan II)

Faktor psikologis yang menunjang kewibawaan pemimpin diasumsikan flow sirkulasi 10% dari luas ruang.

Tabel 4.10
Ruang Kerja Ketua DPRD

No	Ruangan	m ²
1	Luas ruang kerja + ruang tamu = 5,4 x 4,5	24,3 m ²
2	Fasilitas toilet pemimpin 2,0 x 1,80	3,6 m ²
3	Jumlah	27,9 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 27,9	8,37 m ²
Total ruang kerja ketua DPRD		36,27 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(2) Ruang wakil ketua DPRD

Standar yang digunakan (Neuvert, data arsitek I dan II)

Faktor psikologis yang menunjang kewibawaan pemimpin diasumsikan flow sirkulasi 10% dari luas ruang.

Tabel 4.11
Ruang Wakil Ketua DPRD

No	Ruangan	m ²
1	Luas ruang kerja + ruang tamu = 5,4 x 4,5	24,3 m ²
2	Fasilitas toilet pemimpin = 2,0 x 1,80	3,6 m ²
3	Jumlah	27,9 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 27,9	8,37 m ²
Jumlah		36,27 m²
Total untuk 2 orang wakil ketua 2 x 36,27		72,54 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(3) Ruang sekretariat DPRD

Standar luas ruang (standar Bapenas)

✓ Luas ruang 5 x 4 = 20 m²

Flow/sirkulasi 30% x 20 = 6 m²

Total ruang sekretaris = 26 m²

(4) Ruang bagian tata usaha dan rumah tangga

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

dan standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

✓ Kapasitas ruang

Tabel 4.12
Ruang Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala bagian	1 orang
2	Sub bagian	9 orang
3	Jumlah	10 orang
4	Luas ruangan	3,75 x 10 x 1,3
5	Jumlah	48,75 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 48,75	14,625 m ²
Total untuk ruang tata usaha dan rumah tangga		63,375 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(5) Ruang bagian protokoler

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

dan standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

✓ Kapasitas ruang

Tabel 4.13
Ruang Bagian Protokoler

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala bagian	1 orang
2	Sub bagian	8 orang
3	Jumlah	9 orang
4	Luas ruangan	3,75 x 9 x 1,3
5	Jumlah	43,875 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 43,875	13,1625 m ²
Total untuk ruang bagian umum		57,0375 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(6) Ruang bagian risalah

Standar ruangan kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Dan standar ruang gerak 1.3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.14
Ruang Bagian Risalah

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala bagian	1 orang
2	Sub bagian	10 orang
3	Jumlah	11 orang
4	Luas ruangan	3,75 x 11 x 1,3
5	Jumlah	53,625 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 53,625	16,0875 m ²
Total ruang bagian risalah		69,7125 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(7) Ruang bagian persidangan

Standar ruangan kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Dan standar ruang gerak 1.3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.15
Ruang Bagian Persidangan

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala bagian	1 orang
2	Sub bagian	9 orang
3	Jumlah	10 orang
4	Luas ruangan	3,75 x 10 x 1,3
5	Jumlah	48,75 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 48,75	14,625 m ²
Total ruang bagian persidangan		63,375 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(8) Ruang bagian anggaran dan pembayaran

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.16
Ruang Bagian Anggaran dan Pembayaran

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala Bagian	1 orang
2	Sub Bagian dan Staf	7 orang
3	Jumlah	8 orang
4	Luas Ruangan	3,75 x 8 x 1,3
5	Jumlah	39 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 39	11,7 m ²
Total ruang bagian anggaran dan pembayaran		50,7 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(9) Ruang Bagian Pembukuan dan Pelaporan

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.17
Ruang Bagian Pembukuan dan Pelaporan

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kepala Bagian	1 orang
2	Sub Bagian dan Staf	7 orang
3	Jumlah	8 orang
4	Luas Ruangan	3,75 x 8 x 1,3
5	Jumlah	39 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 39	11,7 m ²
Total ruang bagian pembukuan dan pelaporan		50,7 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(10) Ruang Keamanan

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Dan standar ruang gerak 1.3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.18
Ruang Bagian Keamanan

No	Ruangan	m ² /orang
1	Petugas satpam	2 orang
4	Luas Ruangan	3,75 x 2 x 1,3
3	Jumlah	9,75 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 9,75	2,925 m ²
Total ruang bagian keamanan		12,675 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(11) Ruang Informasi serta Pendaftaran

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas) dan standar ruang gerak 1.3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.19
Ruang Bagian Informasi dan Pendaftaran

No	Ruangan	m ² /orang
1	Petugas pendaftaran & informasi	4 orang
4	Luas Ruangan	3,75 x 4 x 1,3
3	Jumlah	19,5 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 19,5	5,85 m ²
Total ruang bagian informasi & pendaftaran		25,35 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(12) Ruang Distribusi

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m² dan standar ruang gerak 1.3 m²/orang

Tabel 4.20
Ruang Bagian Distribusi

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	6 orang
2	Luas Ruangan	3,75 x 6 x 1,3
3	Jumlah	29,25 m ²
4	Fasilitas gudang (asumsi)	9 m ²
5	Jumlah	38,25 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 38,25	11,475 m ²
Total ruang bagian distribusi		49,975 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(13) Ruang Perpustakaan

Standar untuk 1 orang membaca dan menulis 1,35 m²

Dan standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Standar untuk 1 orang membaca dan menulis = 1,35 m²

Tabel 4.21
Ruang Perpustakaan

No	Ruangan	m ² /orang
1	20 orang	20 orang
2	Petugas Perpustakaan	2 orang
3	Jumlah	22 orang
4	Luas ruangan	1,35 x 22 x 1,3
5	Jumlah	38,61 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 38,61	11,583 m ²
Total ruang bagian perpustakaan		50,193 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(1) Ruang Ibadah/Mushollah

Tabel 4.22
Ruang Ibadah/Mushollah

No	Ruangan	m ² /orang
1	Standar untuk 1 orang (<i>Neuvert, data architec I dan II</i>) 0,6 x 1,20	0,72 m ²
2	Anggota Dewan + Sekertaris 40 + 1	41 orang
3	41 x 0,72	29,52 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 29,52	8,856 m ²
Total ruang ibadah/mushollah		38,376 m²

(Sumber : Analisis Penulis, 2015)

(2) Ruang Dokumentasi

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar BapenasI)

Standar ruang gerak 1.3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.23
Ruang Dokumentasi

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	3 orang
2	Luas ruangan	3,75 x 3 x 1,3
3	Jumlah	14,625 m ²
4	Gudang peralatan asumsi	9 m ²
5	Jumlah	23,625 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 23,625	7,088 m ²
Total ruang dokumentasi		30,713 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(3) Pengadaan

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,67 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.24
Ruang Pengadaan

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	2 orang
2	Luas ruangan	3,75 x 2 x 1,67
3	Jumlah	12,525 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 12,525	3,7575
Total ruang pengadaan		16,2825 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(4) Ruang pers

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Standar peralatan dan mesin foto copi

Tabel 4.25
Ruang Pers

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	20 orang
2	Luas ruangan	3,75 x 20 x 1,3
3	Jumlah	97,5 m ²
4	Flow/sikulasi 30% x 97,5	29,25
Total ruang pers		126,75 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(5) Ruang dharma wanita

Standar *ruang* kerja untuk 1 orang 3,75 m², (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,3 m²/orang, (Neuvert, data arsitek I dan II)

Asumsi 50% dari anggota dharma wanita 20 orang

Luas ruangan = 3,75 x 20 x 1,3

Jumlah = 97,5 m²

Flow/sirkulasi 30% x 97,5 = 29,25 m²

Total ruang dharma wanita = 126,75 m²

(6) Ruang aspirasi

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m² (standar Bapenas)

Standar ruang gerak 1,3 m²/orang (Neuvert, data arsitek I dan II)

Tabel 4.26
Ruang Aspirasi

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	20 orang
2	Luas ruangan	3,75 x 20 x 1,3
3	Jumlah	97,5 m ²
4	Flow/sirkulasi 30% x 97,5	29,25 m ²
Total ruang aspirasi		126,75 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(7) Lavatori

Dasar pertimbangan

- ✓ Kapasitas pada pemakai pada kegiatan

Optimal/jumlah pemakai sidang pleno = 147 orang

Staf = 24 orang

Jumlah = 171 orang

- ✓ Perbandingan jumlah pemakai

Pria 60% x 171 = 102 orang

Wanita 40% x 171 = 68 orang

- ✓ Standar yang digunakan

1 km/wc = 3 m² melayani 20 orang

1 urinoir = 0,84 m² melayani 20 orang

1 wastafel = 0,84 m² melayani 20 orang

Perhitungan keseluruhan:

Tabel 4.27
Ruang Lavatori

No	Ruangan	m ² /buah
WC/KM		
1	Pria 102/20 orang	5 buah
2	Wanita 68/20 orang	3 buah
	Kebutuhan ruang	
3	Pria 5 x 3	15 m ²
4	Wanita 3 x 3	9 m ²
Urinoir		
1	Pria 102/20 orang	5 buah
2	Jadi 5 wastafel pria	5 x 0,84 m ²
		4,2 m ²
3	Wanita 68/20 orang	3 buah
4	Jadi 3 wastafel wanita	3 x 0,84 m ²
		2,52 m ²
Luas service lavatori		
1	WC/KM pria	15 m ²
2	WC/KM Wanita	9 m ²
3	Wastafel pria	4,2 m ²
4	Wastafel wanita	2,52 m ²
Total lavatori untuk keseluruhan		30,72 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(8) Ruang data multimedia

Ruang data ialah ruang yang diperuntukan bagi warga masyarakat untuk memperlihatkan program-program yang telah dilaksanakan oleh dewan.

✓ Fungsi ruang

- Ruang data gedung DPRD
- Ruang potensi dan program DPRD
- Ruang pameran pembangunan

✓ Sifat ruang

- Terbuka bagi masyarakat

Perhitungan luas ruang

Standar ruang kerja untuk 1 orang 3,75 m²

Fasilitas – fasilitas ruang

- Ruang staf = 2 orang
- Bersaran ruang 2 x 3,75 = 7,5 m²

Kapasitas pengunjung/peserta sidang

Asumsi presentase tamu/masyarakat adalah 30 orang

Standar yang digunakan: 0,72 m² standar perabot dan standar ruang gerak umum 1,67 m²/orang

Tabel 4.28
Ruang Data Multimedia

No	Ruangan	m ² /orang
1	Kapasitas ruang	30 orang
2	Luas ruang	0,72 x 30 x 1,67
3	Jumlah	36,072 m ²
4	Diketahui 2 orang staf (2 x 3,75)	7,5 m ²
5	Jumlah	43,572 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 43,572	13,072
Total ruang data multimedia		56,644 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(9) Cafeteria

Standar yang digunakan: 0,72 m² standar perabot dan standar ruang gerak umum 1,67 m²/orang

Tabel 4.29
Ruang Cafeteria

No	Ruangan	m ² /orang
1	Peserta sidang	147 orang
2	Asumsi 30% dari total pemakai ruang	30% x 147
3	Jumlah	44 orang
4	Luas ruangan	0,72 x 44 x 1,67
5	Jumlah	52,9056 m ²
6	Flow/sirkulasi 30% x 52,9056	15,872 m ²
Total ruang cafeteria		68,777 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(10) Ruang istirahat pengemudi (asumsi) = 24 m²
Flow/sirkulasi 30% x 24 = 7,2 m²
Total ruang istirahat pengemudi = 31,2 m²

(11) Ruang pantry + gudang pantry = 12 m²
Flow/sirkulasi 30% x 12 = 3,6 m²
Total ruang pantry + gudang pantry = 15,6 m²

(12) Ruang jaga kapasitas 2 orang

✓ Fasilitas

Tabel 4.30
Ruang Jaga

No	Ruangan	m ²
1	1 kamar tidur	9 m ²
2	1 ruang makan 3 x 4	12 m ²
3	1 KM/WC 2 x 1,5	3 m ²
4	Jumlah	24 m ²
5	Flow/sirkulasi 30% x 24	7,2 m ²
Total ruang jaga		31,2 m²

(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

(13) Ruang mekanikal
Kapasitas ruang
✓ 1 ruang generator = 9 m²
✓ 1 meja panel = 6 m²
Standar yang digunakan
Jumlah = 15 m²
Flow/sirkulasi 30% x 15 = 4,5 m²
Total ruang mekanikal = 19,5 m²

(14) Ruang inventaris/gudang umum (asumsi) = 30 m²

(15) Main entrance (asumsi)	= 72,44 m²
(16) Lobbi utama (asumsi)	= 222,75 m²
(17) Koridor	= 235,88 m²
(18) Ruang operator (asumsi)	= 9 m²
(19) Ruang pos jaga (asumsi)	= 9 m²

- Garasi mobil

Kapasitas

✓ Mobil ketua = 1 buah mobil

✓ Mobil wakil ketua = 2 buah mobil

Staf administrasi yang menggunakan motor diasumsikan
30 orang.

30% x 30 = 9 motor

Standar parkir mobil (Neuvert, data arsitek I dan II) = 25 m²

Standar parkir motor (Neuvert, data arsitek I dan II) = 2 m²

✓ Luas garasi mobil 3 x 25 = 75 m²

✓ Luas garasi motor 9 x 2 = 18 m²

Jumlah = **93 m²**

- Ruang parkir terbuka

Jumlah peserta sidang = 147 orang

Asumsi 15% yang menggunakan mobil

15% x 147 orang = 22 orang

Asumsi 30% yang menggunakan motor

30% x 147 orang = 44 orang

Standar kebutuhan parkir

Parkir 90⁰ = 24-27 m²/unit (Neuvert, data arsitek I dan II)

Parkir $45^0 = 34-35,5 \text{ m}^2/\text{unit}$ (Neuvert, data arsitek I dan II)

✓ Diasumsikan $25 \text{ m}^2/\text{mobil}$ dan untuk motor $2 \text{ m}^2/\text{unit}$

✓ Luas daerah parkir

Untuk mobil 22 orang x 25 m^2 = 550 m^2

Untuk motor 44 orang x 2 m^2 = 88 m^2

Jumlah = **638 m^2**



Tabel 4.31
Rekapitulasi Besaran Ruang

RUANGAN	M ²
A. Ruang-Ruang Sidang	
1. Ruang Siding Pleno	515,97 m ²
2. Ruang Rapat Komisi A, B, C	342,225 m ²
3. Ruang Rapat Fraksi (6 fraksi)	365,04 m²
4. Ruang Rapat Gabungan Komisi	157,95 m ²
5. Ruang Rapat Panitia Musyawarah	45,63 m ²
6. Ruang Rapat Panitia Anggaran	73,71 m ²
7. Lobi Fraksi	48,096 m ²
8. Lobi Anggota	151,502 m ²
9. Ruang Liput (2 x 21,45)	42,9 m ²
10. Ruang Resepsionis	31,262 m ²
Jumlah	1.774,285 m²
B. Ruang Administrasi/	
1. Ruang Ketua DPRD	36,27 m ²
2. Ruang Wakil Ketua DPRD (2 orang)	72,54 m ²
3. Ruang Sekretariat DPRD	26 m ²
4. Ruang Anggota Dewan	386,75 m ²
5. Ruang Tata Usaha dan Rumah Tangga	63,375 m ²
6. Ruang Protokoler	57,0375 m²
7. Ruang Risalah	69,7125 m ²
8. Ruang Persidangan	63,375 m ²
9. Ruang Anggaran dan Pembayaran	50,7 m²
10. Ruang Pembukuan dan Pelaporan	50,7 m²
11. Ruang Keamanan	12,675 m ²
12. Ruang Informasi dan Pendaftaran	25,35 m ²
13. Ruang Distribusi	49,975 m ²
14. Ruang Perpustakaan	50,193 m ²
15. Ruang Ibadah (Mushollah)	38,376 m ²
16. Ruang Dokumentasi	30,713 m ²
17. Ruang Pengadaan	16,2825 m ²
18. Ruang Pers	126,75 m ²
19. Ruang Dharma Wanita	126,75 m ²
20. Ruang Aspirasi	126,75 m ²
Jumlah	1.480,2745 m²
C. Ruang Pendukung/Pelayanan	
1. Ruang Servis Lavatory	30,72 m ²
2. Ruang Data/Multimedia	56,644 m ²
3. Cafeteria	68,777 m ²
4. Ruang Istrahat Pengemudi	31,2 m ²
5. Ruang Pantry + Gudang Pantry	15,6 m ²
6. Main entrance	72,44 m ²
7. Lobbi utama	222,75 m ²
8. Coridor	235,88 m ²

9. Ruang Jaga	31,2 m ²
10. Ruang Mekanikal	19,5 m ²
11. Ruang Inventaris/Gudang Umum	30 m ²
12. Ruang Operator	9 m ²
13. Ruang Pos Jaga	9 m ²
14. Garasi Mobil/Motor	93 m ²
Jumlah	925,711 m²
D. Besaran Ruang Yang Dbutuhkan	
1. Ruang Sidang	1.774,285 m ²
2. Ruang Administrasi/Sekretariat	1.480,2745 m ²
3. Ruang Pendukung/Pelayanan	925,711 m ²
Jumlah Luas Total Bangunan	4.180,2705 m²
Flow Sirkulasi pada Koridor, Selasar dan Tangga di ambil 30%	
Jadi 30% x 4.180,2705 m ²	1.254,0811 m²
Total Luas Bangunan + Flow	5.434,3516 m²
5.434,3516 / 2	2.717,1758 m²

(Sumber : Analisa Penulis, 2015)

Bulbing Coverage (BC) diambil 40% dan *open space* 60%

Luas site : 60/40 dari 2.717,1758 m² = **4.075,7637 m²**

Untuk mendapatkan jumlah lantai yang akan dibangun adalah:

OS + LB + Parkir

Luas site = 4.075,7637 m² + 2.717,1758 m² + 638m²
= 7.430,9395 m²

Jadi diasumsikan pengembangan site terbesar 25%, yaitu :

Luas pengembangan = 25% x 7.430,9395 m²
= 1.857,7348 m²

Maka total luas site yang dibutuhkan yaitu:

= site + pengembangan
= 7.430,9395 m² + 1.857,7348 m²
= 9.288,6743 m²
= 0,9 Ha

4.2.2 Bentuk ruang

Dengan berdasarkan pada pertimbangan bentuk dan *lay out* ruang maka dipilih bentuk memangjang persegi empat agar pemakai ruangan lebih optimal dan efisien. Pada hal-hal tertentu mengalami perubahan menjadi segi empat.

4.2.3 Interior/bahan

a. Interior ruang sidang komisi

1) Lantai

Bentuk lantai datar, sedang kan untuk area stage dengan deretan terdepan terdapat berbeda ketinggian panggung kira-kira 0,90 meter.

2) Dinding

Pada dinding diberi akustik, dilapisi dengan jenis kayu hitam dengan ketebalan 1 cm dengan ketinggian 240 cm.

3) Plafond

Material plafond digunakan gypsum dan pada bagian tengah terdapat plafond kayu ramin dan disekitarnya diberi lampu TL dan lampu LED.

b. Interior ruang sidang komisi dan fraksi

1) Lantai

Seluruh permukaan lantai dilapisi dengan karpet kecuali toilet.

2) Dinding

Seluruh dinding dilapisi dengan kayu hitam dengan ketebal 1 cm dengan ketinggian 140 cm, yang berfungsi untuk meredam suara.

3) Plafond

Material plafond digunakan gypsum, pada plafond tersebut ditempelkan lampu TL dan lampu LED.

c. Lobby fraksi dan anggota

1) Lantai

Material lantai menggunakan granit yang dilapisi dengan karpet.

2) Dinding

Dilapisi teakwood setinggi 240 cm.

3) Plafond

Material plafond digunakan gypsum, pada plafond tersebut ditempelkan lampu TL atau lampu LED.

4) Pintu

Menggunakan pintu kaca tahan benturan dengan bingkai aluminium.

d. Ruang sekretariat

1) Lantai

Material finising lantai adalah tegel 60 x 60 cm

2) Dinding

Dilapisi teakwood setinggi 240 cm

3) Plafond

Plafond yang digunakan pada ruangan ini adalah plafond eternit, dan untuk penerangan di plafond ditempelkan lampu TL atau lampu LED.

4.2.4 Sistem utilitas

a. Jaringan air bersih

Sistem pengadaan air bersih dipertimbangkan atas:

- 1) Biaya
- 2) Pemeliharaan
- 3) Kesehatan
- 4) Kebutuhan

Sumber air bersih diperoleh dari:

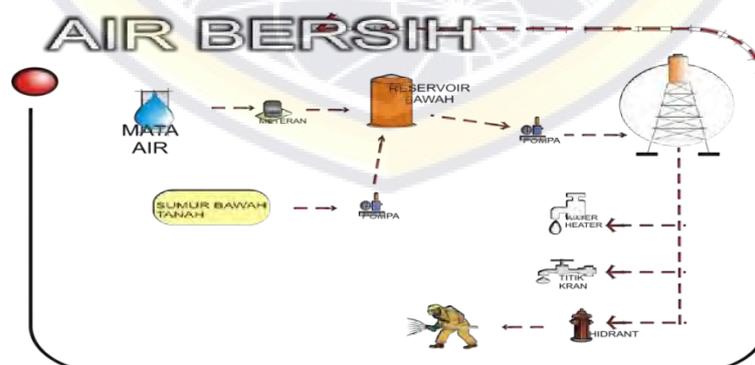
- 1) Proyek air minum (PAM)

Air PAM didistribusikan ke lokasi melalui meteran ke ground reservoir kemudian dipompa ke top reservoir dan dialirkan bebas ke unit-unit kebutuhan.

- 2) Sumur bor

Sebagai pengganti air PAM bila macet, dengan sistem distribusi yaitu dari sumur bor dipompakan ke top reservoir dan dialirkan bebas ke unit-unit kebutuhan.

Air bersih dari sumur disalurkan ke bak penampungan, demikian pula air PAM, kemudian dipompa ke reservoir atas dan disalurkan ke unit-unit bangunan.



Gambar 4.9: Skema sistim distribusi air bersih

(Sumber: Bagus, 2013)

b. Pembuangan air kotor

Air kotor dari bangunan dapat bersumber dari:

- 1) Air kotor dari kloset
- 2) Air kotor dari bak mandi, bak cuci tangan dan dapur
- 3) Air hujan dari atap dan halaman
- 4) Air kotor yang banyak menggunakan lemak

Pembuangan air kotor (setelah melalui perangkat lemak terutama pada cafe/dapur), terlebih dahulu ditreatment untuk menjadi air beku menjadi tiga tahap yaitu pada tangkai airesi (24 jam) tangki setting (3 jam) dan tangki khlorinasi (1 jam) untuk dapat digunakan dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan bangunan dan sebagian dibuang ke roil kota. Pembuangan air kotor padat dapat dialirkan ke septictank, lalu diteruskan pada bak peresapan dan terakhirnya ke bak penampungan utama.

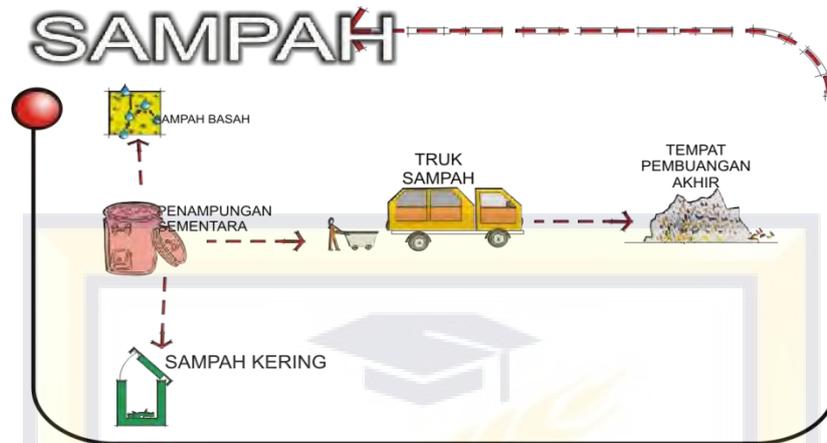


Gambar 4.10: Skema sistim pembuangan air kotor
(Sumber: Bagus, 2013)

c. Pembuangan sampah

Pengumpulan sampah pada tiap lantai dan unik bangunan dilakukan dengan menyediakan tong sampah serta petugas khusus yang mengumpulkan untuk selanjutnya diteruskan pada bak sampah

penampungan sementara yang kemudian selanjutnya diangkut oleh truk sampah ke tempat pembuangan akhir.



Gambar 4.11: Skema sistim pembuangan sampah

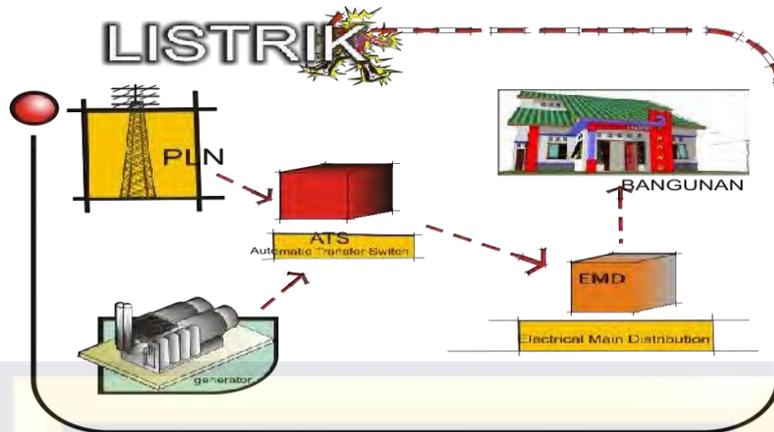
(Sumber: Bagus, 2013)

d. Jaringan listrik

Sumber tenaga listrik dapat berasal dari PLN dan sumber tenaga listrik cadangan digunakan generator set dengan ATS (*automatic transfer switch*), yang apabila aliran listrik dari PLN terputus atau padam, maka genset akan bekerja secara otomatis.

Beberapa dasar pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain:

- 1) Daya listrik yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan serta proyeksi pengembangan dimasa yang akan datang
- 2) Penggunaan sumber listrik utama berasal dari PLN dan sumber listrik cadangan berasal dari generator.



Gambar 4.12: Skema sistim jaringan listrik
(Sumber: Bagus, 2013)

e. Jaringan telekomunikasi

Sistem komunikasi merupakan sarana penunjang yang vital bagi pengelola maupun pengunjung. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan sistem komunikasi pada bangunan gedung DPRD antara lain:

- 1) Luas pembesaran lahan dalam bangunan yang terpisahkan oleh aktivitas kegiatan yang terjadi dalam bangunan
- 2) Terjaminnya komunikasi antar unit kegiatan dalam bangunan gedung DPRD
- 3) Terjaminnya komunikasi ke dalam dan ke luar gedung DPRD.

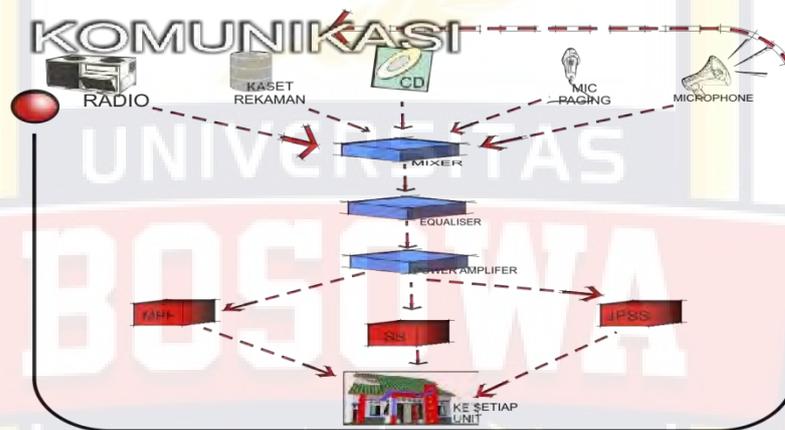
Sistem komunikasi yang digunakan pada bangunan gedung DPRD di Kabupaten Banggai Laut, antara lain:

- 1) Komunikasi internal
 - a) Intercom
 - b) *Sound system call*

2) Komunikasi eksternal

- a) Telepon
- b) Handpone
- c) Email
- d) Internet

Penggunaan sistem komunikasi wadah ini sangatlah penting, dimana tingkat kesibukan memerlukan sarana komunikasi yang canggih dan lengkap.

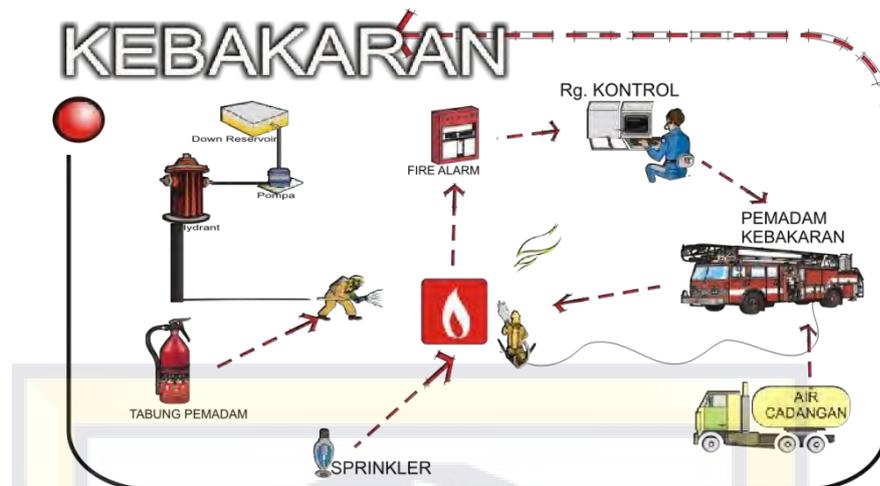


Gambar 4.13: Diagram komunikasi dengan sistim PABX
(Sumber: Bagus, 2013)

f. Pengamanan terhadap kebakaran

Sebagai tindak pengamanan kemungkinan terjadinya kebakaran ditempuh dengan:

- 1) Penanggulangan dengan memanfaatkan mobil kebakaran dengan pemakaian tabung CO₂ pada gedung DPRD dan penempatan tabung internet CO₂ pada daerah rawan kebakaran dan dapat terlihat langsung
- 2) Memperhatikan sumber api baik berasal dari instalasi listrik, dapur maupun barang mudah terbakar.



Gambar 4.14: Sistem pengamanan terhadap kebakaran
(Sumber: Bagus, 2013)

g. Penangkal petir

Jenis penangkal petir yang digunakan adalah sistem penangkal tongkat Franklin. Prinsipnya adalah usaha untuk memusatkan daerah sambaran petir ke titik yang dapat diamankan sehingga arus listrik dengan kekuatan yang tinggi dari petir dapat diredam ke dalam tanah dengan aman, sehingga bangunan dapat terlindung dari kebakaran.



Gambar 4.15: Skema sistem penangkal petir
(Sumber: Bagus, 2013)

h. Pemeliharaan

Untuk memudahkan dalam pemeliharaan bangunan Gedung DPRD maka harus diperhatikan:

- 1) Struktur dan material bahan bangunan secara keseluruhan harus memenuhi persyaratan hasil studi
- 2) Pengecetan seluruh material untuk mengisolasi pengaruh alam dan bakteri yang dapat merusak material
- 3) Mencegah pengaruh bahan kimia.

4.2.5 Struktur bangunan

a. Sistem struktur

Prinsip sistem struktur didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Pendukung monumental dari ungkapan fisik bangunan dan *building performance* yang dituntut
- 2) Stabil dan tahan beban angin, iklim, gempa dan tahan terhadap api
- 3) Sederhana, ekonomis dan mudah dilaksanakan

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka konsepsi struktur dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Memilih sistem struktur yang efisien dalam pembiayaan, sederhana dan mudah dilaksanakan
- 2) Memilih sistem struktur yang dapat memberikan perwujudan kesatuan bangunan dan juga memberikan fleksibilitas dalam pengaturan ruang

Adapun dasar pertimbangan pemilihan material atau bahan bangunan adalah:

- 1) Mudah dilaksanakan
- 2) Tahan terhadap pengaruh luar serta pengaruh kelembaban dan korsi
- 3) Tahan terhadap gaya lateral atau gempa
- 4) Kesesuaian bahan dengan sistem struktur
- 5) Mudah dalam pemeliharaan

Dalam perencanaan Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut, pemakaian bahan bangunan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk struktur utama digunakan bahan beton dan baja
- 2) Untuk struktur pengisi dipergunakan tembok atau dinding batu bata
- 3) Pemakaian karpet untuk pelapis lantai pada ruang-ruang tertentu

b. Modul struktur

Sebagai unik perkecil atau ukuran dasar yang digunakan untuk menentukan dimensi ruang dan bagian-bagiannya, modul memegang peranan penting dalam menentukan dimensi ruang dan struktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuang modul struktur adalah sebagai berikut:

- 1) Modul ruang berdasarkan kegiatan utama bangunan termasuk ruang gerak manusia, kendaraan, perabot dan peralatan.
- 2) Sistem struktur dan konstruksi yang digunakan
- 3) Bahan bangunan atau material yang dipakai

Modul struktur yang diambil berdasarkan jenis bilangan sesuai dengan skala gerak manusia kelipatan dari bilangan tersebut yakni 360-720 cm, dengan pertimbangan sebagai berikut:

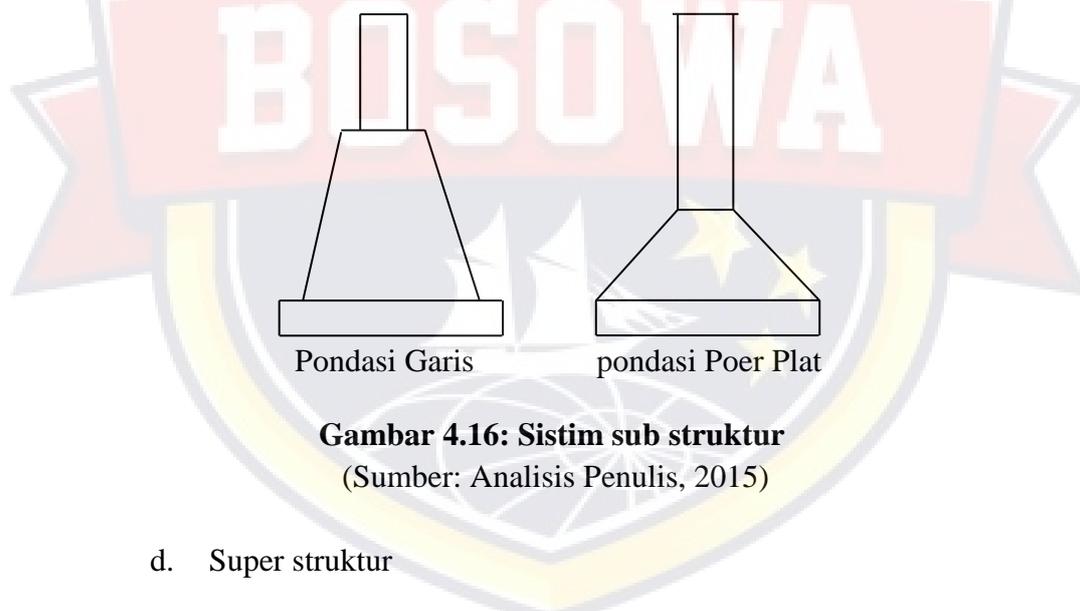
1) Sesuai dengan modul bahan (dimensi komponen material bangunan seperti bahan lantai, dinding dan plafond) yang umumnya memakai kelipatan 30 cm

2) Sesuai dengan sistem struktur dan konstruksi

3) Memungkinkan jarak bentang efektif dan ekonomis

c. Sub struktur

Termasuk dalam sub struktur adalah pondasi garis dan pondasi poer yang menggunakan material beton.



Gambar 4.16: Sistim sub struktur
(Sumber: Analisis Penulis, 2015)

d. Super struktur

Termasuk super struktur adalah sloof, lantai, kolom, balok induk, balok diagram atau balok anak, ring balk serta atap. Super struktur dipertimbangkan atas:

1) Bentangan terjauh

2) Pembebanan terbesar

3) Pendukung sub struktur atau penyalur gaya pada sistem struktur

Sistem super struktur menggunakan sistem struktur konstruksi baja dan kayu.

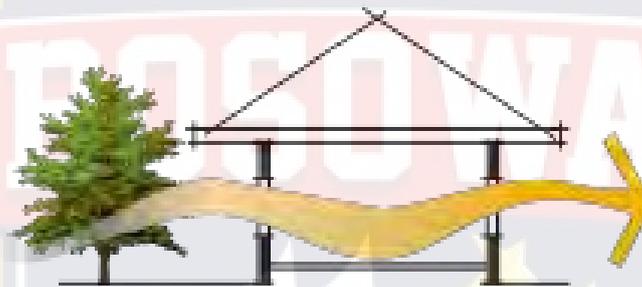
4.2.6 Environment ruang

Sistem environment ruang adalah sistem yang berlaku pada lingkungan yang berhubungan dengan ruang, yaitu:

a. Penghawaan

Sistem penghawaan terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1) Penghawaan alami yaitu memanfaatkan hembusan angin dari bukaan yang efektif untuk mendapatkan penghawaan yang baik



Gambar 4.17: Sistem penghawaan alami
(Sumber: Bagus, 2013)

2) Penghawaan buatan yaitu umumnya digunakan AC untuk mengatur temperatur udara dalam ruangan sesuai yang diinginkan, juga dipakai apabila suatu ruangan kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan penghawaan alami.



Gambar 4.18: Sistem penghawaan buatan

(Sumber: <https://id.foursquare.com>, 2019)

Penghawaan yang diperlukan disini adalah penghawaan alami dengan pertimbangan tidak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan penghawaan adalah:

- 1) Pemenuhan tuntutan kebutuhan udara bersih demi menjaga kesehatan, kenikmatan dan kenyamanan pemakai
- 2) Tata letak bukaan vertikal terhadap orientasi arah angin
- 3) Persyaratan penghawaan arah angin untuk standar gedung temperatur ruang 22° , dengan kelembaban 40-60%. Kebutuhan udara didalam gedung $20-30^{\circ}$ sedangkan untuk pertukaran udara $1-2 \text{ m}^3/\text{jam}$ dengan kecepatan $0,5-0,8 \text{ m/detik}$.

b. Pencahayaan

Sistem pencahayaan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Pencahayaan alami

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sistem pencahayaan alami adalah:

- a) Menghindari cahaya langsung ke dalam ruang dengan cara pemanfaatan level, overstek, *sunscreen* dan landsekap

b) Persyaratan luas bukaan yaitu:

- (1) Ruang sidang $1/5-1/3$ luas lantai
- (2) Ruang umum $1/8-1/5$ luas lantai
- (3) Ruang administrasi $1/10-1/5$ luas lantai
- (4) Gedung $1/10-1/5$ luas lantai

Sudut sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan adalah:

- a) Sinar matahari pagi maksimum pada sudut 45° (tepat jam 09.00 pagi)
- b) Sinar matahari sore minimum pada sudut 145°
- c) Disamping itu diusahakan sudut jatuh 270°



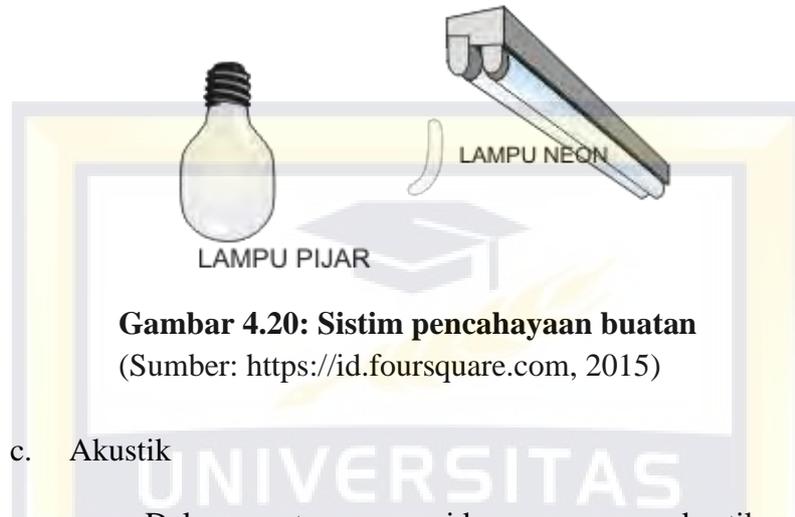
Gambar 4.19: Sistem pencahayaan alami
(Sumber: Bagus, 2013)

2) Pencahayaan buatan

Pencahayaan buatan digunakan pada saat tertentu yaitu apabila dalam keadaan tidak menguntungkan. Jenis pencahayaan buatan untuk gedung DPRD yaitu jenis lampu TL (neon) dengan pertimbangan antara lain:

- a) Radiasi panas yang ditimbulkan lebih kecil
- b) Cahaya yang dihasilkan tidak mengganggu mata

- c) Efek pengurangan yang semaksimal mungkin mendekati cahaya alamiah.



Gambar 4.20: Sistem pencahayaan buatan
(Sumber: <https://id.foursquare.com>, 2015)

c. Akustik

Dalam suatu ruang sidang, peranan akustik sangat penting karena mendukung kelancaran distribusi suara ke telinga peserta. Akustik menurut Mangunwijaya, (1998) di bagi atas 2 (dua) faktor:

- 1) Distribusi suara tinggi
- 2) Waktu kedap suara yaitu waktu dimana suara dapat bertahan dalam suatu ruangan, yakni waktu yang diperlukan gen SPL (sound pressure level) = 60 bb

Untuk merencanakan sistem akustik pada ruang sidang maka persyaratan sound pressure levelnya = 38 bb dengan *Revebration Time* 0,65-1,3 detik. Disamping menggunakan material-material dan penataan interior bangunan yang dapat meredam dan memantulkan suara yang baik.

Pada sistem akustik atau pengendalian kebisingan pada gedung DPRD terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Sistem akustik luar ruang

Sistem akustik luar ruang dapat ditempuh dengan:

- a) Pemanfaatan landscape
- b) Penzoningan yang tepat dengan memperhatikan jarak perjalanan suara dan jarak sumber bising dengan lingkungan gedung

- c) Penggunaan material penanggulangan kebisingan sebagai penyaring akhir

2) Sistem akustik dalam ruang

Sistem akustik dalam ruang untuk Gedung DPRD dipertimbangkan atas:

- a) Distribusi suara dalam ruang
- b) Waktu peredam, waktu suara lama bertahan dalam ruang. Ruangan yang menggunakan akustik adalah ruang sidang pleno, ruang sidang komisi, ruang sidang fraksi. Digunakan bahan akustik yang mempunyai tingkat peredam yang cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai kabupaten induk dimana sesuai dengan namanya secara geografis. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu pemerintah daerah yang layak sesuai dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Februari 2008, No:64/430/PUUD.

Mengenai pembangunan gedung DPRD pada tiap-tiap kabupaten /kota merupakan kebijakan secara nasional.

Untuk mengungkapkan wadah fisik dari Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini sebuah Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut baik secara makro maupun mikro sangat dipengaruhi. Adapun fungsi dari Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah khususnya dalam bidang legislatif. Sedangkan peran dalam Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah mengamalkan serta menjalankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan / kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD

dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka sangat diharapkan adanya interpretasi yang terus menerus tentang makna sebuah tanda (*Semiotic*) bagi para perancang dalam menambah pengetahuan tentang metode perancangan dan gagasan bentuk arsitektur. Agar hasil perancangan yang diperoleh senantiasa variatif dan lebih komunikatif. Dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan bahasa visual, dimana arsitek akan berhasil mengkomunikasikan idenya, apabila sang pengamat dapat menyerap arti dari perlambangan atau simbol yang dikandung sebuah artefak, dalam hal ini Arsitektur.

DAFTAR PUSTAKA

- Malik, Alwi, 2008, *Kantor DPRD Kab, Pangkajene dan Kepulauan*, Skripsi Universitas Bosowa Makassar
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Banggai Laut Dalam Angka*, BPS Kabupaten Banggai Laut.
- Bagus, Jamaludin, 2013, Acuan Perancangan *Gedung DPRD Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah*, Skripsi Universitas Bosowa Makassar.
- Dinas Parawisata, 2012, *Arsitektur Tradisional Suku Banggai*, Kab, Banggai Laut,
- Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang Kab Buru Selatan, 2012, *Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURTK)*, BAPPEDA Kabupaten Banggai Laut, Tahun 2009.
- Fikri, Alfian. M, 2000, *Kamus Inggris- Indonesia*, Karya Agung, Surabaya
- Harahap, Krisna, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung
- Keputusan DPRD, Nomor. 188 Tahun 2008, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, 2008, *Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut*.
- Neufert, Ernst, 1980, *Architect Data Second Edition*, John Willy And Song inc, Data.
- Zunaidin, A, Daud, 2008, Acuan Perancangan *Kantor DPRD Halmahera Selatan*, Skripsi Universitas Bosowa Makassar.
- Undang-undang No 32. 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
<https://bolmerhutasoit.wordpress.com>

**GEDUNG KANTOR DPRD, KABUPATEN BANGGAI LAUT,
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAPORAN PERANCANGAN

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Ujian Sarjana Teknik Arsitektur



OLEH :

MUH. FIMANSYAH SALIM

45 09 043 034

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PERANCANGAN

PERANCANGAN : TUGAS AKHIR SARJANA TEKNIK ARSITEKTUR
JUDUL : GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN BANGGAI LAUT,
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENYUSUN : MUH. FIRMANSYAH SALIM
NO. STAMBUK : 45 12 043 009
PERIODE : SEMESTER GENAP 2018/2019

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Satriani Latief, ST., MT
NIDN. 0917107405



Lisa Amalia, ST., MT
NIDN. 0929018901

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Teknik

Ketua Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik



Ir. Ridwan, ST., M.Si
NIDN. 0910127101



Svam Fitriani Asnur, ST., Msc
NIDN. 0931087602

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan perancangan yang merupakan salah satu syarat kelulusan studi pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar yang berjudul:

***“GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KABUPATEN BURU
SELATAN, PROVINSI MALUKU”***

Penulis menyadari bahwa segala daya upaya yang telah dicurahkan untuk menyelesaikan penulisan ini. Tidak dapat dipungkiri penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan penulisan ini, yang dapat berguna bagi kita semua pada masa akan datang. Berkat usaha dan kerja keras dari awal perkuliahan hingga penyusunan penulisan ini tentunya tidak sedikit hambatan dan cobaan yang dihadapi, untuk itu dalam kesempatan ini penulis memohon maaf, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. Sherly Asriany, ST., MT** selaku dosen pembimbing I, dan **Bapak Syamsuddin Mustafa, ST., MT** selaku dosen pembimbing II, yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. **Bapak Ir. Syamsuddin Mustafa, MT**, selaku Ketua Jurusan, **Ibu Syam Fitriani A, ST., MSc** selaku Sekertaris Jurusan, dan **Ibu Ayu Linda** selaku Tata Usaha Jurusan Arsitektur Universitas Bosowa, Makassar.
3. **Bapak Ir. H. Abd. Halim Meru, M.Si** dan **Ibu Marwati, ST., MT** selaku Tim Penguji yang telah meluangkan waktu menguji penulis.
4. Bapak **Syahril Idris, ST** selaku Kepala Studio yang telah banyak memberikan motifasi dan masukan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu dosen serta para staf Akademik Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar.
6. Seluruh teman-teman studio XXXIV (34) semuanya tanpa diskriminasi. Ingat perjuangan kita belum berakhir kawan-kawan.
7. Seluruh teman-teman yang ada di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Makassar yang tidak dapat disebut satu-persatu dalam memberikan saran maupun masukan dalam penyelesaian studi.
8. Segenap instansi yang telah memerikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Bravo Merah-Hitam semuanya tanpa diskriminasi. Ingat perjuangan kita belum berakhir kawan-kawan.

Melalui kesempatan ini pula dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terkhusus kedua orang penulis yang sangat penulis kagumi dan banggakan, ayahanda **Idris Wasolo** dan ibunda **Husna Kumkelo** atas doa dan dukungan materi yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Adik-adikku tersayang **Zumrah Wasolo, Syahrul Wasolo, Umar Wasolo, Syakir Wasolo, Ida Wasolo dan Zamarullah Wasolo** yang telah membantu penulis selama ini baik materil maupun moril serta seluruh keluarga besar yang ada di Sepa terima kasih atas dukungan dan doa tulusnya.
3. Adik-adik **Ikatan Pelajar Mahasiswa Sepa (IPMAS) Cabang Makassar** yang telah memberi motivasi kepada penulis.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan semoga Allah selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, **Amin.**

Billahitaufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2016

LUKMAN SYAHID WASOLO

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pengadaan Proyek	2
1.3 Batasan Proyek	2
BAB II RINGKASAN PROYEK	
2.1 Data Fisik	3
2.2 Pengertian Proyek	3
2.3 Tujuan Proyek	3
2.4 Sasaran Proyek	3
2.5 Identifikasi Pelaku Kegiatan	4
BAB III RANCANGAN FISIK PROYEK	
3.1 Perancangan Fisik Makro	5
3.1.1 Penentuan Lokasi	5
3.1.2 Penentuan Tapak	5
3.1.3 Pengolahan Tapak	6
3.2 Perancangan Fisik Mikro	8
3.2.1 Jenis dan besaran ruang	8

3.2.2	Bentuk dan penampilan bangunan	11
3.2.3	Sistem Struktur	12
3.2.4	Tata Ruang Dalam	12
3.2.5	Perlengkapan Bangunan	13

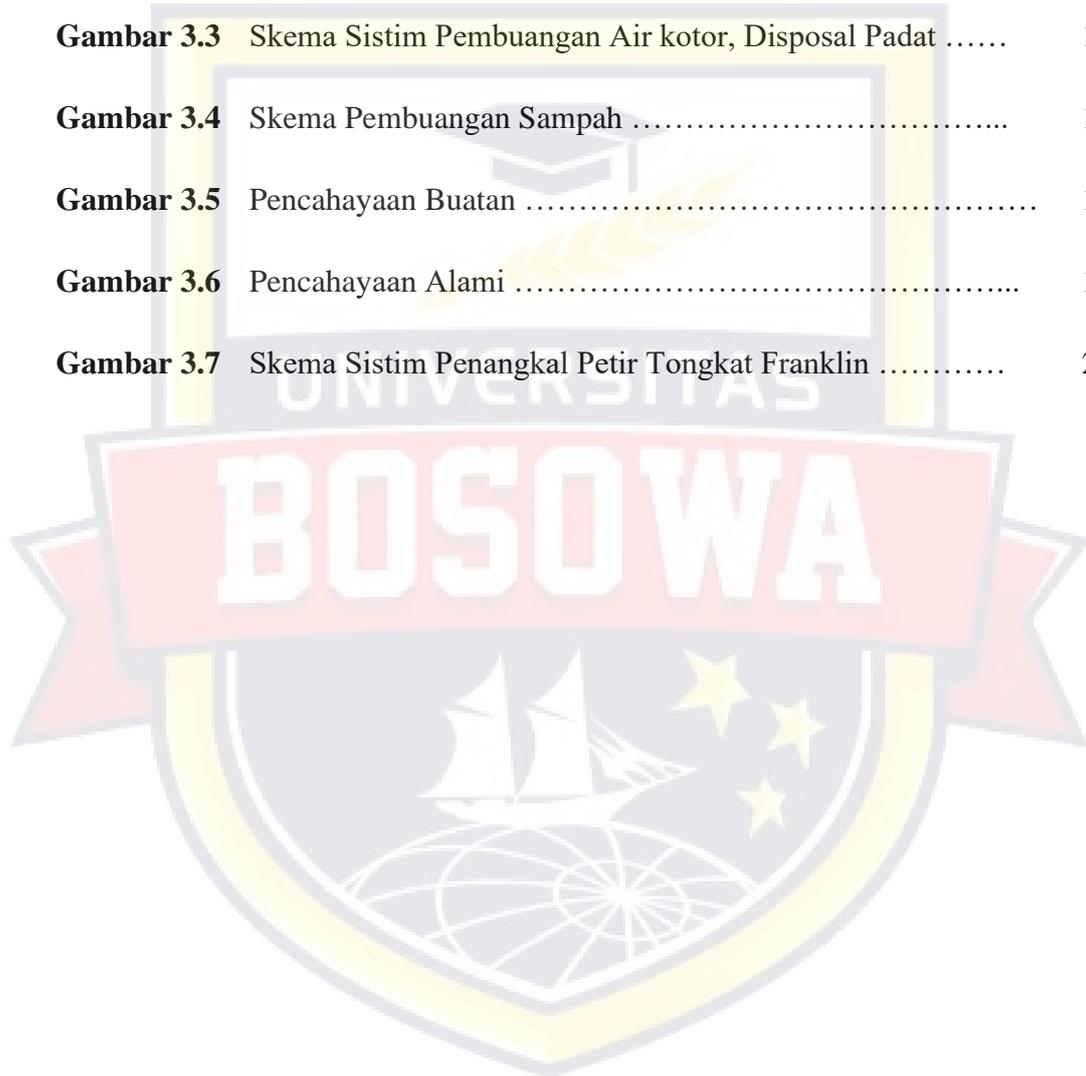
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema Sistim Jaringan Air Bersih	14
Gambar 3.2	Skema Sistim Pembuangan Air Kotor, Disposai Cair	14
Gambar 3.3	Skema Sistim Pembuangan Air kotor, Disposai Padat	15
Gambar 3.4	Skema Pembuangan Sampah	15
Gambar 3.5	Pencahayaan Buatan	17
Gambar 3.6	Pencahayaan Alami	17
Gambar 3.7	Skema Sistim Penangkal Petir Tongkat Franklin	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mutlak adanya unsur pemerintahan sebagai pengelola, pengatur serta pemimpin yang dapat mengkoordinir tata pemerintahan, serta melayani kebutuhan masyarakatnya baik itu dalam bentuk kebutuhan sosial, kebutuhan fisik dan kebutuhan emosi yang selalu melibatkan masyarakatnya baik secara individu maupun berkelompok, demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Sebagai kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Laut sebagai kabupaten induk dimana sesuai namanya secara geografis meliputi wilayah Kepulauan. Perkembangan pembangunan senantiasa diiringi dengan bertambahnya volume kerja pemerintahan sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan aspirasi masyarakat pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan tanggung jawab aspirasi masyarakat.

Kegiatan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang ada sekarang terdapat beberapa masalah antara lain, tersebarnya lokasi atau kantor pemerintahan, penggunaan kantor camat yang dijadikan Gedung DPRD. Dengan demikian instansi yang terkait dalam menjalankan fungsinya tidak efisien dalam koordinasi aspirasi masyarakat

pemerintahan, sehingga perlu adanya wadah atau tempat berupa Gedung DPRD yang representatif untuk menampung serta mengolah aspirasi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Laut.

1.2 Tujuan Pengadaan Proyek

Mewujudkan suatu bangunan Gedung DPRD, sebagai wadah atau tempat dalam mengelola aspirasi masyarakat daerah, serta meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.

1.3 Batasan Proyek

Dalam perencanaan proyek ini dibatasi pada aspek:

1. Konseptual yang didalamnya mencakup pengolahan site, bentuk, ruang, sirkulasi, struktur dan utilitas.
2. Perencanaan dibatasi pada perencanaan Arsitektur yang meliputi perencanaan site, denah, tampak, potongan, dan perspektif.
3. Perencanaan Gedung DPRD pada perencanaan struktur, utilitas dan perlengkapan bangunan dibatasi pada konsep sistem penerapan yang sesuai dan tidak dilakukan secara terperinci berdasarkan pada hasil perhitungan aktual.

BAB II

RINGKASAN PROYEK

2.1 Data Fisik

- 2.1.1 Nama Proyek : Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut
- 2.1.2 Lokasi Proyek : Kelurahan Lompio- Kecamatan Banggai
- 2.1.3 Pemilik Proyek : Pihak Pemerintah Daerah
- 2.1.4 Luas Tapak : 0,8 Ha

2.2 Pengertian Proyek

Gedung DPRD Kabupaten Banggai Laut berfungsi sebagai wadah atau tempat wakil rakyat beserta jajarannya untuk mengelola aspirasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan ditingkat kabupaten.

2.3 Tujuan Proyek

Tujuan perancangan proyek Gedung DPRD kabupaten Banggai Laut adalah merencanakan suatu bangunan Gedung DPRD yang representatif dalam aktifitas mengelola aspirasi masyarakat. Gedung DPRD ini diharapkan nantinya dapat memberikan keamanan, kenyamanan bagi para pelaku aktifitas didalamnya.

2.4 Sasaran Proyek

Adalah untuk mendapatkan suatu rancangan Gedung DPRD yang dapat mewadahi segala aktifitas dalam melayani kepentingan masyarakat.

Gedung DPRD ini harus dapat mencerminkan ciri dan karakter masyarakat kabupaten Buru Selatan.

2.5 Identifikasi Pelaku Kegiatan

Kegiatan atau aktifitas yang terjadi pada Gedung DPRD ini berbentuk pelayanan dan servis yang dikelompokkan berdasarkan aktifitas masing-masing bidang, antara lain:

1. Aktifitas Utama

Aktifitas utama adalah kegiatan-kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat pemerintahan yang dilakukan oleh wakil rakyat, dan eksekutif.

2. Aktifitas Penunjang

Adalah aktifitas yang mendukung pengelola serta pengunjung (tamu) yang berupa ruang tamu, ruang rapat paripurna, perpustakaan dan lain-lain.

3. Aktifitas Pelayanan

Adalah kegiatan yang berperan menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada baik di tingkat masyarakat atau unsur eksekutif.

4. Aktifitas Servis

Adalah kegiatan yang memberikan pelayanan servis kepada pegawai dan masyarakat yang berupa ruang rapat paripurna, ruang kerja, kantin, penunjang dan lain-lain.

BAB III

RANCANGAN FISIK PROYEK

3.1 Perancangan Fisik Makro

3.1.1 Penentuan lokasi

Lokasi terpilih terletak pada kawasan pusat pemerintahan daerah berdasarkan arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut terletak di Kecamatan Banggai dengan fungsi utamanya sebagai Kompleks Perkantoran sedangkan fungsi penunjang sebagai pemukiman, kesehatan, pelayanan jasa, sehingga lokasi tersebut sangat baik bagi peruntukan Gedung DPRD yang ditunjang oleh sarana pendukung yang ada di lokasi.

3.1.2 Penentuan tapak

Tapak yang terpilih terletak pada lahan dengan sistem blok yang diperuntukan untuk perkantoran pemerintahan, tepatnya di Jalan Kilometer 1.

- a) Sebelah Utara : Area perkantoran
- b) Sebelah Timur : Lahan kosong
- c) Sebelah Selatan : Kantor PU
- d) Sebelah Barat : Lahan kosong

3.1.3 Pengolahan tapak

a) Tata massa dan penzoningan

Gedung DPRD kabupaten Banggai Laut memanfaatkan site yang terletak dipersimpangan jalan masuk area perkantoran dengan spesifikasi:

- 1) Lahan untuk bangunan
- 2) Lahan untuk parkir
- 3) Lahan untuk penghijauan, taman dan plaza upacara.

Dengan orientasi massa bangunan mengarah atau berhadapan dengan jalan masuk area perkantoran, guna mendapatkan view yang baik serta efisiensi ruang sehingga sisi depan tapak merupakan area terbuka yang dimanfaatkan sebagai jalur sirkulasi, plaza upacara, dan pertamanan. Adapun perbandingan BC yang digunakan 40% : 60 %, dimana massa bangunan utama dua (2) lantai, musholah, penunjang, kantin, yang ditata sedemikian rupa guna menunjang aktifitas dalam bangunan.

Berdasarkan penzoningan maka zona servis atau ruang yang berhubungan dengan masyarakat diletakkan pada lantai dasar bangunan utama, sedangkan zona privat seperti ruang kerja ketua, wakil ketua, staf dan asisten diletakan pada lantai dua bangunan utama.

b) Sirkulasi dan pencapaian

Sirkulasi dibagi atas dua bagian yaitu :

1) Sirkulasi kendaraan

Untuk jalur sirkulasi kendaraan dibedakan atas :

- (a) Sirkulasi kendaraan pengunjung masuk dari Jalan Kilometer 1 area perkantoran ke dalam atau dari pintu depan/*main entrance* bagi tamu penting dapat langsung ke lantai dua dan bisa parkir pada tempat parkir pengelola lalu keluar melalui area sisi timur bangunan.
- (b) Sirkulasi kendaraan pengunjung dapat pula masuk melalui Jalan Kilometer 1 dan langsung ke arah belakang untuk mencapai tempat parkir.
- (c) Sirkulasi kendaraan pegawai masuk dari arah Jalan Kilometer 1 area perkantoran ke arah utara dan keluar melalui arah samping kiri bangunan atau langsung ke depan arah selatan bangunan (pintu keluar)
- (d) Sirkulasi kendaraan servis masuk melalui Jalan Kilometer 2 area perkantoran dan keluar melalui area samping kiri bangunan Jalan Kilometer 2 area perkantoran.

2) Sirkulasi pejalan kaki

Pencapaian sirkulasi dapat dilakukan dari Jalan Kilometer 1 area perkantoran, melalui trotoar dan selanjutnya masuk ke *main entrance*.

3.2 Perancangan Fisik Mikro

3.2.1 Jenis dan besaran ruang

Adapun jenis dan besaran ruang yang diperoleh dalam proyek ini yaitu:

a) Lantai I

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) Main entrance | = 75,15 m ² |
| 2) Lobbi utama | = 227,95 m ² |
| 3) Musholla | = 40,25 m ² |
| 4) Ruang resepsionis | = 35,16 m ² |
| 5) Ruang fraksi (50,14 x 6) | = 300,84 m ² |
| 6) Ruang anggota dewan (25,5 x 17) | = 433,5 m ² |
| 7) Ruang informasi dan pendaftaran | = 29,52 m ² |
| 8) Ruang data/multimedia | = 59,00 m ² |
| 9) Ruang dokumentasi | = 34,00 m ² |
| 10) Ruang perpustakaan | = 54,00 m ² |
| 11) Ruang pengadaan | = 19,25 m ² |
| 12) Ruang pers | = 129,5 m ² |
| 13) Ruang dharma wanita | = 129,5 m ² |
| 14) Ruang distribusi | = 53,15 m ² |

15) Ruang aspirasi	= 129,5 m ²
16) Tangga 1 (43,32 x 2)	= 86,64 m ²
17) Tangga 2 (38,94 x 2)	= 77,88 m ²
18) Tangga	= 57,49 m ²
19) Kantin/cafeteria	= 72,32 m ²
20) Pantry + gudang pantry (17,76 x 2)	= 35,52 m ²
21) Lavatory (32,81 x 2)	= 65,62 m ²
22) Pos jaga	= 9,00 m ²
23) Ruang mekanikal	= 20,00 m ²
24) Ruang istirahat pengemudi	= 31,2 m ²
25) Ruang inventaris/gudang umum	= 30,00 m ²
26) Ruang operator	= 9,00 m ²
27) Selasar	= 227,96 m ²
28) Koridor	= 239,98 m ²
Total luas lantai I	= 2.712,88 m²

b) Lantai II (Dua)

1) Hall/lobbi	= 502,96 m ²
2) Ruang Ketua DPRD	= 39,17 m ²
3) Ruang Sekretariat DPRD	= 30,00 m ²
4) Ruang Wakil Ketua I	= 75,15 m ²
5) Ruang Wakil Ketua II	= 75,15 m ²
6) Ruang Subag. Anggaran dan Pembayaran	= 56,25 m ²
7) Ruang Subag. Pembukuan dan Pelaporan	= 56,25 m ²

8) Ruang Subag. Tata Usaha dan Rumah Tangga = 69,5 m²

9) Ruang Subag. Protokuler = 59,12 m²

10) Ruang Subag. Risalah = 73,5 m²

11) Ruang Subag. Persidangan = 69,5 m²

12) Ruang Pleno/Paripurna = 520,85 m²

13) Ruang Liput (23,5 x 2) = 47,00 m²

14) Ruang Komisi A, B dan C (118,15 x 3) = 354,45 m²

15) Pantry + gudang *pantri* (16,76 x 2) = 33,52 m²

16) Lavatory (32,81 x 2) = 65,62 m²

17) Selasar = 227,96 m²

18) Ruang Panitia Anggaran = 78,87 m²

19) Ruang Panitia Musyawarah = 49,56 m²

20) Koridor = 239,98 m²

Jumlah = **2.724,36 m²**

c) Rekapitulasi Besaran Ruang

1) Lantai I = 2.712,88 m²

2) Lantai II = 2.724,36 m²

Total luas lantai keseluruhan = 5.437,24 m²

Luas lantai pada acuan perancangan adalah 5.434,3516 m²,
sedangkan luas lantai pada laporan perancangan 5.437,24 m²
sehingga:

Deviasi = $\frac{\text{Luas lantai terbangun} - \text{Luas lantai perencanaan}}{\text{Luas lantai perencanaan}} \times 100\%$

Luas lantai perencanaan

$$= \frac{5.437,24 - 5.434,3516}{5.434,3516} \times 100\%$$

$$= 0,053\%$$

Terdapat deviasi sebesar 13 % dari perencanaan semula. Hal

ini terjadi karena adanya penambahan luas lantai serta dimensi modul.

3.2.2 Bentuk dan Penampilan Bangunan

- a) Penerapan bentuk dasar denah bangunan adalah bentuk persegi dengan pertimbangan filosofi bentuk rumah tradisional serta pemanfaatan tapak untuk mendapatkan luas ruang yang optimal.
- b) Penerapan bentuk persegi terutama pada main entrance di maksud untuk menarik kesan akrab dengan masyarakat, agar merasa tidak asing. Disamping itu juga ada kesan berwibawa, hal ini ditampilkan dengan bentuk konstruksi pilar-pilar bangunan dengan bentuk yang besar serta pada area vocal poin ditonjolkan list-list beton yang memberikan kesan yang kokoh.
- c) Penggunaan bentuk-bentuk dasar persegi, dengan permainan bidang antar ruang di tiap lantai dimaksudkan untuk menciptakan satu bentuk yang tidak monoton atau mendukung bentuk bangunan yang dinamis, sistematis serta kreatif.
- d) Penempatan bukaan pada sisi bangunan yang berhadapan dengan jalan dapat memberi kesan terbuka dan ramah serta

mendukung fungsi bangunan sebagai kantor pemerintahan yang mengelolah aspirasi masyarakat.

3.2.3 Sistem Struktur

a) Sub Struktur

Menggunakan pondasi poer sebagai struktur utama karena pertimbangan daya dukung tanah, serta pondasi garis untuk memikul dinding geser yang dapat menambah kekuatan bangunan.

b) Super Struktur

Untuk super struktur menggunakan sistem struktur rangka dengan kolom berukuran 60x60 cm dengan maksud menghindari kesan menoton pada ruang kantor, dan lebih penting mengikuti besaran ruang. Untuk struktur atap menggunakan rangka baja ringan dengan perpaduan bentuk pelana. Pada bagian penutup atapnya menggunakan atap Multiroof dan plat beton dengan alasan pertimbangan fleksibel, tahan terhadap cuaca, dan dalam pelaksanaanya dapat mendukung penampilan bangunan.

3.2.4 Tata Ruang Dalam

Perencanaan pada ruang dalam Gedung DPRD ini menggunakan sistem open layout, kecuali ruangan ketua, wakil ketua, serta kepala bagian. Penggunaan sistem open lay out, pada ruang staf ini dengan maksud untuk memberi kesan keterbukaan

untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, hal ini pula dapat menghindari hal-hal negatif yang biasa terjadi di kantor-kantor pemerintahan, seperti KKN, sogok-menyogok dalam hal pengurusan aspirasi masyarakat pemerintahan.

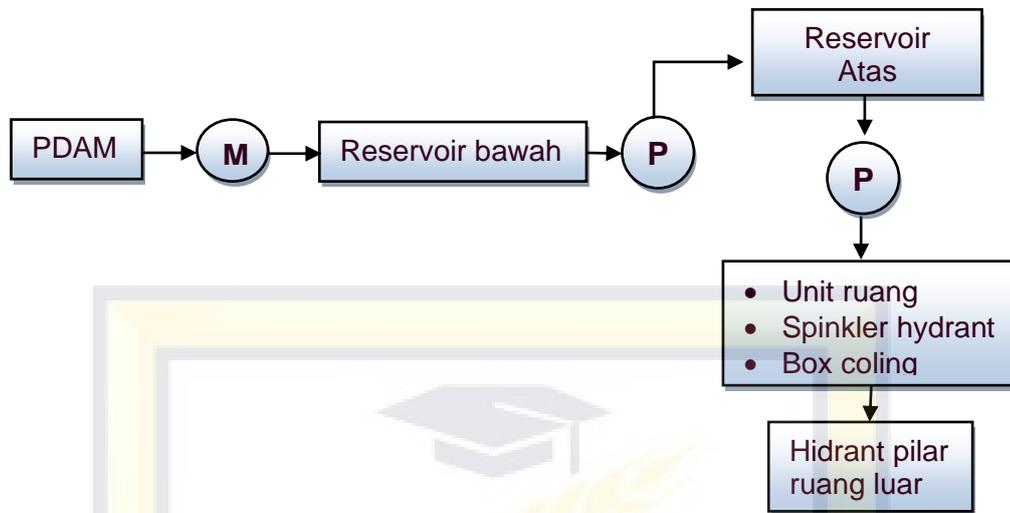
Pada daerah lobi/halaman ruang dalam di tata dengan memberi kesan luas dan terbuka sebagai wujud dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan sekat dinding partisi sebagai pemisah antara ruang kerja dengan ruang publik, antara lantai dasar dan lantai dua terdapat void yang menggunakan stesles sebagai pembatas.

3.2.5 Perlengkapan Bangunan

a) Sistem pengadaan dan distribusi air bersih

Untuk pengadaan dan distribusi air bersih pada bangunan Gedung DPRD ini bersumber dari PDAM dan juga dari sumur artesis yang selanjutnya di alirkan ke bak penampung reservoir bawah kemudian di pompa ke reservoir atas. Setelah itu baru disalurkan ke unit bangunan secara grafitasi.

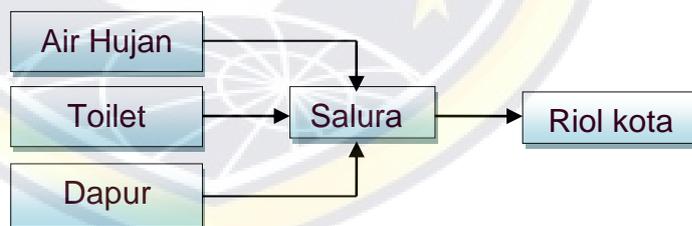
Berikut ini adalah gambaran pendistribusian air bersih melalui skema:



Gambar 3.1 : Skema Sistem Jaringan Air Bersih
(Sumber : Bagus, 2013)

b) Sistem Pembuangan Air Kotor

- 1) Untuk sistem pembuangan air hujan, air kotor dari kamar mandi cucian westafel, disalurkan ke saluran air tertutup dalam bangunan lalu dialirkan melalui saluran riol kota, sementara air kotor yang berminyak dialirkan ke saluran riol kota.



Gambar 3.2 :Skema Sistem Pembuangan Air Kotor, Disposasi Cair
(Sumber : Bagus, 2013)

2) Pembuangan Lavatori terdiri dari:

- (a) Air kamar mandi, dialirkan melalui saluran terbuka dan dibuang bersamaan dan dengan air hujan.

(b) Air bekas buangan WC, dialirkan melalui saluran tertutup ke septictank dan kemudian ke bak resapan.

Berikut ini adalah gambaran skema pembuangan lavatory:

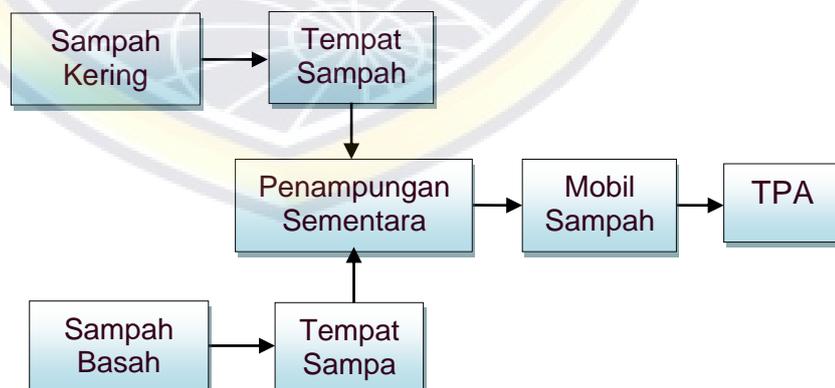


Gambar 3.3 :Skema Sisitem Pembuangan Air kotor, Disposal Padat
(Sumber : Bagus, 2013)

c) Sampah

Sampah seperti kertas karbon, kertas makan, kaleng minuman, dan lain-lain di tampung pada tempat penampungan sementara (TPS) yang selanjutnya di angkut oleh mobil dinas kebersihan untuk dibawah ke tempat pembuangan akhir (TPA) selanjutnya dibakar atau dimusnahkan.

Berikut ini adalah gambaran skema sistim pembuangan sampah:



Gambar 3.4 :Skema Pembuangan Sampah
(Sumber : Bagus, 2013)

d) Pencahayaan

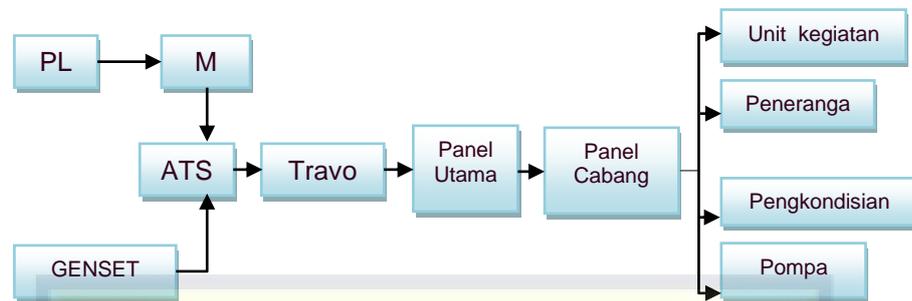
1) Pencahayaan Alami

Pencahayaan alami digunakan semaksimal mungkin seperti pada ruang-ruang pengelolah (staf aspirasi masyarakat) dan pada sisi depan bangunan yang berhadapan langsung dengan jalan. Material yang digunakan berupa kaca transparan. Hal ini dimaksudkan selain pencahayaan alami dan sirkulasi udara juga untuk memberi kesan keterbukaan dan dapat memperhatikan aktifitas yang terjadi dalam bangunan.

2) Pencayahaan Buatan

Pencayahaan buatan bersumber dari PLN sedangkan untuk cadangan menggunakan genset yang di hubungkan dengan alat otomatis alat yaitu Automatik transfer switch (ATS) dimana akan membuat genset bekerja secara otomatis bila aliran listrik PLN terputus listrik dari PLN atau genset ini dihubungkan dengan panel induk kemudian didistribusikan ke panel-panel pada tiap bangunan.

Berikut ini skema pendistribusian pencahayaan buatan pada Gedung DPRD:



Keterangan : M : Meteran
 ATS : *Automatic Transfer Switch*

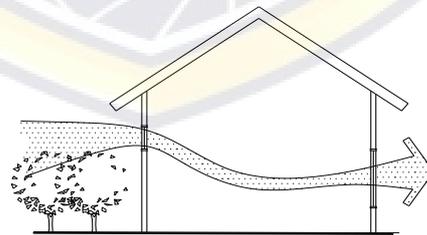
Gambar 3.5 : Pencahayaan Buatan
 (Sumber : Bagus, 2013)

e) Penghawaan

1) Penghawaan alami

Faktor penentu dalam penghawaan alami adalah:

- (a) Pertimbangan akan temperatur udara menyangkut bukaan yang di inginkan.
- (b) Pertimbangan akan kecepatan angin menyangkut perletakaan bukaan pada dinding.
- (c) Pertimbangan akan kelembaban yaitu menyangkut material yang digunakan pada bukaan dinding.



Gambar 3.6 : Penghawaan Alami
 (Sumber : Bagus, 2013)

Dasar perencanaan penghawaan alami adalah memanfaatkan potensi alamiah dengan menggunakan pohon-pohon untuk menanggulangi panas serta kecepatan angin yang dapat ditahan sebaik mungkin.

2) Penghawaan buatan

Penghawaan dalam ruang kerja menggunakan sistem penghawaan buatan yaitu AC split terutama untuk ruang-ruang yang mempunyai aksesibilitas kerja yang tinggi seperti ruang ketua, wakil ketua serta ruang subag.

f) Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi kedalam atau keluar bangunan menggunakan jaringan telepon yang bersumber dari PT TELKOM. Dengan menggunakan sistem PABX sedangkan untuk komunikasi antara ruang dapat dilakukan dengan menggunakan *aiphone* dan *intercome* sementara komunikasi satu arah (pengumuman, pemberitahuan) dapat dilakukan dalam ruang informasi melalui sistem suara dari ruangan operator, begitu pula di tempat lain.

g) Akustik

Untuk mencegah kebisingan dalam ruang digunakan bahan-bahan akustik pada finishing lantai, dinding dan plafon bahan tersebut berupa, panel gypsum, bahan kayu, karpet pada

lantai. Ruang-ruang yang menggunakan bahan akustik diutamakan ruang-ruang seperti ruang sidang, rapat, ruang pola.

h) Pengamanan Bangunan terhadap:

1) Bahaya kebakaran

- (a) Fire alarm sistem atau sistem peringatan kebakaran
- (b) Fire hydrant sebagai sistem pemadam sementara di tempatkan pada luar bangunan.
- (c) Tabung kebakaran yang ditempatkan pada ruang dalam yang rentan terhadap bahaya kebakaran

2) Bahaya kriminal

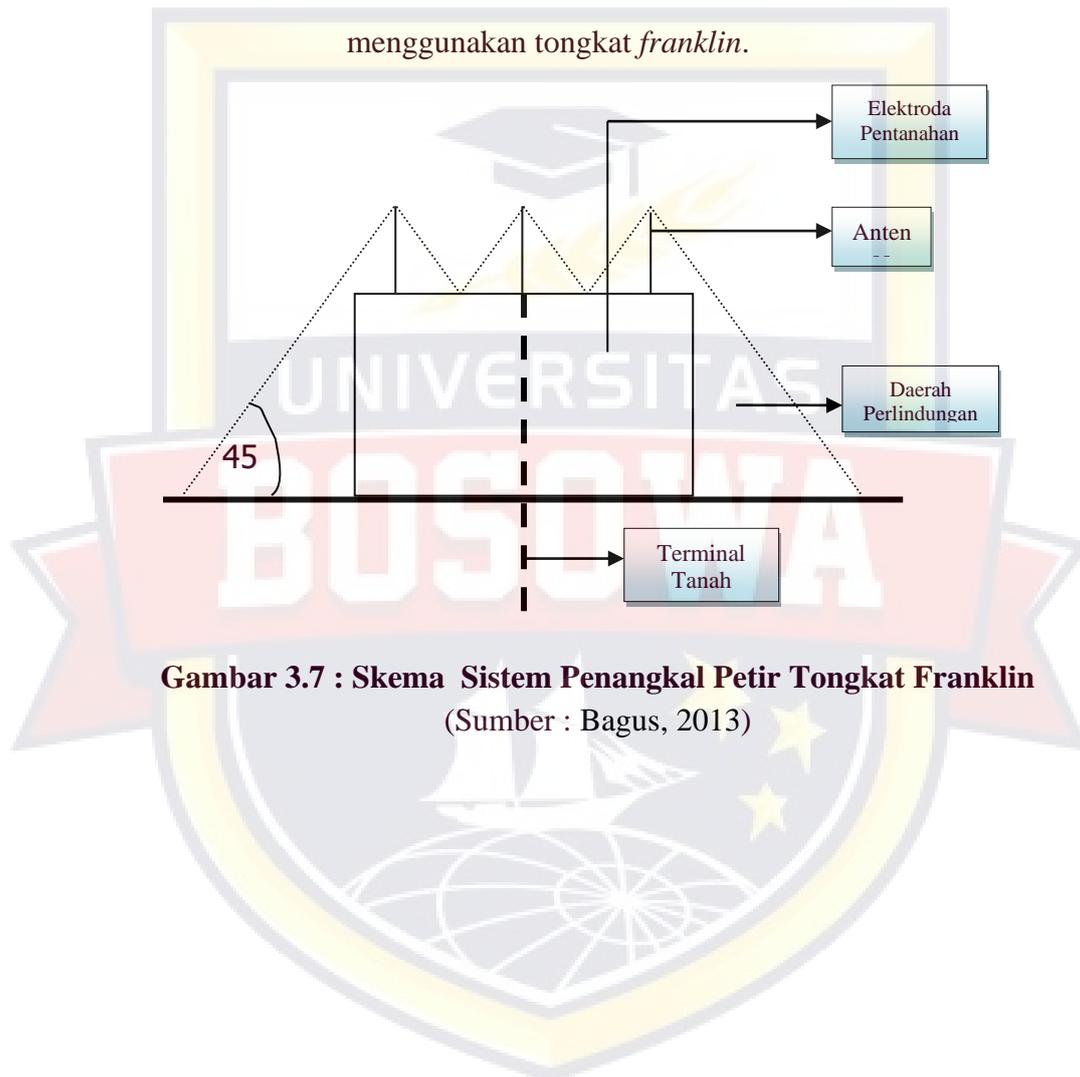
Pencegahan terhadap bahaya kriminalitas dilakukan dengan penyediaan fasilitas pengamatan pencegahan berupa:

- (a) Sistem CCTV, untuk memonitoring segala penjuru bangunan.
- (b) Sistem alarm, di aktifkan untuk melindungi inventaris perkantoran.
- (c) Satuan pengamanan yang bertugas 24 jam.

3) Bahaya petir

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem tongkat *franklin* yaitu dengan terminal udara yang berupa antena. Sistem ini menggunakan batang metal runcing, dan ditempatkan pada bagian tertinggi bangunan

dengan sifat mereduksi medan listrik yang timbul oleh petir (kilat) kemudian di salurkan ke dalam plat tembaga yang berada di dalam tanah. Di bawah ini merupakan gambar sketsa pemasangan sistem penangkal petir dengan menggunakan tongkat *franklin*.



Gambar 3.7 : Skema Sistem Penangkal Petir Tongkat Franklin
(Sumber : Bagus, 2013)

PERHITUNGAN AIR BERSIH

➤ Diketahui :

1. Lusa bangunan = 4.792,35 m²
2. Kebutuhan air bersih = 100 ltr/jam
3. Jumlah pemakai diasumsikan = 350 orang
4. Pemakai terpadat
 - a. Jam 09.00 – 12.00 = 3 jam
 - b. Jam 13.00 – 16.00 = 3 jam

➤ Penyelesaian

Kebutuhan air bersih selama 1 jam

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan air bersih} &= \frac{\text{jumlah pemakai} \times \text{rasiokebutuhan air bersih}}{24 \text{ jam}} \\ &= \frac{350 \times 100}{24 \text{ jam}} \\ &= 1.458 \text{ ltr/jam} \end{aligned}$$

➤ Kebutuhan air bersih terpadat :

Waktu terpadat untuk 6 jam

a. Kebutuhan air bersih pada waktu puncak

$$1,5 \times 6 \times 1.458 = 8.748 \text{ ltr}$$

b. Untuk sirkulasi air diambil 20%

$$20\% \times 8.748 \text{ ltr} = 1.749 \text{ ltr}$$

c. Untuk kebutuhan statia 30%

$$30\% \times 8.748 \text{ ltr} = 2.624 \text{ ltr}$$

Jadi, kapasitas tangki adalah :

$$Q = a + b + c$$

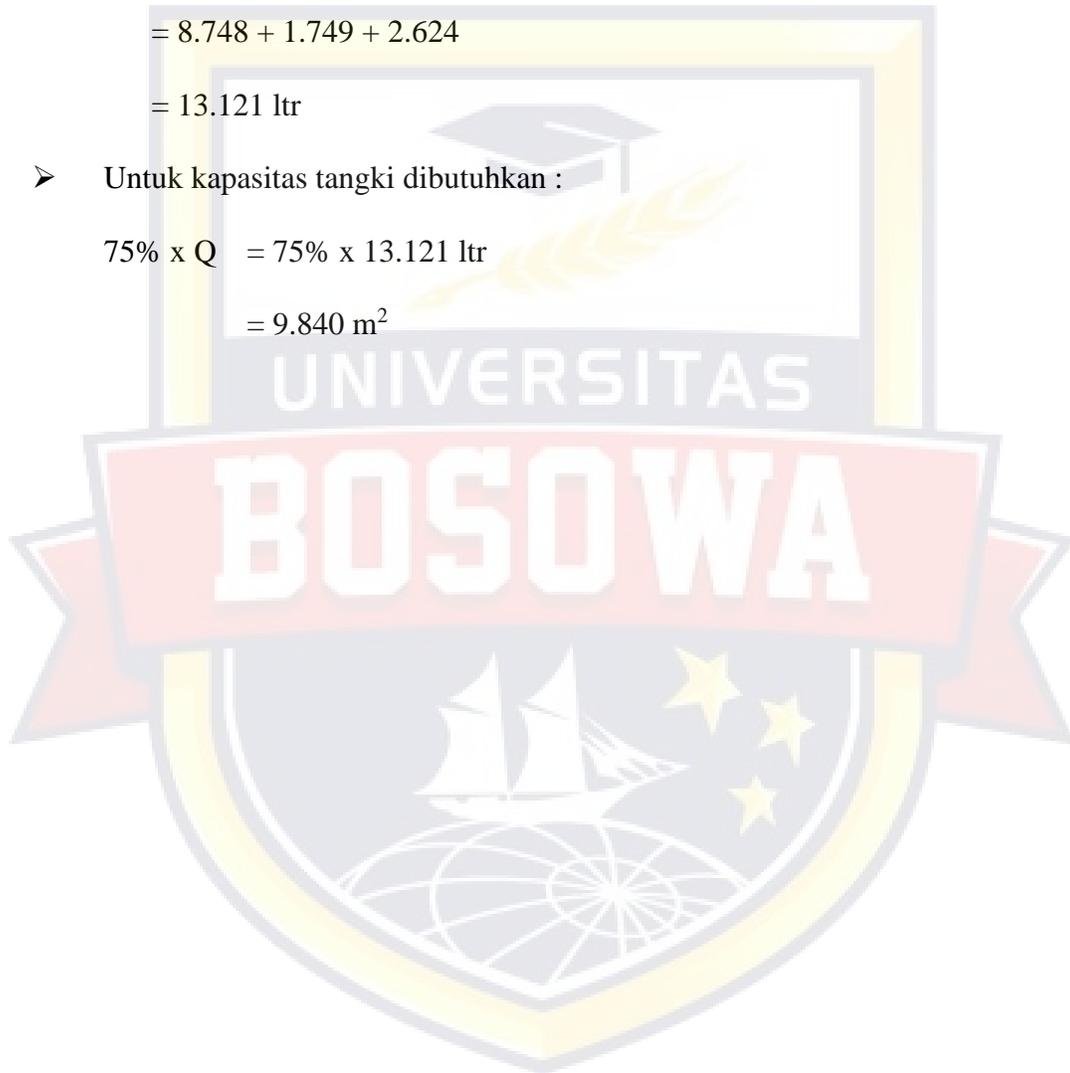
$$= 8.748 + 1.749 + 2.624$$

$$= 13.121 \text{ ltr}$$

➤ Untuk kapasitas tangki dibutuhkan :

$$75\% \times Q = 75\% \times 13.121 \text{ ltr}$$

$$= 9.840 \text{ m}^2$$



DAFTAR PUSTAKA

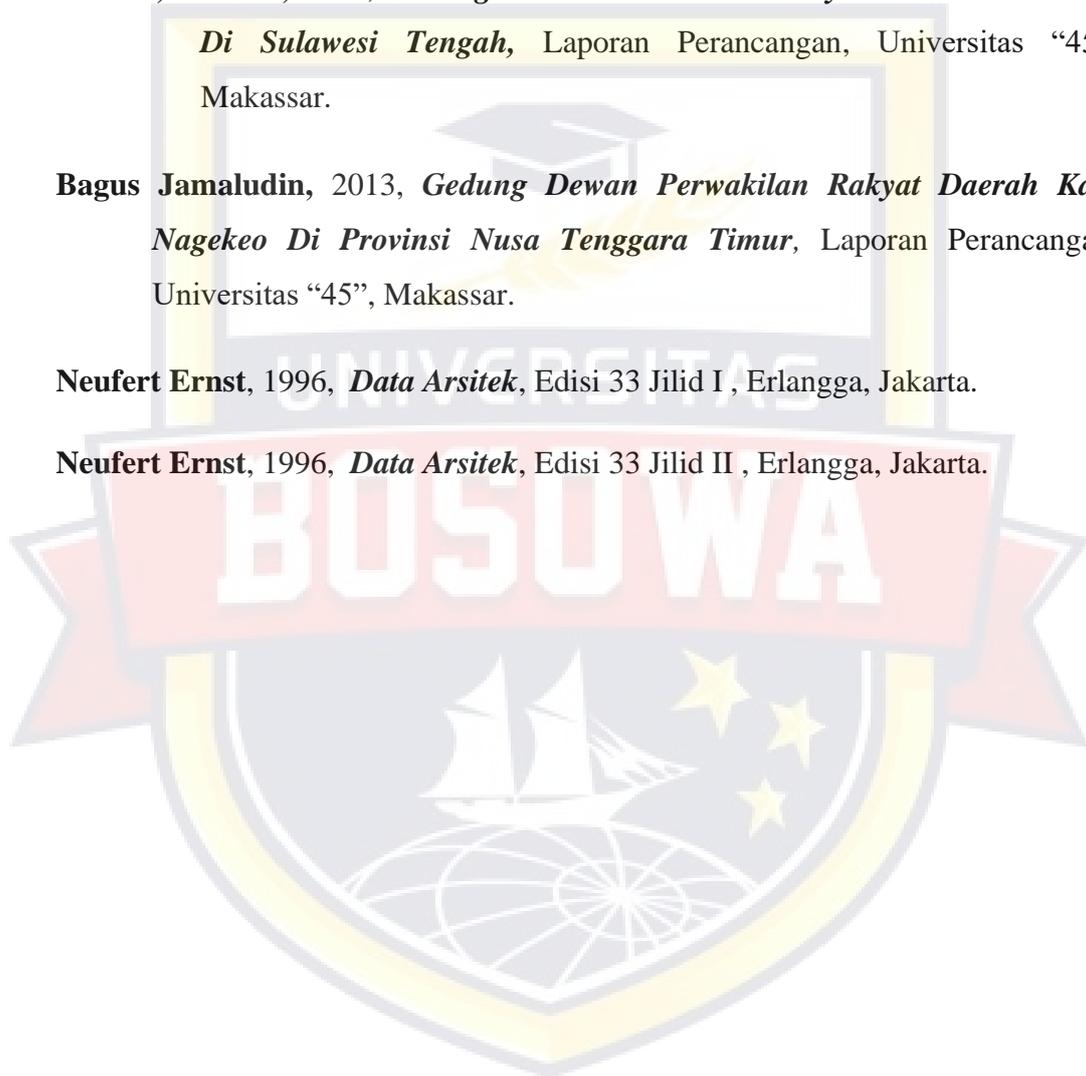
Astina, 2004, *Pembangunan Taman Rekreasi dan Permandian Alam Data'e di Kabupaten Sidrap*, Laporan Perancangan, Universitas "45", Makassar.

Ariflan, Mirdad, 2010, *Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Di Sulawesi Tengah*, Laporan Perancangan, Universitas "45", Makassar.

Bagus Jamaludin, 2013, *Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Laporan Perancangan, Universitas "45", Makassar.

Neufert Ernst, 1996, *Data Arsitek*, Edisi 33 Jilid I , Erlangga, Jakarta.

Neufert Ernst, 1996, *Data Arsitek*, Edisi 33 Jilid II , Erlangga, Jakarta.



KONSEP

PEMILIHAN LOKASI

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku

INPUT

TUJUAN

Untuk menentukan lokasi yang layak, sesuai dengan fungsi bangunan yaitu Gedung DPRD Kab. Buru Selatan

LATAR BELAKANG

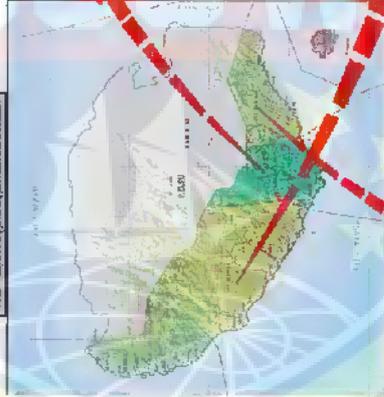
- ◆ Sesuai dengan RUTKK Kab. Buru Selatan
- ◆ Lokasi Gedung DPRD berada di lokasi pemerintahan
- ◆ Topografi
- ◆ Utilitas kota
- ◆ Aspek teknis

KRITERIA

- ◆ Sesuai dengan perencanaan pengembangan wilayah pemerintahan dan pusat pemerintahan
- ◆ Perumahan layak sesuai untuk kawasan pemerintahan
- ◆ Kondisi tanah relatif datar, bebas banjir dan daya dukung tanah cukup baik untuk mendukung bangunan
- ◆ Tersedia jaringan utilitas kota (listrik, telepon, drainase, air bersih)
- ◆ Tersedia jalur transportasi umum dan pribadi

ANALISIS

Peta Wilayah Pengembangan Kab. Buru Selatan



ALTERNATIF 1

- Mempunyai kawasan pemerintahan
- Bebas banjir relatif rendah (dapat ditinjau oleh kondisi alam dan pribadi)
- Lokasi tanah relatif datar dan daya dukung tanah cukup baik terhadap bangunan
- Tersedia jaringan utilitas kota (listrik, telepon, drainase dan air bersih)

ALTERNATIF 2

- Mempunyai kawasan pemerintahan
- Bebas banjir relatif rendah (dapat ditinjau oleh kondisi alam dan pribadi)
- Lokasi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang baik terhadap bangunan (dapat ditinjau oleh kondisi alam dan pribadi)
- Tersedia jaringan utilitas kota (listrik, telepon, drainase dan air bersih)

ALTERNATIF 3

- Mempunyai kawasan pemerintahan
- Bebas banjir relatif rendah (dapat ditinjau oleh kondisi alam dan pribadi)
- Lokasi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang baik terhadap bangunan (dapat ditinjau oleh kondisi alam dan pribadi)
- Tersedia jaringan utilitas kota (listrik, telepon, drainase dan air bersih)

OUTPUT

No	Kriteria	Alt. I	Alt. II	Alt. III
1.	Mempunyai kawasan pemerintahan (RUTKK)	4	4	4
2.	Dapat dilalui transportasi umum dan transportasi pribadi	4	4	4
3.	Kondisi topografi	4	3	3
4.	Tersedia jaringan utilitas kota	4	4	4
Jumlah		16	15	15



JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNW. BOSOWA MAKASSAR

UJIAN SARJANA
PERIODE XXIV
SEMESTER GANJIL
2015-2016

DOSEN PEMBIMBING
1. DR. SHERLY ASRIANY, ST, MT
2. SYAMSUDDIN MUSTAFA, ST, MT

NAMA / STAMBUK
LUKMAN SYAHID WASOLO
48 09 043 024

GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE,
KAB. BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

NAMA GAMBAR
KONSEP
PEMILIHAN LOKASI

SKALA
MD. LBR
02

KODE GBR
32

KETERANGAN

KONSEP

PEMILIHAN SITE

Gedung DPRD Kota Mamrele, Kab. Bura Selatan, Provinsi Maluku

TINJAUAN

TUJUAN
Untuk mendapatkan site yang sesuai dengan tingkat bangray yaitu Gedung DPRD Kota Bura Selatan

DAFTAR PERTIMBANGAN

- Luas site
- Kondisi topografi
- Jamangan utilitas kota
- Sarana transportasi

KRITERIA

- Luas lahan sebesar 0,8 Ha (suaai Pertimbangan)
- Kondisi topografi dikawasin pertambahan cukup baik
- Tersedia jamangan utilitas kota
- Dilaku oleh jalur transportasi

ANALISIS

Peta Kota Mamrele



- ALTERNATIF 1**
- Luas lahan sebesar 1,5 Ha untuk pertambahan gedung DPRD yang berdekatan kawasan pertamanan
 - Kondisi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang cukup baik
 - Dilaku jalur transportasi umum dan busway pribadi
 - Tersedia jamangan utilitas kota



- ALTERNATIF 2**
- Luas lahan sebesar 1,2 Ha untuk berdekatan kawasan pertamanan
 - Kondisi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang cukup baik
 - Dilaku jalur transportasi umum dan busway pribadi
 - Tersedia jamangan utilitas kota



OUTPUT

No	Kriteria Site	Atr. I	Atr. II
1.	Luas lahan	4	3
2.	Kondisi topografi dikawasin pertambahan cukup baik	4	3
3.	Tersedia jamangan utilitas kota	4	4
4.	Dilaku oleh jalur transportasi	4	4
Jumlah		(16)	14



 JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIV. BOSOWA MAKASSAR	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANY, ST., MT 2. SYAMSUDDIN MUSTAFA, ST., MT	NAMA / STAMBUK LUMIRAN SYAHID WASOLO 46 69 943 004	GEDUNG DPRD KOTA NAMRODI E, KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KIRKRP PEMILIHAN SITE	SKALA 03	JML. LBR 32	KODE GBR	KETERANGAN
	UJIAN SARJANA PERIODE AKHIR SEMESTER GAJUL 2015-2016	JURAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIV. BOSOWA MAKASSAR	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANY, ST., MT 2. SYAMSUDDIN MUSTAFA, ST., MT	GEDUNG DPRD KOTA NAMRODI E, KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KIRKRP PEMILIHAN SITE	SKALA 03	JML. LBR 32	KODE GBR

KONSER

PENGOLAHAN SITE

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku

INPUT

TUJUAN

Untuk menghasilkan bagian site secara maksimal yang sesuai dengan peraturan Gedung DPRD Kab. Buru Selatan

DAFTAR PERTIMBANGAN

- ◊ Orientasi matahari dan angin
- ◊ Moods
- ◊ View
- ◊ Iklim dan Topografi
- ◊ Sirkulasi
- ◊ Pencapaian

KRITERIA

- ◊ Lusi site mampu menunjang aktifitas dalam maupun luar bangunan
- ◊ Kondisi topografi yang dapat mendukung nilai estetika pada bangunan Gedung DPRD
- ◊ devesop pertanahan
- ◊ Sirkulasi dalam dan luar site
- ◊ Utilitas kota yang memadai

ANALISIS

1. Analisis Persebaran Bangunan
 Persebaran bangunan yang baik adalah yang tersebar merata di seluruh site. Hal ini akan memberikan sirkulasi udara yang baik dan pemandangan yang indah.

2. Analisis Sirkulasi
 Sirkulasi yang baik adalah yang memudahkan akses ke seluruh bagian site. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni.

3. Analisis Orientasi
 Orientasi yang baik adalah yang memudahkan akses ke seluruh bagian site. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni.

4. Analisis View
 View yang baik adalah yang memudahkan akses ke seluruh bagian site. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni.

5. Analisis Iklim
 Iklim yang baik adalah yang memudahkan akses ke seluruh bagian site. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni.

6. Analisis Topografi
 Topografi yang baik adalah yang memudahkan akses ke seluruh bagian site. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang baik bagi penghuni.

OUTPUT

Jalan masuk masuk
 Area parkir
 Area terbuka
 Area tertutup

Area parkir
 Area terbuka
 Area tertutup

Area terbuka
 Area tertutup

 JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIV. BOSOWA MAKASSAR	UJIAN SARJANA PERIODE AKHIR SEMESTER GANJIL 2015/2016	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANY, ST., MT 2. SYAMSUDDIN MUSTAKFA, ST., MT	PAKMA / STAMBUK LUKMAN SYAHID WASOLO 45 09 943 034	GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KONSER PEMILIHAN SITE	SKALA 1:1000	KO. LBR 04	JML. LBR 32	KODE GBR 04	KETERANGAN 04
---	---	--	---	---	--	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

KONSEP

POLA PROGRAM RUANG

Gedung DPRD Kota Narrolo, Kab. Bura Selatan, Provinsi Maluku

INPUT

TUJUAN
Untuk mendapatkan pola hibridan ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik kegiatan yang akan berlangsung

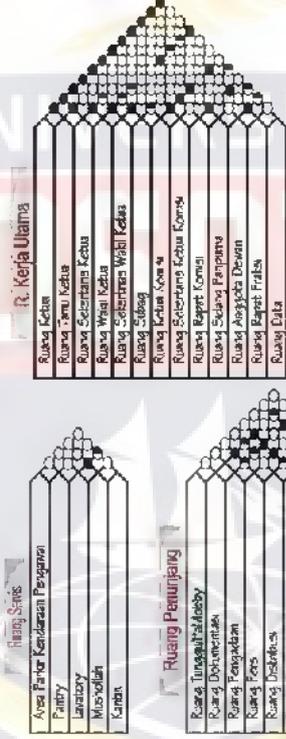
DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Kelompok ruang
- ◆ Jenis ruang
- ◆ Pengelompokan ruang
- ◆ Penyediaan ruang
- ◆ Hibridan ruang
- ◆ Pola sirkulasi

KRITERIA

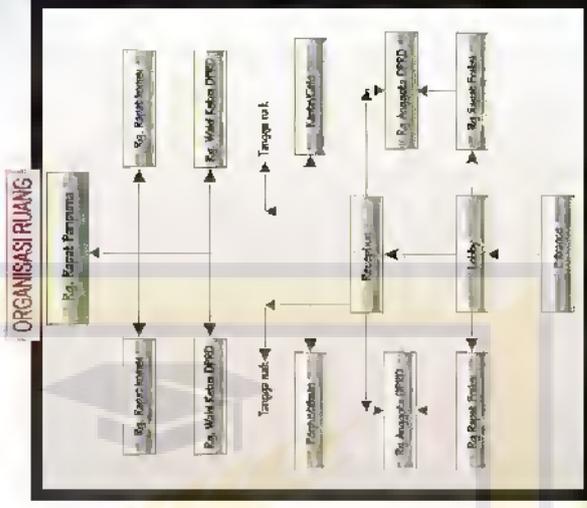
- ◆ Aksesibilitas
- ◆ Sesuai kelompok ruang
- ◆ Hibridan antar ruang

ANALISIS

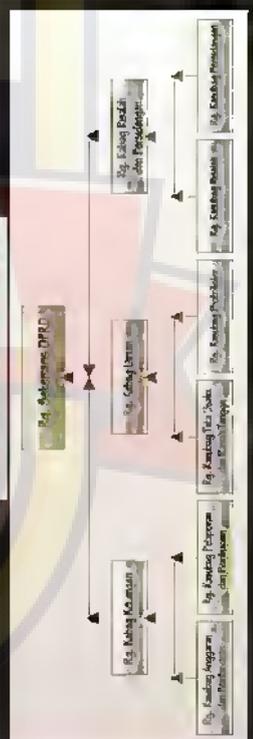


KETERANGAN:
 ● Hibridan Ent
 ○ Hibridan Kurang Ent
 ○ Tidak Ada Hibridan

OUTPUT



ORGANISASI KESEKERTARIAN DEWAN



JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIV. BOSOWA MAKASSAR

UJIAN SARJANA
 PERIODE XXXIV
 SEMESTER GANJIL
 2015-2016

DOSEN PEMBIMBING

1. DR. SHERLY ASRIYANI, ST., MT
2. SYAMSUDDIN IMMISTAPA, ST., MT

NAMA / STAMBUK

LUKMAN SYAHID WASOLO
 45 08 043 034

GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE,
 KAB. BURU SELATAN
 PROVINSI MALUKU

NAMA GAMBUJAR
 KONSEP
 POLA PROGRAM RUANG

SKALA

05

NO. LBR

32

JML. LBR

KODE GER

KETERANGAN

KONSEP

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku

SISTIM STRUKTUR DAN MATERIAL



TUJUAN

- Untuk mendapatkan sistem struktur yang dapat menahan muatan bangunan yang efisien dengan beban yang diterima

DAFTAR PERTIMBANGAN

- Bentuk bangunan
- Kondisi lingkungan

KRITERIA

- Bangunan harus bertingkat dua
- Keseluruhan tanah difiksasi satu dan sekiranya cukup luas
- Bahan mudah diperoleh

Sub Struktur Perlet

Pondasi perlet digunakan pada struktur utama dan seruan pendukung kolom, dan baut menahan beban dan pelaksanaan cepat.

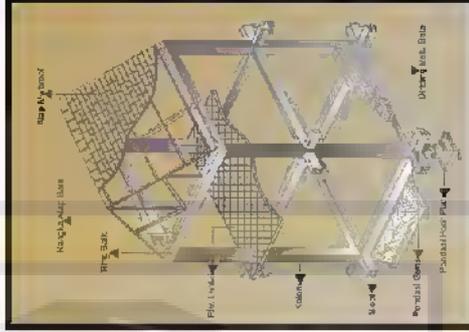
Printed Gaps

Digunakan pada bangunan sederhana, luar menahan beban dan ekonomis

Super Struktur

Dimengerti sebagai

Cocok digunakan untuk semua bangunan, pengerjaannya mudah dan sangat permanen



Upper Struktur

Digunakan pada bangunan bertingkat lebih dari satu dan digunakan untuk menyebarkan gaya yang bekerja pada bangunan

Rangka Baja

Rangka baja digunakan pada struktur bertingkat lebar

1. Elemen struktur menggunakan pondasi dan pondasi rakit
2. Sistem struktur menggunakan struktur rangka beton
3. Upper struktur menggunakan rangka baja dan atap plat

	JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNY. BOSOWA MAKASSAR	UJIAN SARJANA PERIODE XXIV SEMESTER GANJIL 2016/2017	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ABRANY, ST., MT 2. SYAMBUDDIN MUSTAFA, ST., MT	NAMA / STAMBUK LUKMAN SYAHID WASOLO JA.19.063.013	GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KONSEP SISTEM STRUKTUR	SKALA	NO. LBR	JML. LBR	KODE GBR	KETERANGAN
						06	32				

KONSEP

SISTIM UTILITAS

Gedung DPRD Kota Mamrole, Kab. Bunu Selatan, Provinsi Maluku

INPUT

- TUJUAN**
 - Untuk membuat bar sistem jaringan id bus dan pertengahan bangunan yang dapat menunjang aktivitas dalam bangunan
- DASAR PERTIMBANGAN**
 - Kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaan
 - Kecocokan sistem jaringan
 - Kemampuan terhadap resiko seadanya dan lingkungan sekitarnya
- KRITERIA**
 - Jaringan listrik (elektronik)
 - Jaringan air bersih
 - Jaringan komunikasi (kabel)
 - Jaringan air kotor
 - Pengaliran
 - Pencatupan
 - Kemamanan
 - Sempah
 - AtasRisk

ANALISIS

Jaringan Listrik

Jaringan Air Bersih

Jaringan Komunikasi

- Untuk komunikasi antar ruangan dan antar gedung
- Untuk komunikasi dengan jaringan luar gedung
- Untuk komunikasi antar gedung

Jaringan Pengaliran

- Pengaliran limbah ke saluran
- Pengaliran limbah ke saluran
- Pengaliran limbah ke saluran

Jaringan Pencatupan

- Pencatupan atap gedung
- Pencatupan atap gedung
- Pencatupan atap gedung

Jaringan Sempah

OUTPUT

Jaringan Pemukiman

- Untuk pemukiman di sekitar gedung
- Untuk pemukiman di sekitar gedung
- Untuk pemukiman di sekitar gedung

Pasokan Air

Sistem air yang harus di pasokkan ke gedung dan sekitarnya untuk keperluan sehari-hari.

Musnah

Untuk musnah di sekitar gedung

	JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIV. BOSOWA MAKASSAR	UJIAN SARJANA PERIODE KOGNITIF BENEKTER GAMJOL 2016-2016	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANTY, ST., MT 2. SYAMSUDDIN MUSTAFA, ST., MT	NAMA / STAMBEUK LUKMAN SYAFID WANSOLO 45 00 043 034	GEDUNG DPRD KOTA MAMROLE, KAB. BUNU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KONSEP SISTEM UTILITAS	SKALA	NO. LBR	JML. LBR	KODE GBR	KETERANGAN
									07	32	

KONSEP

TATA RUANG DALAM

Gedung DPRD Kota Mamvale, Kab. Barru Selatan, Provinsi Maluku

INPUT

TUJUAN

perubahan ruang dalam pada dasarnya merupakan usaha untuk meningkatkan pemanfaatan sehingga dapat menunjang aktivitas yang ada dalam bangunan serta dapat menunjang fungsi ruang secara keseluruhan

DAFTAR PERTIMBANGAN

- Material yang digunakan
- Fungsi material
- Perencanaan dalam desain interior
- Estetika

ANALISIS

Lantai

Keramik Digunakan pada ruang kerja lobby DPRD, Wakil ketua DPRD, Kepala Dewan dan Subang

Gres Digunakan pada area publik seperti hall, entrance dan area pelayanan

Gresit Digunakan pada ruang-ruang seperti empokan, KAMC, library, gudang dll

Marmar Marmar digunakan pada ruang-ruang yang sifatnya service dan privat

Dinding

Batu Bata Digunakan pada bagian dinding kor dan dalam bangunan

Dipintal dinding digunakan pada ruang dalam

Keramik digunakan pada area service seperti WC dan lobby

Plafond

Gypsum Digunakan pada ruang kerja dan ruang rapat

Tekawood Digunakan pada ruang ketua DPRD

Tekawood Digunakan pada ruangan penunjang, hall, KAMC dan gudang

OUTPUT

Ditembakkan pada desain fisik



RUANG TAMU KETUA DPRD

RUANG KETUA DPRD

MATERI ANGGUN

Dinding Digunakan pada ruang-ruang rapat untuk menyerap bunyi

Plafond Kegiatan untuk menyerap bunyi di dalam ruang rapat

Karpet Digunakan pada ruang-ruang rapat untuk menyerap bunyi

Lantai Linye Bies Digunakan pada ruang-ruang rapat

 JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIV. BOSOWA MAKASSAR	UJIAN SARJANA PERIODE XXXIV SEMESTER GANJIL 2015-2016	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIYAH, ST., MT 2. SYA MUDDIN MUSTAFA, ST., MT 45 09 013 854	NAMA / STAMBUK LUKMAN SYAID WABSOLO 45 09 013 854	GEDUNG DPRD KOTA MAMTROLE KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KONSEP TATA RUANG DALAM	SKALA 1:100	NO. LBR D8	JML. LBR 32	KODE GBR 01	KETERANGAN
---	---	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

KONSEP

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Bura Selatan, Provinsi Maluku

TATA RUANG LUAR

INPUT

TUJUAN
 Untuk mendapatkan tata ruang luar yang mencerminkan fungsi bangunan dan juga sebagai sarana penunjang outdoor sebagai elemen identitas bangunan dan mengidentifikasi suasana berair, sejuk dan tenang

BASIS PERTUMBUHAN

- Soft material
- Hard material
- Jalur pedestrian
- Estetika

KRITERIA

- Jenis dan fungsi vegetasi
- Pola sirkulasi dan pencahayaan
- Manfaat dan kenyamanan
- Penampilan dan estetika

ANALISIS

Soft Material

Kemiri Pagar
 C. Sebagai penghambat angin dan filter partikulat
 C. Menghasilkan umbra
 Perawatan:
 C. Sempang pemeliharaan tidak teratur dan jarang kompleks

Palm Raja

C. Udar esotetika, pengarahannya dalam pencahayaan jalur
 C. Pembentukan tala hulu
 Perawatan:
 C. Sempang pemeliharaan tidak teratur dan jarang kompleks

Bamboo Hut

Pangkal :
 C. Sebagai pemisah antar estetika
 C. Sebagai pembatas fisik
 C. Sebagai pengarah kawasan
 Perawatan:
 C. Diperpanjang pemeliharaan fisik

RUMPUT MANILA

Pangkal :
 C. Sebagai pemisah antar estetika
 C. Sebagai pembatas fisik
 C. Sebagai pengarah kawasan
 Perawatan:
 C. Sempang pemeliharaan tidak teratur dan jarang kompleks

Hard Material

RABAT BETON

Rabat beton diperlukan untuk sekat

PAVING BLOCK

Paving block sebagai penyempurnaan

LAMPU TANAMAN

Lampu tanam sebagai pencahayaan pada area parkir dan taman pada malam hari

Street Furniture

PENGASPALAN

Jalan lebar rusak lebar untuk menyatukan material padat

PAVING BLOCK

Modulan dan jalur untuk mengatur paving block



Pengaspalan diperlukan yang menjadi dasar jalan yang lebar rusak lebar untuk menyatukan material padat dan pada area parkir



JURUSAN ARSITEKTUR
 FAKULTAS TEKNIK
 UNTU BOSOWA MAKASSAR

UJIAN SARJANA
 PERIODE XXIV
 SEMESTER GANJIL
 2015-2016

DOSEN PEMBIMBING
 NAMA / STAMBUK
 LUKMAN SYAHID WASOLO
 BP 09 043 034

GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE
 KAB. BURU SELATAN
 PROVINSI MALUKU

NAMA GAMBAR
 KONSEP
 TATA RUANG LUAR

NO. LBR
 NO. LBR
 09

JML. LBR
 32

KODE GBR
 KETERANGAN

KONSEP

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Bunu Selatan, Provinsi Maluku

SISTEM SIRKULASI

INPUT

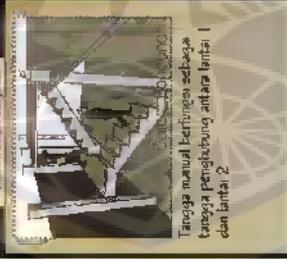
TUJUAN

Untuk menentukan pola pergerakan sekor, sehingga yang baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan atau sehingga, sirkulasi barok

DASAR PERTIMBANGAN

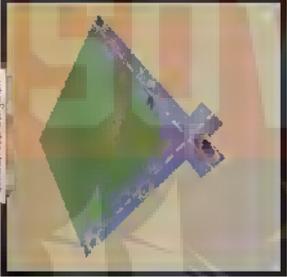
- ◆ Jenis dan bentuk kegiatan
- ◆ Kelembukan pemukiman
- ◆ Tingkat temperatur ruang
- ◆ Sifat dan karakter kegiatan
- ◆ Efisiensi ruang
- ◆ Sirkulasi di dalam bangunan
- ◆ Sirkulasi di luar bangunan
- ◆ Sirkulasi kendaraan

Sirkulasi Dalam Bangunan



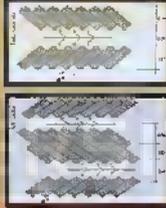
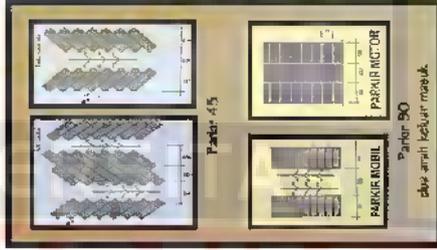
Tangga manual berfungsi sebagai sarana penghubung antara lantai 1 dan lantai 2

Sirkulasi Luar Bangunan

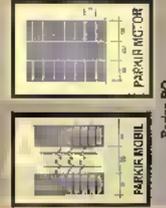


Cenderung digunakan sebagai akses untuk menuju ke unit-unit ruang

ANALISIS



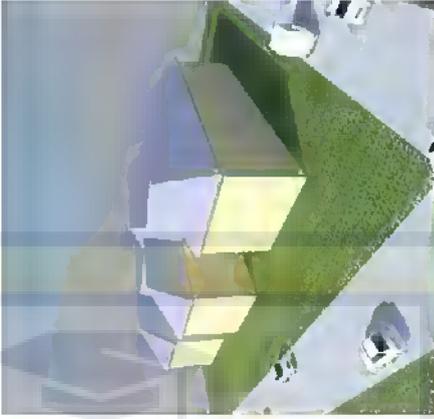
Parkir 45



Parkir 90

dan arah keluar masuk

OUTPUT



 <p>JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNYI, BOSOWA MAKASSAR</p>	<p>UJIAN SARJANA PERIODE XXXIV SEMESTER GANJIL 2015-2016</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANY, ST., MT 2. SYANSUDDIN MUSTAFA, ST., MT</p>	<p>NAMA, STAMBUK LUKMAN SYAHID WASOLO 15 05 013 031</p>	<p>GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KAB. BUNU SELATAN, PROVINSI MALUKU</p>	<p>NAMA GAMBAR KONSEP SISTEM SIRKULASI</p>	<p>SKALA</p>	<p>NO. LBR 10</p>	<p>JML LBR 32</p>	<p>KODE GER KETERANGAN</p>
	<p>JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNYI, BOSOWA MAKASSAR</p>	<p>UJIAN SARJANA PERIODE XXXIV SEMESTER GANJIL 2015-2016</p>	<p>DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIANY, ST., MT 2. SYANSUDDIN MUSTAFA, ST., MT</p>	<p>NAMA, STAMBUK LUKMAN SYAHID WASOLO 15 05 013 031</p>	<p>GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KAB. BUNU SELATAN, PROVINSI MALUKU</p>	<p>NAMA GAMBAR KONSEP SISTEM SIRKULASI</p>	<p>SKALA</p>	<p>NO. LBR 10</p>	<p>JML LBR 32</p>

KONSEP

PENAMPILAN BENTUK

Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku.

INPUT

TUJUAN

Untuk mendapatkan bentuk visual yang sesuai dengan konsep fungsi dan budaya yang ada, dari lesan verbal atau Gedung DPRD yang bentuknya sudah baik terencana baik.

DAFTAR PERTIMBANGAN

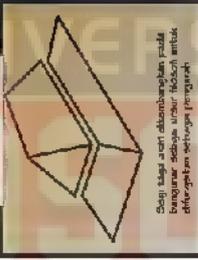
- ◆ Tinggi bangunan
- ◆ Bentuk
- ◆ Atributnya
- ◆ Penempatan ruang

KRITERIA

- ◆ Sesuai dengan fungsi bangunan
- ◆ Falsafah bentuk
- ◆ Menonjolkan bentuk
- ◆ Efektifitas dalam bangunan
- ◆ Efektifitas pemanfaatan bangunan

OUTPUT

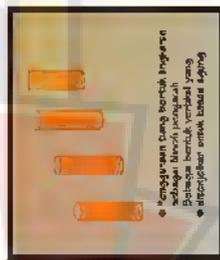
1. Transformasi Rasio/Bentuk



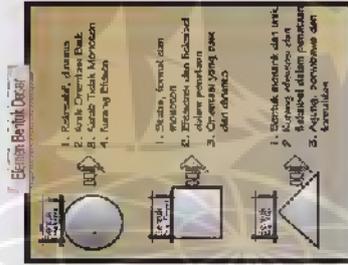
Desain juga akan dikembangkan pada bangunan sebagai unsur-unsur untuk meningkatkan daya tarik bangunan.



Bentuk desain menggunakan dan memanfaatkan bentuk-bentuk yang ada yang menggunakan bentuk yang terinspirasi.



◆ Mengaplikasikan konsep bentuk bangunan sebagai bentuk yang ada sebagai bentuk vertikal yang terinspirasi untuk bentuk yang ada.



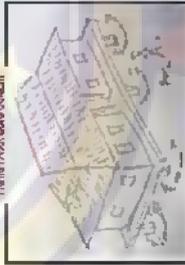
2. Evolusi Bentuk Desain

1. Identifikasi, dan analisis
2. Studi, dan analisis
3. Konsep, dan analisis
4. Konsep, dan analisis

1. Skema, bentuk dan analisis
2. Konsep, dan analisis
3. Konsep, dan analisis
4. Konsep, dan analisis

1. Bentuk, struktur dan analisis
2. Konsep, dan analisis
3. Konsep, dan analisis
4. Konsep, dan analisis

3. Rona Arsitektural



Selanjutnya akan dilakukan dan dilakukan untuk lebih lanjut akan dilakukan pada desain ini (Gedung DPRD Kota Namrole, Kab. Buru Selatan).



DIKEMBANGKAN PADA DESAIN FISIK

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNY. BOSONWA MAKASSAR	UJIAN SARJANA/ PERIODE XXXIV SEMESTER GANJIL 2015/2016	DOSEN PEMBIMBING 1. DR. SHERLY ASRIYANTI, ST., MT 2. SYAHMUDIN MUBTAKAFA, ST., MT	NAMA / STAMBUK LUHMANN SYAHID WASOLO 45 69 043 934	GEDUNG DPRD KOTA NAMROLE, KAB. BURU SELATAN PROVINSI MALUKU	NAMA GAMBAR KONSEP PERAMPILAN BENTUK	SKALA	NO. LBR	JML. LBR	KODE GBR	KETERANGAN	
							11	32			

KONSEP PEMILIHAN LOKASI

INPUT

ANALISIS

OUT-PUT

TUJUAN

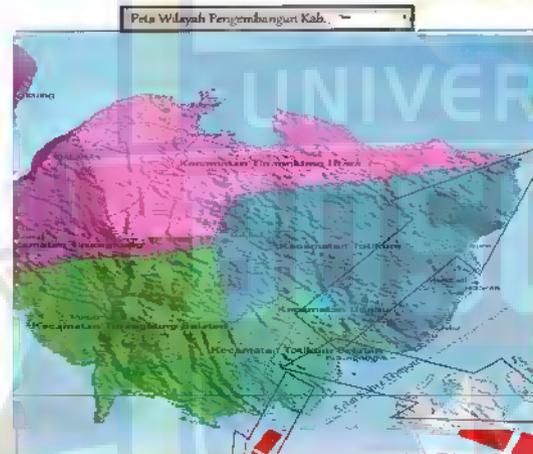
Untuk menentukan lokasi yang tepat sesuai dengan fungsi bangunan yakni Gedung DPRD Kab Banggai-Laut

LATAR BELAKANG

- ◆ Sesuai dengan RUTRK Kab. Banggai Laut
- ◆ Lokasi Gedung DPRD berada di lokasi perkantoran
- ◆ Topografi
- ◆ Utilitas kota
- ◆ Aksesibilitas

KRITERIA

- ◆ Sesuai dengan perencanaan pengembangan wilayah perkantoran dan pusat pemintah
- ◆ peruntukan lahan sesuai untuk kawasan perkantoran
- ◆ Kondisi tanah relatif datar, bebas banjir dan daya dukung tanah cukup baik untuk mendukung bangunan
- ◆ Tersedia jangnan utilitas kota (listrik, telepon, drainase, air bersih)
- ◆ Tersedia jalur transportasi umum dan pribadi



ALTERNATIF I

- ☉ Merupakan kawasan perkantoran
- ☉ Akses ke lokasi sangat mudah (dapat dilalui oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi)
- ☉ Lokasi tanah relatif datar dan daya dukung tanah cukup baik terhadap bangunan
- ☉ Tersedianya jangnan utilitas kota (listrik, telepon, drainase dan air bersih)

- ☉ Merupakan kawasan perkantoran
- ☉ Akses ke lokasi sangat mudah (dapat ditinjau oleh kendaraan umum dan pribadi)
- ☉ Lokasi tanah relatif datar dan didukung tanah yang tidak mendukung terhadap bangunan (daerah pengunungan)
- ☉ Tersedia jangnan utilitas kota (hanya terdapat saluran drainase dan listrik)

ALTERNATIF II

- ☉ Merupakan kawasan perkantoran
- ☉ Akses ke lokasi sangat mudah (dapat ditinjau oleh kendaraan umum dan pribadi)
- ☉ Lokasi tanah relatif datar dan didukung tanah yang tidak mendukung terhadap bangunan (daerah pengunungan)
- ☉ Tersedia jangnan utilitas kota (hanya terdapat saluran drainase dan listrik)

No.	Kriteria	Alt. I	Alt. II	Alt. III
1.	Merupakan kawasan perkantoran (RUTRK)	4	4	4
2.	Dapat dilalui transportasi umum dan transportasi pribadi	4	4	4
3.	Kondisi topografi	4	3	3
4.	Tersedia jangnan utilitas kota	4	4	4
Jumlah		16	15	15



KONSEP Pemilihan site

INPUT

TUJUAN
Untuk mendapatkan site yang sesuai dengan fungsi bangunan yakni Gedung DPRD Kab. Banggai Laut.

DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Luas site
- ◆ Kondisi topografi
- ◆ Jaringan utilitas kota
- ◆ Sarana transportasi

KRITERIA

- ◆ Luas lahan sebesar 0,8 Ha (Acuan Perancangan)
- ◆ Kondisi topografi dikawasan perkantoran cukup baik
- ◆ Tersedia jaringan utilitas kota
- ◆ Dilalui oleh jalur transportasi

ANALISIS

Banggai Laut




ALTERNATIF I

- Luas lahan sebesar 1,5 Ha untuk pembangunan gedung DPRD yang terletak dikawasan perkantoran
- Kondisi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang cukup baik
- Dilalui jalur transportasi umum dan kendaraan pribadi
- Tersedia jaringan utilitas kota



ALTERNATIF II

- Luas lahan sebesar 1,2 Ha tidak terletak dikawasan perkantoran
- Kondisi tanah relatif datar dan daya dukung tanah yang cukup baik
- Dilalui jalur transportasi umum dan kendaraan pribadi
- Tersedia jaringan utilitas kota



OUTPUT

No.	Kriteria Site	Alt. I	Alt. II
1.	Luas lahan	4	3
2.	Kondisi topografi dikawasan perkantoran cukup baik	4	3
3.	Tersedia jaringan utilitas kota	4	4
4.	Dilalui oleh jalur transportasi	4	4
Jumlah		(16)	14




UNIVERSITAS
BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR

IJIAN SARIJANA
SEMESTER GENAP
2019/2019

DOSEN PEMBIMBING
SATRIANI LATIEE, ST, MT
LISA AMALIA, ST, MT

NAMA / STAMBUK
MUF FIRMANSYAH SALIM
45 12 043 009

JUDUL
GEDUNG KANTOR DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

GAMBAR
PEMILIHAN SITE

SKALA
NO. LBR 03
JML LBR 32
KET.

KONSEP PENAMPILAN BENTUK

INPUT

TUJUAN

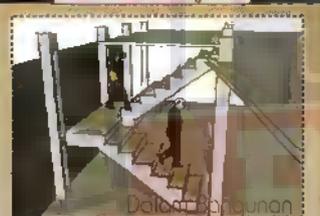
Untuk menentukan pola pengaturan sistem sirkulasi yang baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan atau sirkulasi disekitar tapak

DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Jenis dan bentuk kegiatan
- ◆ Kelompok pemakai
- ◆ Tingkat hubungan ruang
- ◆ Sifat dan karakter kegiatan
- ◆ Efisiensi ruang
- ◆ Sirkulasi di dalam bangunan
- ◆ Sirkulasi di luar bangunan
- ◆ Sirkulasi kendaraan

ANALISIS

Sirkulasi Dalam Bangunan

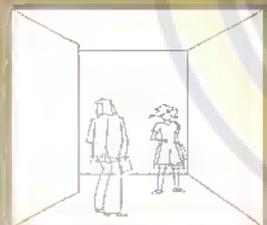


Tangga manual berfungsi sebagai tangga penghubung antara lantai 1 dan lantai 2

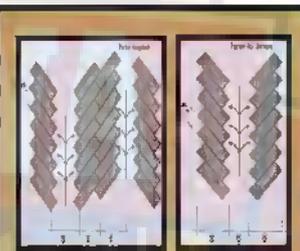
Sirkulasi Luar Bangunan



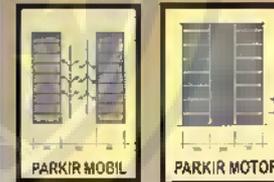
Sirkulasi pejalan kaki pada area semi publik dan privat yang merupakan lokasi jogging track



Conдор digunakan sebagai akses untuk menuju ke unit-unit ruang



Parkir 45



PARKIR MOBIL

PARKIR MOTOR

Parkir 90 dua arah keluar masuk

OUT-PUT



KONSEP PROGRAM RUANG

INPUT

TUJUAN

Untuk mendapatkan pola hubungan ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik kegiatan yang akan berlangsung

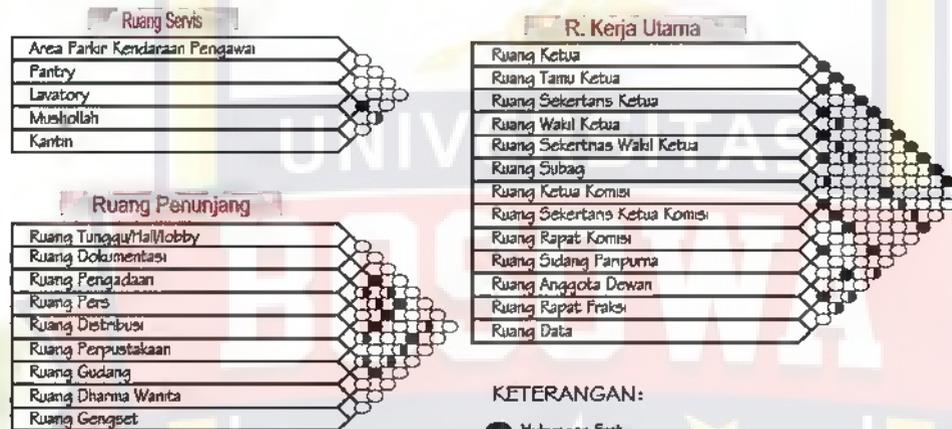
DAFTAR PERTIMBANGAN

- ◆ Kelompok ruang
- ◆ Jenis ruang
- ◆ Pengelompokan ruang
- ◆ Persyaratan ruang
- ◆ Hubungan ruang
- ◆ Pola sirkulasi

KRITERIA

- ◆ Akbitas
- ◆ Sesuai kelompok ruang
- ◆ Hubungan antar ruang

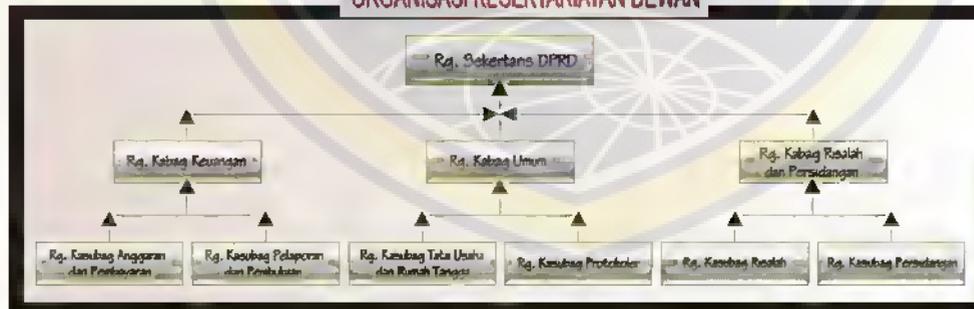
ANALISIS



KETERANGAN:

- Hubungan Erat
- ◐ Hubungan Kurang Erat
- Tidak Ada Hubungan

ORGANISASI KESEKRETARIATAN DEWAN



OUTPUT

ORGANISASI RUANG



KONSEP proses perancangan

INPUT

TUJUAN

Untuk mengelola bagian site secara maksimal yang sesuai dengan peruntukan

gedung kantor DPRD Kab Banggai Laut

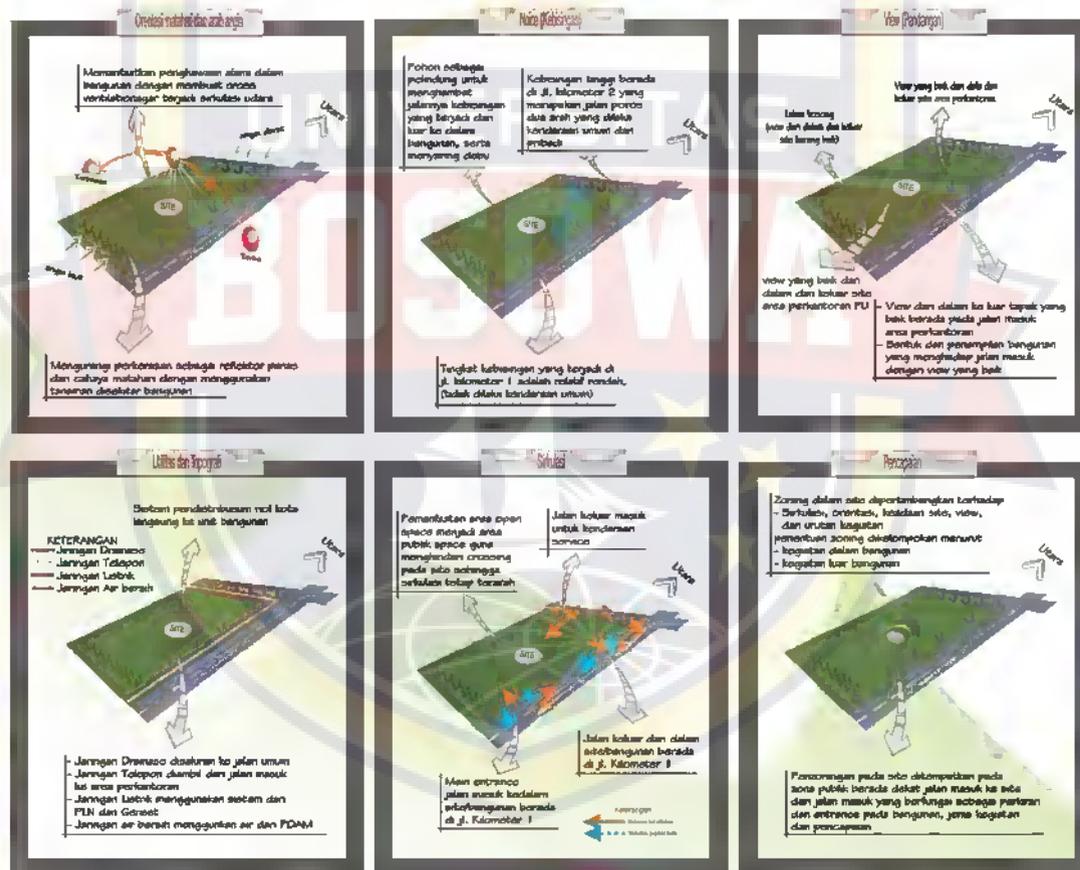
Dasar Pertimbangan

1. Orieantasi matahari dan mata angin
- 2.. noise
3. view
4. Utilitas dan tofografi
5. Sirkulasi & Pencapaian

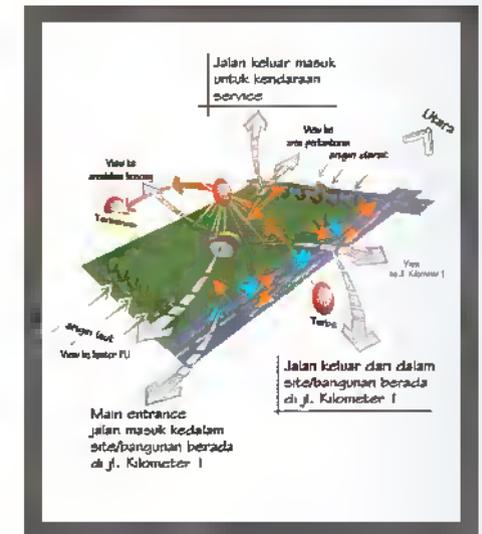
Kriteria

- 1.luas site mampu menampung aktifitas dalam maupun luar ruangan
- 2.. kondisi topografi mampu mendukung estetika bangunan
3. sirkulasi di dalam maupun di luar site
4. Utilitas kota memadai

ANALISIS



OUTPUT



KONSEP SISTEM UTILITAS

INPUT

ANALISIS

OUT-PUT

TUJUAN

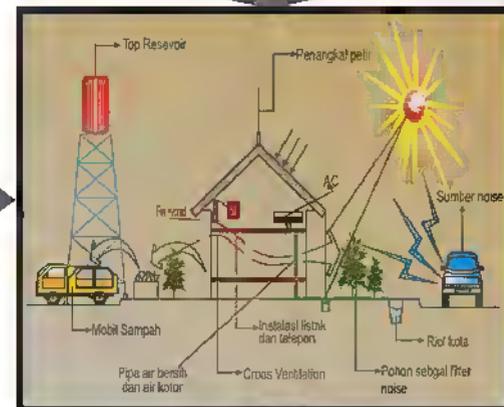
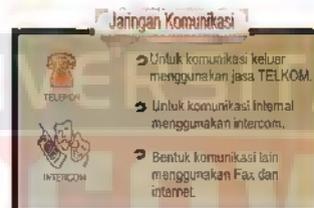
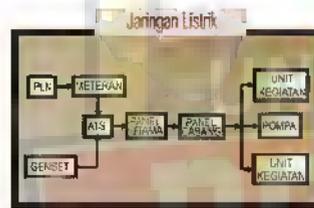
Untuk menentukan sistem jaringan utilitas dan perlengkapan bangunan yang dapat menunjang aktifitas dalam bangunan

DAFTAR PERTIMBANGAN

- ◆ Kemudahan dalam penggunaan dan pemeliharaan
- ◆ Kesederhanaan sistem jaringan
- ◆ Keamanan terhadap pelaku aktifitas dan lingkungan sekitarnya

KRITERIA

- ◆ Jaringan listrik (elektrikal)
- ◆ Jaringan air bersih
- ◆ Jaringan komunikasi (telepon)
- ◆ Jaringan air kotor
- ◆ Penghawaan
- ◆ Pencahayaan
- ◆ Keamanan
- ◆ Sampah
- ◆ Akustik



DOSEN PEMBIMBING

SAFRIANI LATIEF, ST, MT
LISA AMALIA, ST, MT

NAMA / STAMBUK

MUH FIRMANSYAH SALIM
45 12 043 009

JUDUL

GEDUNG KANTOR DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

GAMBAR

SYSTEM UTILITAS

SKALA

NO. LBR

07

JML. LBR

32

KET.



UNIVERSITAS
BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR

UJIAN SARJANA
SEMESTER GENAP
2018/2019

KONSEP SISTEM SIRKULASI

INPUT

TUJUAN

Untuk menentukan pola pengaturan sistem sirkulasi yang baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan atau sirkulasi disekitar tapak

DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Jenis dan bentuk kegiatan
- ◆ Kelompok pemakai
- ◆ Tingkat hubungan ruang
- ◆ Sifat dan karakter kegiatan
- ◆ Efisiensi ruang
- ◆ Sirkulasi di dalam bangunan
- ◆ Sirkulasi di luar bangunan
- ◆ Sirkulasi kendaraan

ANALISIS

Sirkulasi Dalam Bangunan



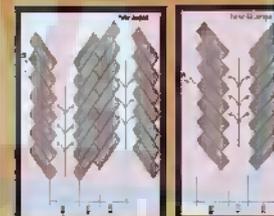
Tangga manual berfungsi sebagai tangga penghubung antara lantai 1 dan lantai 2

Sirkulasi Luar Bangunan

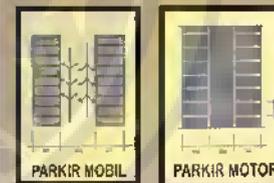


Concor digunakan sebagai akses untuk menuju ke unit-unit ruang

Sirkulasi pejalan kaki pada area semi publik dan privat yang merupakan lokasi jogging track



Parker 45



PARKIR MOBIL

PARKIR MOTOR

Parker 90
dua arah keluar masuk

OUTPUT



KONSEP SISTEM STRUKTUR & MATERIAL

INPUT

TUJUAN

Untuk mendapatkan sistem struktur yang dapat mendukung wadah bangunan yang efisien dengan beban yang diterima

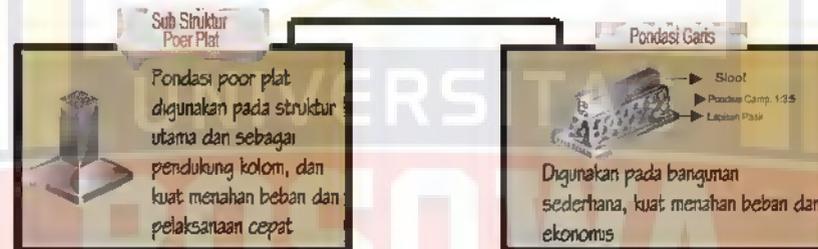
DASAR PERTIMBANGAN

- ◇ Bentuk bangunan
- ◇ Kondisi lingkungan/ tanah

KRITERIA

- ◇ Bangunan utama bertantai dua
- ◇ Keadaan tanah di lokasi site dan sekitarnya cukup keras
- ◇ Bahan mudah diperoleh

ANALISIS



Super Struktur

Dinding Batu Bata

Cocok digunakan untuk semua bangunan, pengerjaannya mudah dan sangat permanen

Upper Structure

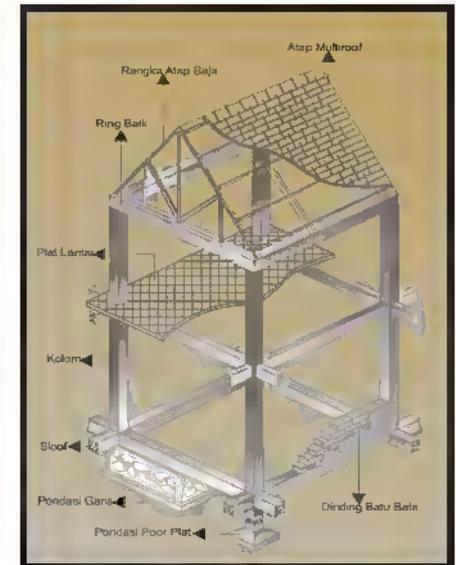


Rangka Atap Baja



Rangka baja digunakan pada struktur bentangan lebar

OUTPUT



1. Sub struktur menggunakan pondasi dan pondasi rakit
2. Super struktur menggunakan struktur rangka beton
3. Upper struktur menggunakan rangka baja dan atap plat



KONSEP TATA RUANG DALAM

INPUT

TUJUAN

penataan ruang dalam pada dasarnya merupakan usaha untuk mewujudkan penampilan sehingga dapat menunjang aktifitas yang ada dalam bangunan serta dapat menunjang fungsi ruang secara keseluruhan

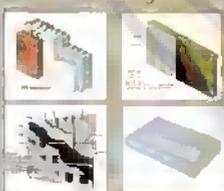
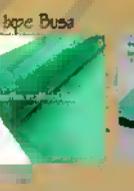
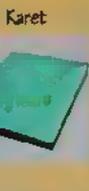
DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Material yang digunakan
- ◆ Fungsi material
- ◆ Penerapan dalam desain interior
- ◆ Estetika

ANALISIS

Lantai	Dinding	Plafond
<p>Karpas Digunakan pada ruang kerja ketua DPRD, Wakil ketua DPRD Anggota Dewan dan Subag</p> <p>Granit Digunakan pada area publik seperti hall, entrance dan area pelayanan</p> <p>Granit Digunakan pada ruang-ruang seperti karyawan, KMWC, lavatory, gudang dll</p> <p>Marmar Marmar digunakan pada ruang-ruang yang sifatnya service dan privat</p>	<p>Batu Bata Digunakan pada bagian dinding luar dan dalam bangunan</p> <p>Keramik Digunakan dinding seperti pada ruang dalam</p> <p>Keramik Keramik digunakan pada area service seperti WC dan lavatory</p>	<p>Gypsum Digunakan pada ruang kerja dan ruang rapat</p> <p>Takewood Digunakan pada ruang ketua DPRD wakil ketua DPRD, anggota dewan dan subag</p> <p>Takewood Digunakan pada ruangan penunjang, hall, KMWC dan gudang</p>

Material Akusik

Dinding	Plafond	Karpas	Lantai	Karet
 <p>Digunakan pada ruang-ruang rapat untuk menyerap bunyi</p>	 <p>Kegunaan untuk menyerap bunyi di dalam ruang rapat</p>		 <p>Digunakan pada ruang-ruang rapat untuk menyerap bunyi</p>	

OUT-PUT

Dikembangkan pada desain fisik



RUANG TAMU KETUA DPRD



RUANG KETUA DPRD



KONSEP TATA RUANG LUAR

INPUT

TUJUAN

Untuk mendapatkan tata ruang luar yang mencerminkan fungsi bangunan dan juga sebagai sarana penunjang outdoor sebagai elemen identitas bangunan dan menghidupkan suasana teratur, sejuk dan tenang

DASAR PERTIMBANGAN

- ◆ Soft material
- ◆ Hard material
- ◆ Jalur pedestrian
- ◆ Estetika

KRITERIA

- ◆ Jenis dan fungsi vegetasi
- ◆ Pola sirkulasi dan pencapaian
- ◆ Manfaat dan kenyamanan
- ◆ Penampilan dan estetika

ANALISIS

Soft Material

Kiara Payung

- ☛ Sebagai pelindung
- ☛ Sebagai penahan angin dan filtrasi matahari
- ☛ Mengarahkan sirkulasi

Perletakan:

- ☛ Sepanjang pembatas fisik, selasar dan jalan kompleks

Palm Raja

Fungsi :

- ☛ Unsur estetika, pengarah sirkulasi dalam perancangan jalur.
- ☛ Pembentukan tata hijau

Perletakan:

- ☛ Sepanjang pembatas fisik, selasar dan jalan kompleks

Beringin Putih

Fungsi :

- ☛ Sebagai penentu unsur estetika
- ☛ Sebagai pembatas fisik
- ☛ Sebagai pengarah kawasan

Perletakan:

- ☛ Disepanjang pembatas fisik

RUMPUT MANILA

Fungsi :

- ☛ Sebagai penentu unsur estetika
- ☛ Sebagai pembatas fisik
- ☛ Sebagai pengarah kawasan

Perletakan:

- ☛ Sepanjang pembatas fisik, dan taman

Hard Material

RABAT BETON

Rabat beton dipergunakan untuk selasar

PAVING BLOCK

Paving block sebagai peneras jalan

LAMPU TAMAN

Lampu taman sebagai pencahayaan pada area parkir dan taman pada malam hari

Street Furniture

PENGASPALAN

Jalan keluar masuk kendaraan menggunakan material aspal

PAVING BLOCK

Pedestrian dan parkir menggunakan paving block

OUT-PUT

Penggunaan pepohonan yang rindang dapat dijadikan pelindung untuk pejalan kaki pada area pedestrian dan pada area parkir

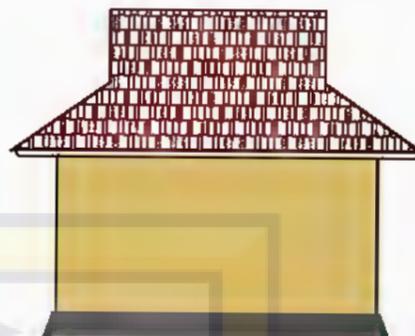




TAMPAK DEPAN
Skala 1 : 100



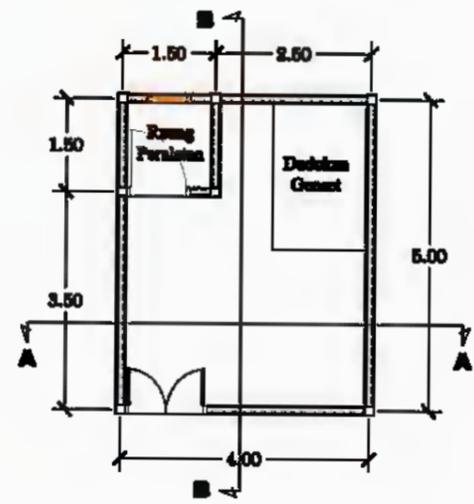
TAMPAK BELAKANG
Skala 1 : 100



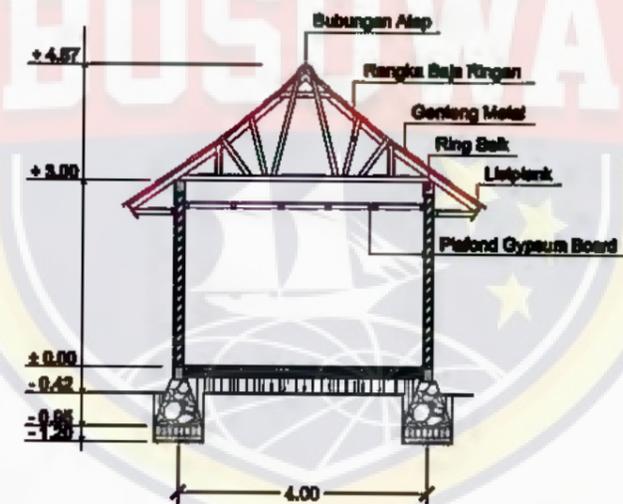
TAMPAK S. KIRI
Skala 1 : 100



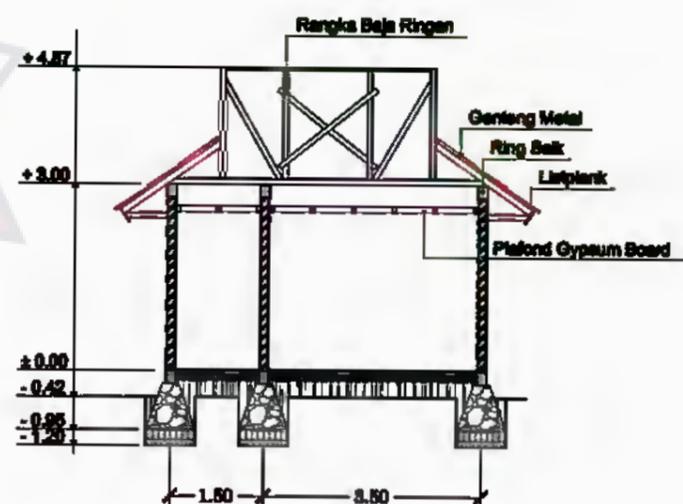
TAMPAK S. KANAN
Skala 1 : 100



DENAH GENSET
Skala 1 : 100

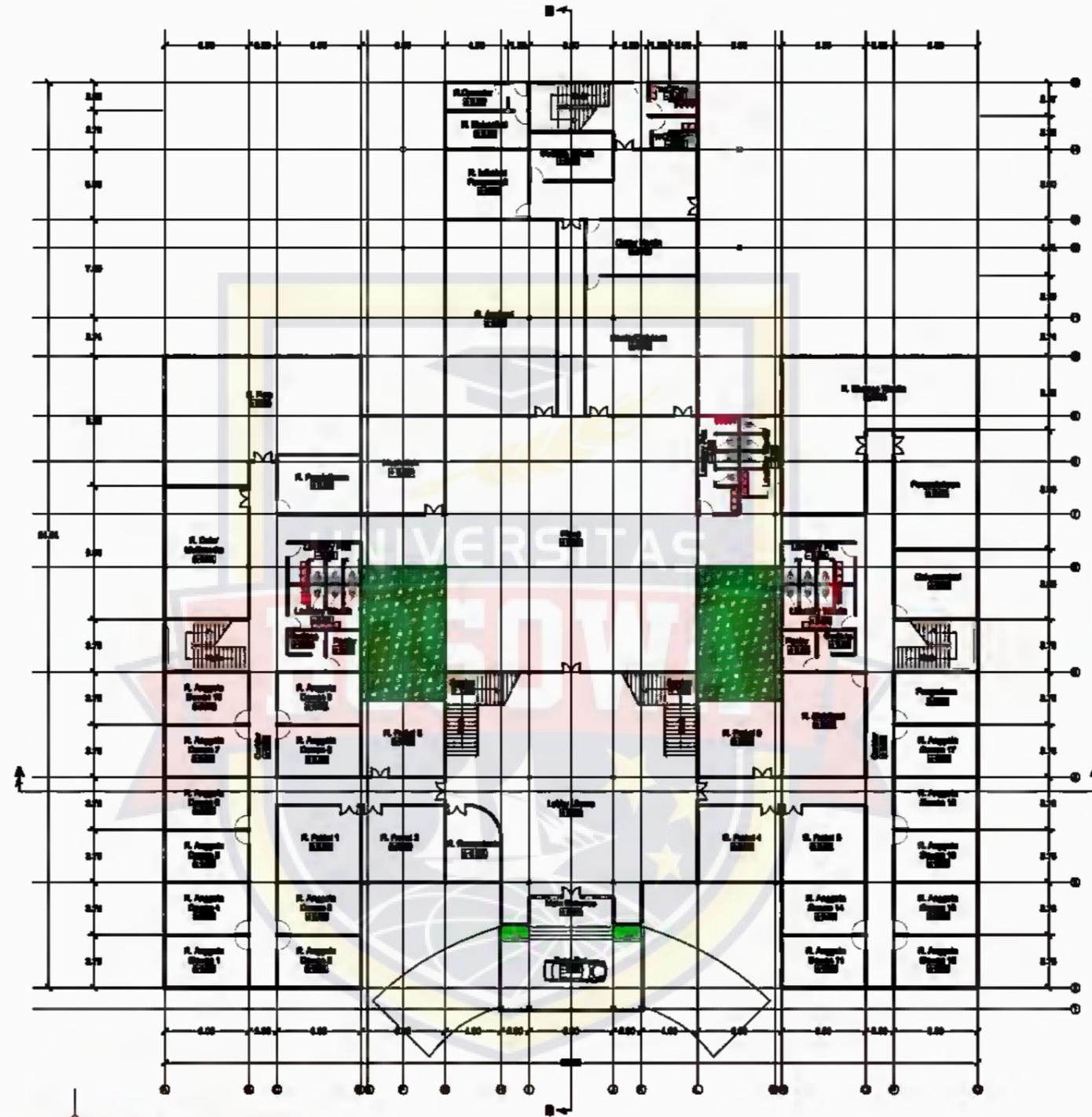


POTONGAN A.A
Skala 1 : 100



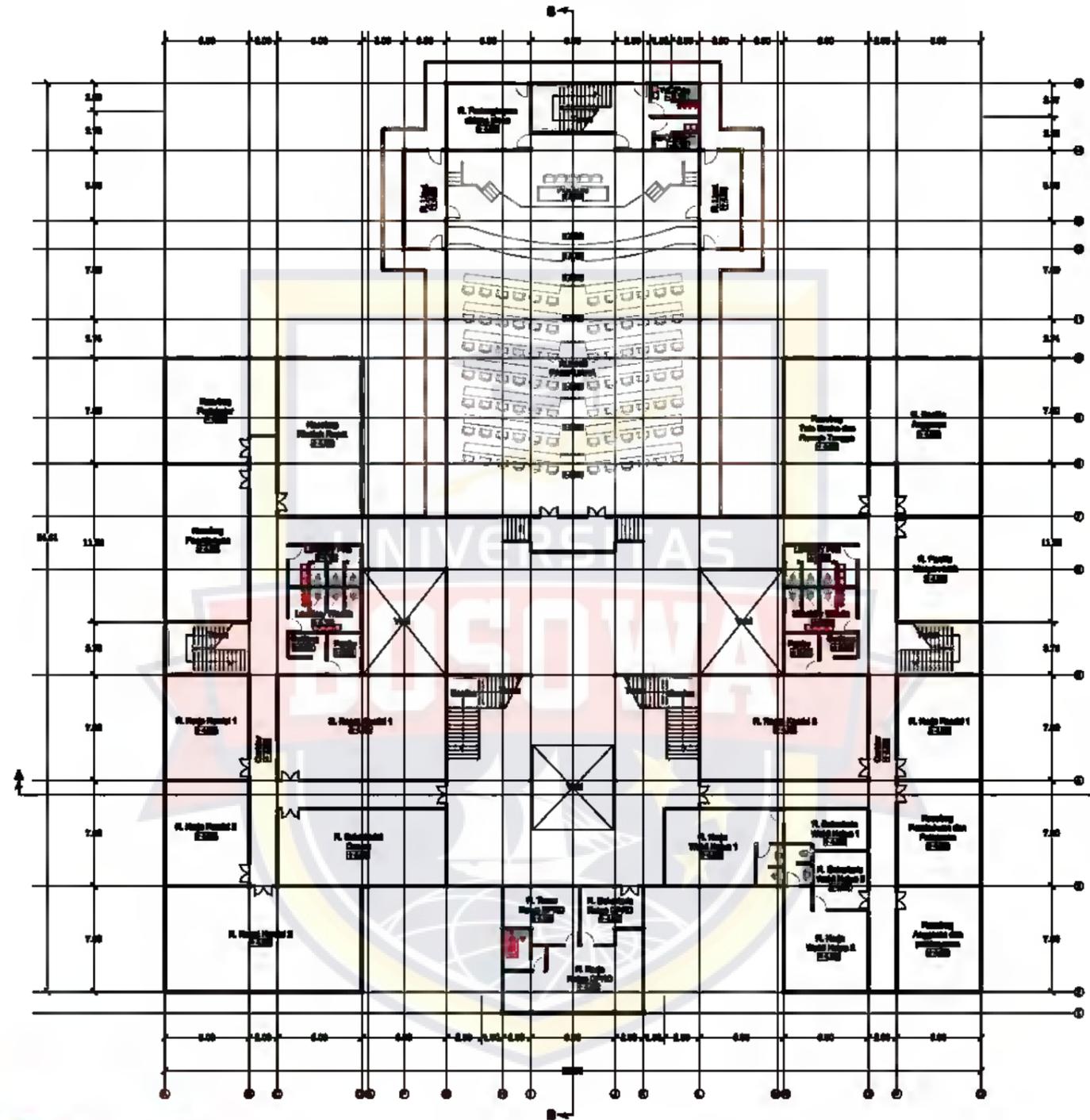
POTONGAN B.B
Skala 1 : 100

UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
		SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT	MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DENAH GENSET TAMPAK DAN POTONGAN	1:100	28	32	



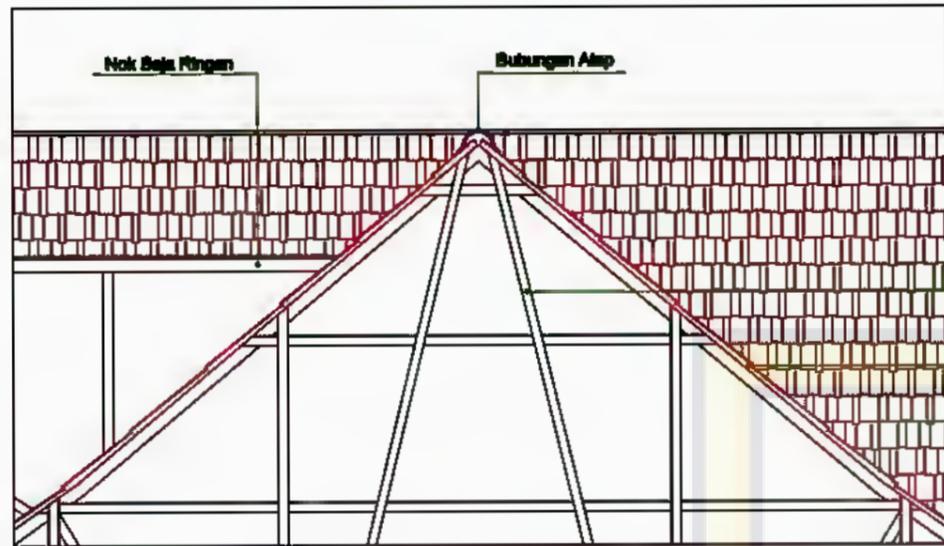
DENAH LANTAI 1
 Skala 1 : 300

	UJIAN SARJANA	DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
 <p>UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR</p>	<p>SEMESTER GENAP 2018-2019</p>	<p>SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT</p>	<p>MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009</p>	<p>GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH</p>	<p>DENAH LANTAI 1</p>	<p>1:350</p>	<p>14</p>	<p>32</p>	

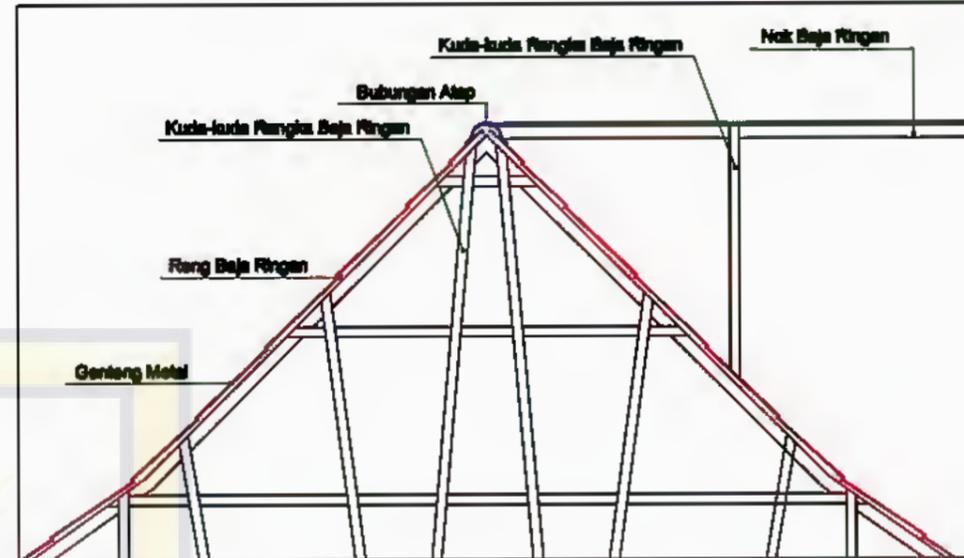


DENAH LANTAI 2
 Skala 1 : 300

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT	MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DENAH LANTAI 2	1:350	15	32	



DETAIL KUDA-KUDA B
Skala 1 : 50

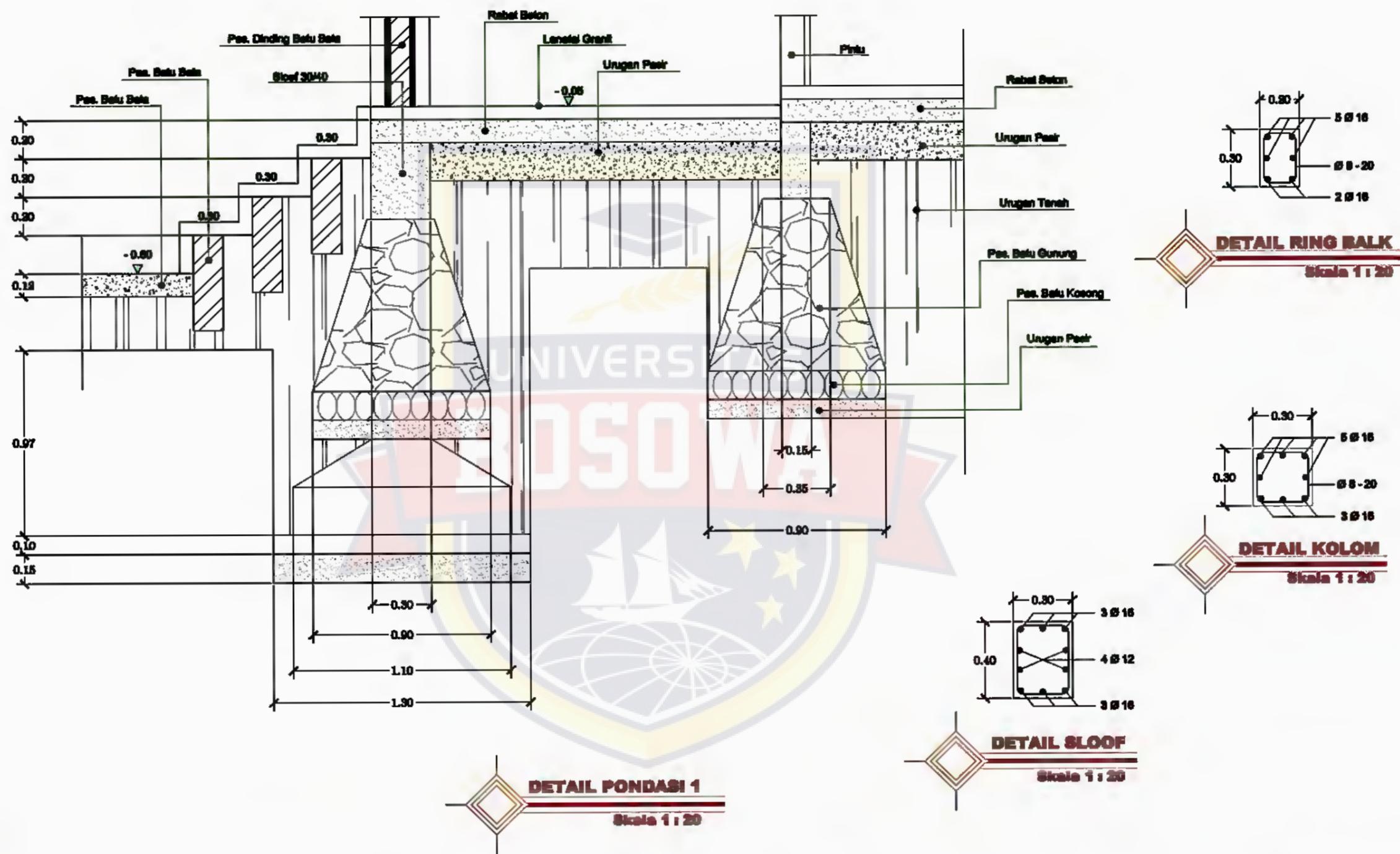


DETAIL KUDA-KUDA C
Skala 1 : 50



DETAIL KUDA-KUDA A
Skala 1 : 50

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
 <p>UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR</p>	<p>UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019</p>	SATRIANI LATIEF ST.,MT	MUH FIRMANSYAH SALIM	<p>GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT ROVINSI SULAWESI TENGAH</p>	<p>DETAIL KUDA-KUDA</p>	<p>1:50</p>	<p>22</p>	<p>32</p>	
		LISA AMALIA ST., MT	45 12 043 009						



		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN	
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT	MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DETAIL PONDASI DETAIL SLOOF DETAIL KOLOM DETAIL RING BALK	1:20	20	32	



UNIVERSITAS
BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR

UJIAN SARJANA

SEMESTER
GENAP
2018-2019

DOSEN PEMBIMBING

SATRIANI LATIEF ST.,MT
LISA AMALIA ST., MT

NAMA / STAMBUK

MUH FIRMANSYAH SALIM
45 12 043 009

GEDUNG KANTOR DPRD
KAB. BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA GAMBAR

INTERIOR
RUANG KETUA
DPRD

SKALA

NO. LBR

12

JML. LBR

32

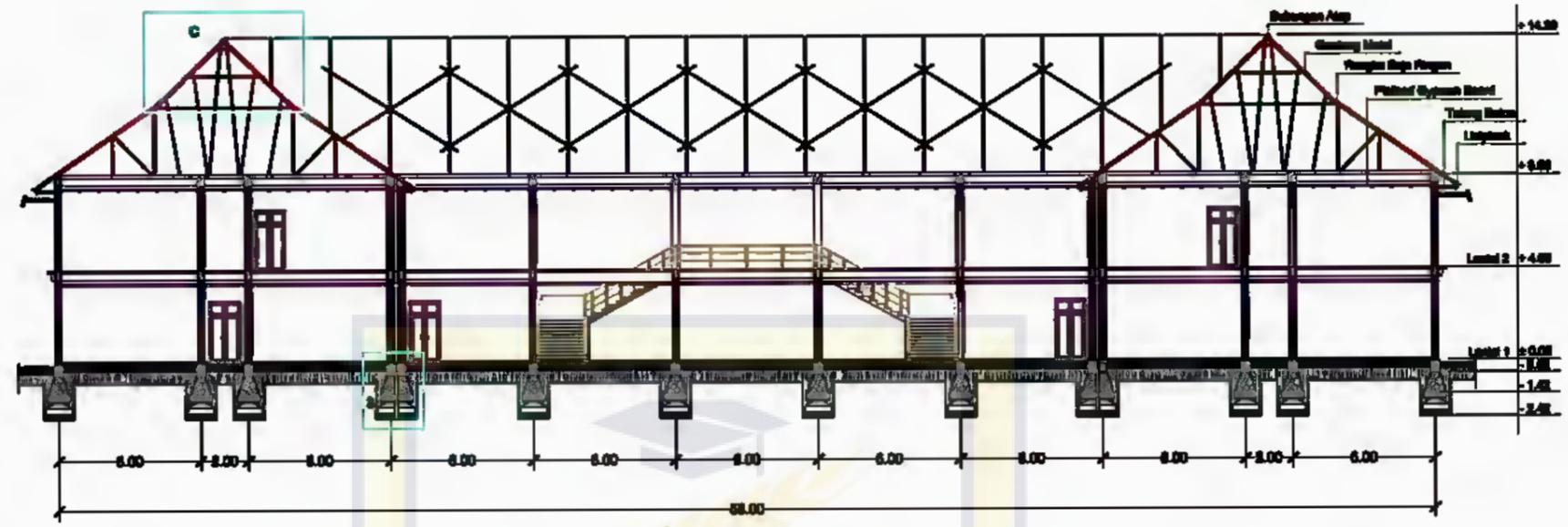
KETERANGAN



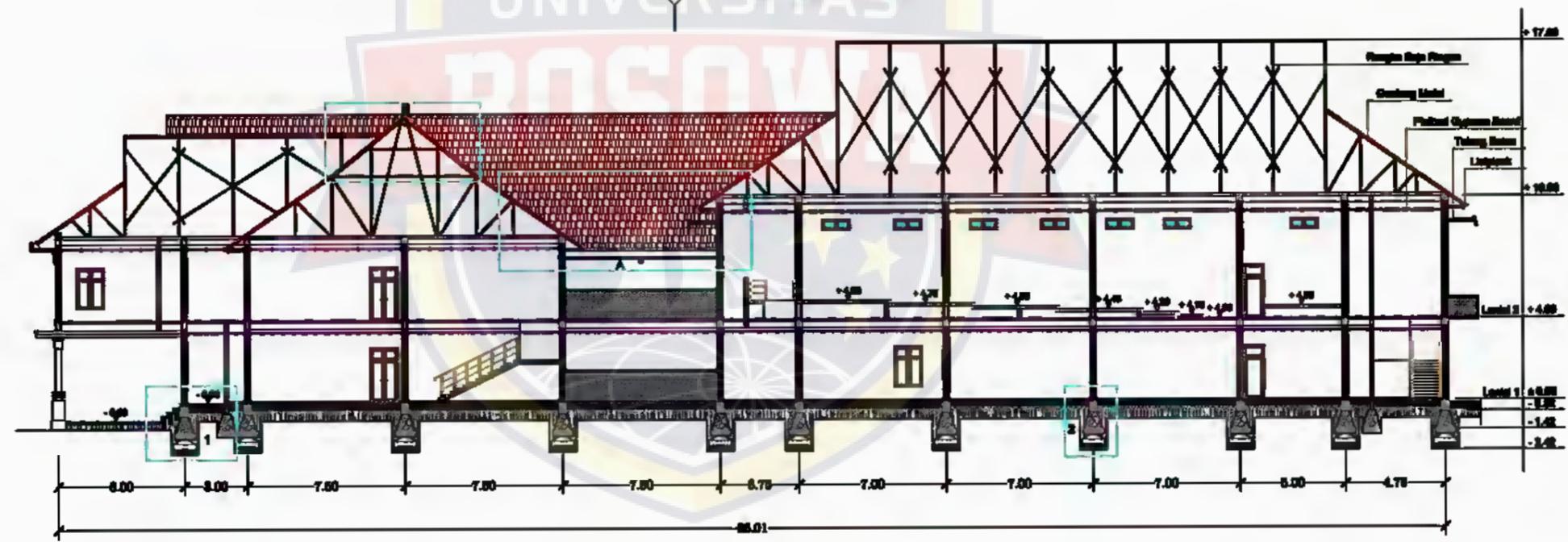
			DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML. LBR	KETERANGAN
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT	MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	PERSPEKTIF 1		30	32	



		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
 <p>UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR</p>	<p>UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019</p>	<p>SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT</p>	<p>MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009</p>	<p>GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWSI TENGAH</p>	<p>PERSPEKTIP 2</p>		<p>31</p>	<p>32</p>	

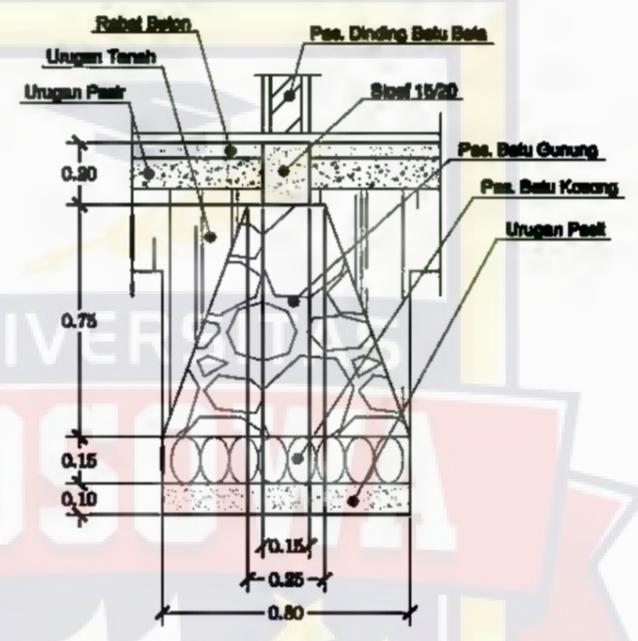
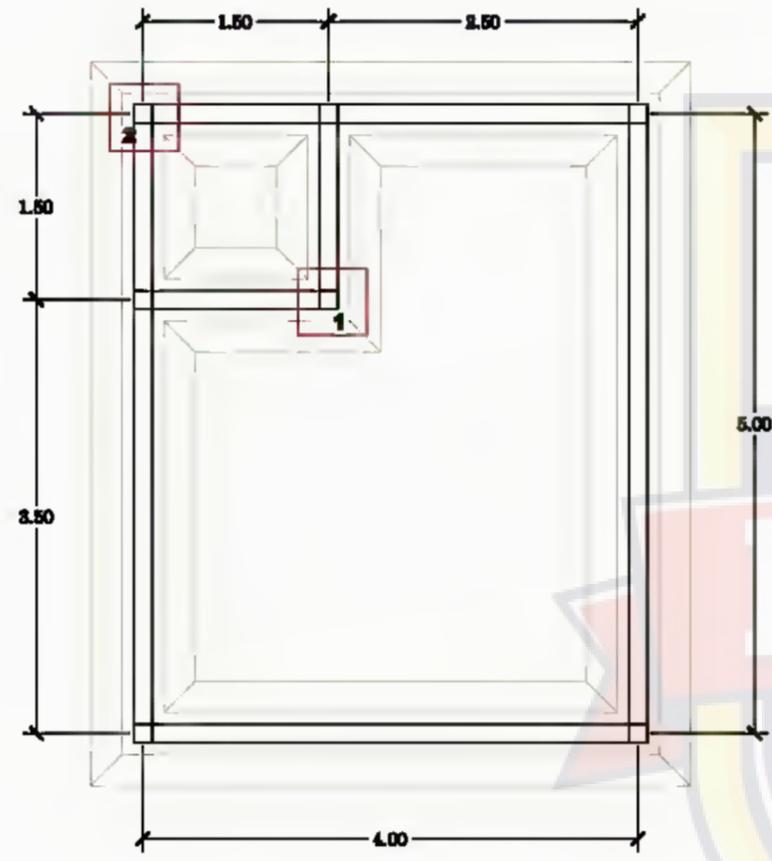


POTONGAN A.A
Skala 1 : 250

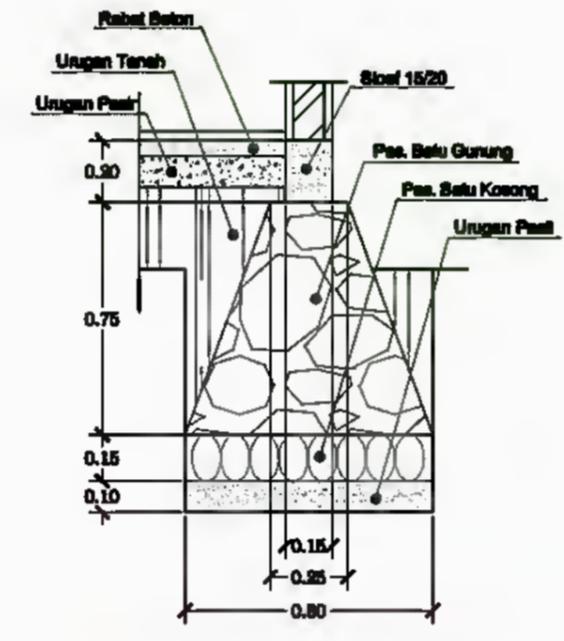


POTONGAN B.B
Skala 1 : 250

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NÖ. LBR	JML LBR	KETERANGAN	
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	Satriani Latief ST.,MT Lisa Amalia ST., MT	Muh Firmansyah Salim 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	POTONGAN	1:250	18	32	



DETAIL PONDASI 1 GENSET
Skala 1 : 20

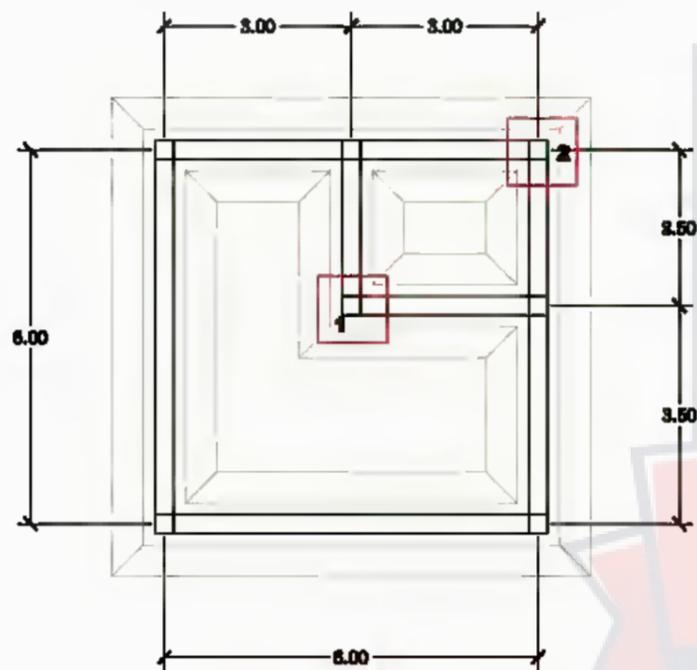


DETAIL PONDASI 2 GENSET
Skala 1 : 20

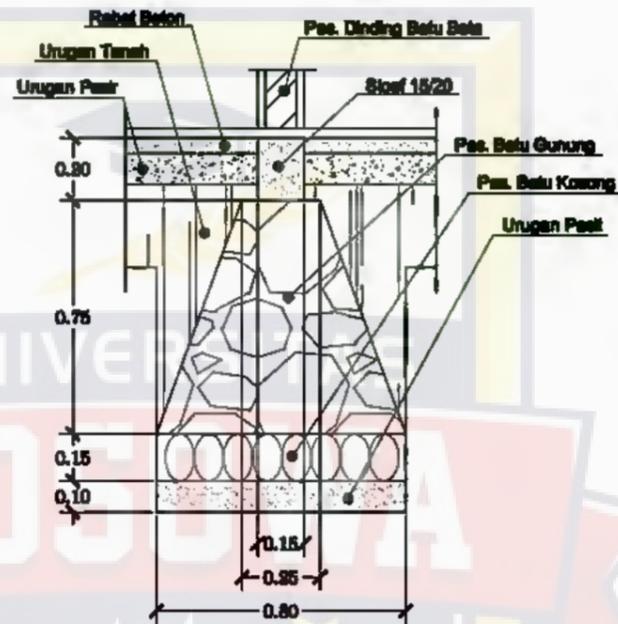


RENC. PONDASI GENSET
Skala 1 : 50

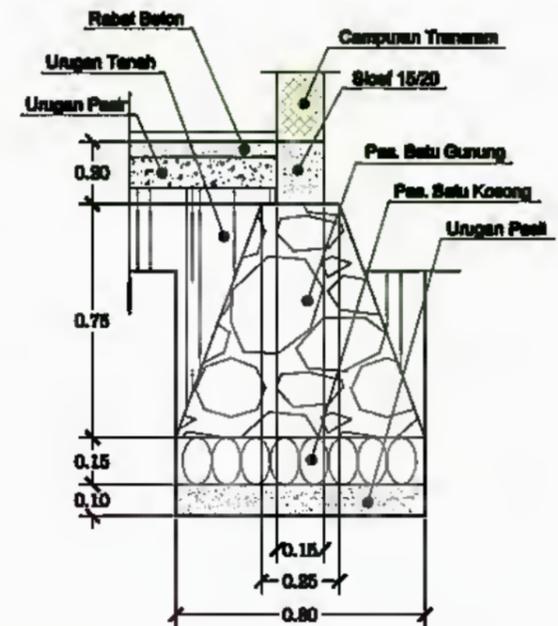
		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA	SATRIANI LATIEF ST.,MT	MUH FIRMANSYAH SALIM	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	RENCANA PONDASI DAN DETAIL PONDASI	1:50 1:20	27	32
		SEMESTER GENAP 2018-2019	LISA AMALIA ST., MT	45 12 043 009					



RENC. PONDASI POS JAGA
Skala 1 : 50



DETAIL PONDASI 1 POS JAGA
Skala 1 : 20



DETAIL PONDASI 2 POS JAGA
Skala 1 : 20

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA	SATRIANI LATIET S1, MT	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT ROVINSI SULAWESI TENGAH	RENCANA PONDASI RENCANA DETAIL	1:50 1:20	24	32	
		SEMESTER GENAP 2018-2019	LISA AMALIA ST., MT						



KETERANGAN

- A. BANGUNAN UTAMA
- B. POS JAGA
- C. PARKIR MOBIL
- D. PARKIR MOTOR
- E. PARKIR MOBIL KETUA DAN WAKIL KETUA
- F. TEMPAT GENSET
- G. LAPANGAN UPACARA
- H. PARKIR BUS

SITE PLAN

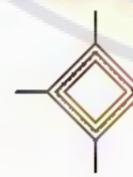
Skala 1 : 500

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
 <p>UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR</p>	<p>UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019</p>	SATRIANI LATIEF ST.,MT	MUH FIRMANSYAH SALIM	<p>GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH</p>	<p>SITE PLAN</p>	<p>1:500</p>	<p>12</p>	<p>32</p>	
		LISA AMALIA ST., MT	45 12 043 009						




TAMPAK DEPAN
 Skala 1 : 250




TAMPAK BELAKANG
 Skala 1 : 250

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
 UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	SATRIANI LATIEF ST.,MT LISA AMALIA ST., MT	MUH FIRMANSYAH SALIM 45 12 043 009	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK BELAKANG	1:250	16	32	



TAMPAK S. KIRI

Skala 1 : 250



TAMPAK S. KANAN

Skala 1 : 250



UNIVERSITAS
BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN ARSITEKTUR

UJIAN SARJANA
SEMESTER
GENAP
2018-2019

DOSEN PEMBIMBING

SATRIANI LATIEF ST.,MT
LISA AMALIA ST., MT

NAMA MAHASISWA

MUH FIRMANSYAH SALIM
45 12 043 009

JUDUL

GEDUNG KANTOR DPRD
KAB. BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA GAMBAR

TAMPAK S.
KANAN & S. KIRI

SKALA

1:250

NÖ. LBR

17

JML LBR

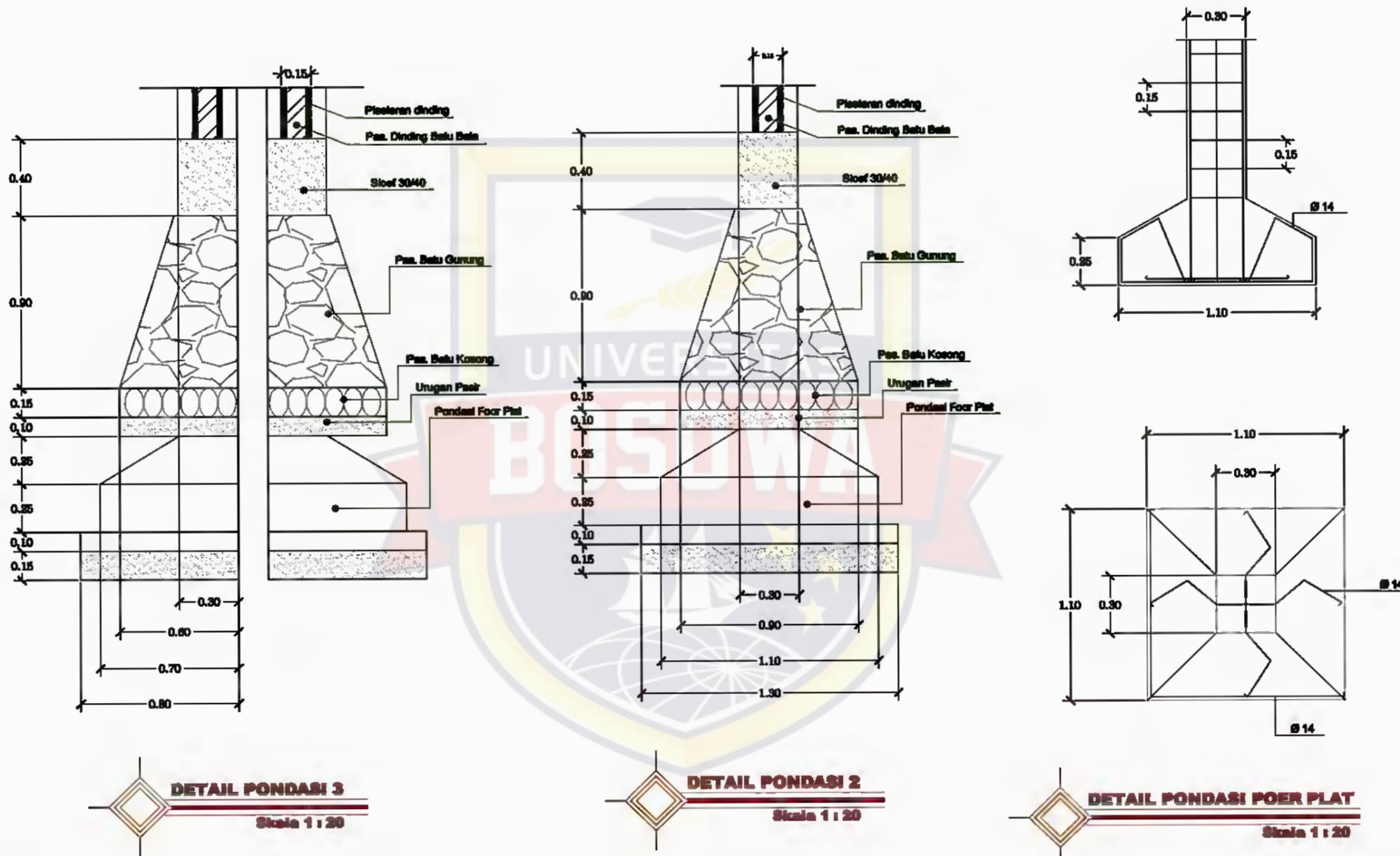
32

KETERANGAN



TAMPAK KOMPLEKS
Skala 1 : 250

		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NÖ. LBR	JML. LBR	KETERANGAN
 UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA SEMESTER GENAP 2018-2019	SATRIANI LATIEF ST.,MT	MUH FIRMANSYAH SALIM	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	TAMPAK KOMPLEX	1:300	29	32	
		LISA AMALIA ST., MT	45 12 043 009						



		DOSEN PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA	JUDUL	NAMA GAMBAR	SKALA	NO. LBR	JML LBR	KETERANGAN
	UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR	UJIAN SARJANA	MUH FIRMANSYAH SALIM	GEDUNG KANTOR DPRD KAB. BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH	DETAIL PONDASI B-C & POERPLAT	1:20	21	32	
		SEMESTER GENAP 2018-2019	45 12 043 009						